

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2012.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca dan LAK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Kinerja perekonomian Kota Surabaya di tahun 2012 cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan total nilai PDRB Kota Surabaya baik yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku maupun harga konstan. Selama tahun 2012, nilai PDRB ADHB Kota Surabaya mencapai Rp 264.750.412,14 juta.

Bila dilihat dari nilai tambah sektoral menurut harga berlaku, peranan tiga sektor utama yakni sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR); sektor Industri Pengolahan serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap struktur perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2012 sekitar 75,93%. Ketiga sektor ini, masing-masing memberikan kontribusi yaitu 44,15% untuk sektor sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR); sebesar 21,60% dari sektor Industri Pengolahan dan sebesar 10,18% dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Berdasarkan pengelompokan sektor, sektor tersier masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Surabaya. Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari kelompok sektor tersier tahun 2012 mencapai Rp 179.936.446,51 juta, atau berkontribusi sebesar 67,96%. Adapun kelompok sekunder sepanjang tahun 2012 nilainya mencapai Rp 84.608.281,89 juta atau 31,96%. Sedangkan kelompok primer hanya berkontribusi sebesar 0,08% atau senilai Rp 205.683,76 juta.

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2012
(Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2011	%	2012 ¹⁾	%
I. Primer	190.935,31	0,08	205.683,76	0,08
1. Pertanian	178.517,17	0,08	192.101,26	0,07
2. Pertambangan dan Penggalian	12.418,14	0,01	13.582,50	0,01
II. Sekunder	75.781.289,35	32,21	84.608.281,89	31,96
1. Industri Pengolahan	51.064.301,93	21,71	57.194.845,44	21,60
8.498.518,16	3,61	9.381.552,66	3,54	
2. Listrik, Gas dan Air Bersih	16.218.469,27	6,89	18.031.883,79	6,81

3. Bangunan/Konstruksi				
III. Tersier	159.284.999,00	67,71	179.936.446,51	67,96
1. Perdagangan, Hotel, & Restoran	102.972.404,53	43,77	116.887.398,40	44,15
2. Pengangkutan & Komunikasi	23.653.328,63	10,05	26.951.664,21	10,18
3. Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan	14.191.565,89	6,03	16.018.203,02	6,05
4. Jasa-jasa	18.467.699,95	7,85	20.079.180,88	7,58
Total PDRB ADHB	235.257.223,66	100,00	264.750.412,14	100,00

Sumber data : BPS Kota Surabaya, Februari 2013

Catatan : *) data sementara

Di sisi lain, sepanjang periode tahun 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2000 mengalami peningkatan sebesar 7,32% dari Rp.94.435.913,41 juta tahun 2011 menjadi Rp. 101.344.846,99 juta pada tahun 2012.

Berdasarkan harga konstan, kontribusi sektor tersier selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan dari 64,94% di tahun 2011 menjadi 69,88% dengan kontributor utama adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sebaliknya, sektor primer mulai menurun peranannya di tahun 2012 sebagai dampak dari beralihnya kegiatan ekonomi Kota Surabaya dari sektor primer ke sektor jasa-jasa. Sedangkan kontribusi dari sektor sekunder di tahun 2012 sebesar 30,04%.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2012 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	%	2012 ^{*)}	%
I. Primer	80.960,26	0,09	81.508,04	0,08
1. Pertanian	74.449,11	0,08	74.764,80	0,07
2. Pertambangan dan Penggalian	6.511,15	0,01	6.743,24	0,01
II. Sekunder	28.733.568,27	30,43	30.447.407,96	30,04
1. Industri Pengolahan	20.185.278,64	21,37	21.309.499,76	21,03
2. Listrik, Gas dan Air Bersih	2.231.439,76	2,36	2.403.469,40	2,37
3. Bangunan/Konstruksi	6.316.849,86	6,69	6.734.438,80	6,65
III. Tersier	65.621.384,88	64,94	70.815.931,00	69,88
1. Perdagangan, Hotel, & Restoran	40.254.149,99	42,63	43.647.978,85	43,07
2. Pengangkutan & Komunikasi	11.092.274,38	11,57	12.046.992,42	11,89
3. Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan	6.168.536,23	6,53	6.605.537,36	6,52

4. Jasa-jasa	8.106.424,29	8,58	8.515.422,37	8,40
Total PDRB ADHK	94.435.913,41	100,00	101.344.846,99	100,00

Sumber data : BPS Kota Surabaya, Februari 2013

Catatan : *) data sementara

Selain perkembangan PDRB, potensi unggulan perekonomian daerah salah satunya juga dapat dilihat melalui gambaran ekspor produk dari Kota Surabaya, yang sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan tingkat devisa. Total nilai ekspor Kota Surabaya periode Januari–Desember 2012 mencapai US\$ 15.448,55 juta atau lebih rendah 11,95% dibandingkan nilai totalnya di tahun 2011 yang bernilai US\$ 17.545,31 juta. Penurunan nilai ekspor ini mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2011 sebagai dampak belum membaiknya perekonomian global pasca krisis keuangan di Amerika dan beberapa negara di Eropa. Akan tetapi, melemahnya daya beli negara-negara yang terdampak krisis menyebabkan arus perdagangan internasional bergerak melambat di tahun 2012, yang juga berimbas pada kinerja perdagangan internasional Kota Surabaya. Di sisi lain, jumlah total impor Kota Surabaya mencapai US\$ 16.852,60 juta sehingga terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US\$ 1.404,06 juta.

Selama periode Januari–Desember 2012 terdapat lima kelompok/jenis komoditi produk-produk non migas tertinggi yang diekspor dari Kota Surabaya yaitu perhiasan/permata (US\$ 1.416,50 juta); lemak & minyak hewan/nabati (US\$ 1.310,69 juta); bahan kimia organik (US\$ 1.104,65 juta); tembaga (US\$ 1.018,18 juta); dan kertas/karton (US\$ 1.007,54 juta). Sedangkan lima macam kelompok/jenis komoditi yang diimpor ke Kota Surabaya antara lain mesin-mesin/pesawat mekanik (US\$ 1.902,10 juta); besi dan baja (US\$ 1.814,01 juta); ampas/sisa industri makanan (US\$ 1.164,94 juta); pupuk (US\$ 1.118,07 juta); serta plastik dan barang dari plastik (US\$ 957,63 juta). Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 3. Komoditas Ekspor-Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2012*

EKSPOR		IMPOR	
Komoditas	Nilai (Juta US\$)	Komoditas	Nilai (Juta US\$)
Perhiasan/Permata	1.416,50	Mesin-mesin/ Peralatan Mekanik	1.870,24
Lemak & Minyak Hewan/Nabati	1.310,69	Besi dan Baja	1.811,13

EKSPOR		IMPOR	
Komoditas	Nilai (Juta US\$)	Komoditas	Nilai (Juta US\$)
Bahan Kimia Organik	1.104,65	Ampas/Sisa Industri Makanan	1.164,94
Tembaga	1.018,18	Pupuk	1.118,07
Kertas/Karton	1.007,54	Plastik dan Barang dari Plastik	953,80
Kayu, Barang dari Kayu	926,48	Gandum-gandum	892,77
Ikan dan Udang	839,78	Bahan Kimia Anorganik	855,50
Karet dan Barang dari Karet	644,68	Bahan Kimia Organik	648,96
Perabot, Penerangan Rumah	574,75	Mesin/Peralatan Listrik	564,38
Berbagai produk kimia	549,59	Biji-bijian berminyak	463,62
Jumlah 10 Komoditas di atas	9.392,84	Jumlah 10 Komoditas di atas	10.343,40
Jumlah Komoditas Lainnya	6.055,71	Jumlah Komoditas Lainnya	6.443,26
Nilai Total Ekspor Non Migas	15.448,55	Nilai Total Impor Non Migas	16.786,67

Sumber data : Bank Indonesia, Februari 2013
Catatan : *) data sementara

Ditinjau dari kawasannya, tujuan ekspor Kota Surabaya terbesar adalah ke wilayah Asia yaitu US\$ 9.382,74 juta atau 60,74% dari keseluruhan total nilai ekspor. Negara Jepang dan Cina merupakan dua negara tertinggi di kawasan Asia yang menjadi tujuan ekspor komoditas dari Kota Surabaya dengan nilai ekspor masing-masing pada periode Januari-Desember 2012 sebesar US\$ 3.165,69 juta (20,49%) dan US\$ 1.603,60 juta (10,38%). Selanjutnya total ekspor ke kawasan Amerika sebesar US\$ 2.016,16 juta (13,05%) dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat yaitu US\$ 1.595,86 juta (10,33%).

Di sisi lain, impor dari negara Cina ke Kota Surabaya masih merupakan yang tertinggi mencapai US\$ 2.951,23 juta (17,51%), diikuti oleh negara Amerika Serikat senilai US\$ 714,85 juta (4,24%). Total impor dari kawasan Asia mencapai US\$ 12.145,55 juta (72,07%), dengan proporsi 32,28% adalah impor dari negara-negara di kawasan ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam dan beberapa negara lainnya.

**Tabel. 4. Kawasan Negara Asal/Tujuan Ekspor-Impor Non Migas
Kota Surabaya Tahun 2012***

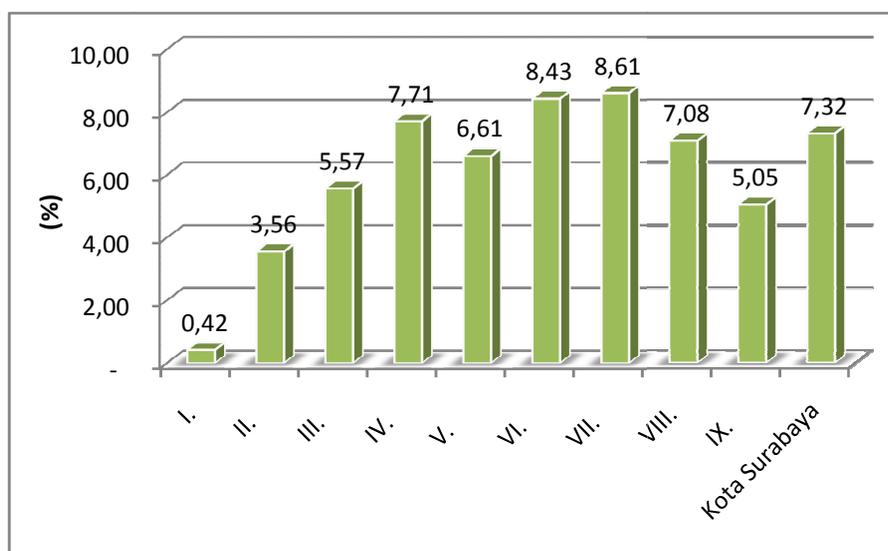
EKSPOR			IMPOR		
Kawasan Negara Tujuan	Nilai (Juta US\$)	(%)	Kawasan Negara Asal	Nilai (Juta US\$)	(%)
1. Asia	9.382,74	60,74	1. Asia	12.145,55	72,07
– ASEAN	2.681,68	17,36	– ASEAN	5.440,77	32,28
– Non ASEAN	6.701,06	43,38	– Non ASEAN	6.704,78	39,78
2. Afrika	1.480,53	9,58	2. Afrika	352,99	2,09
3. Amerika	2.016,16	13,05	3. Amerika	1.309,11	7,77
4. Australia	587,15	3,80	4. Australia	601,81	3,57
5. Eropa	1.981,96	12,83	5. Eropa	2.443,14	14,50
Nilai Total Ekspor Non Migas	15.448,54	100,00	Nilai Total Impor Non Migas	16.852,60	100,00

Sumber data : Bank Indonesia, Februari 2013

Catatan : *) data sementara

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2012 diketahui dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan sebesar 7,32% dibandingkan tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh masih cukup tingginya daya serap masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan domestik. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai tambah di sektor perdagangan seiring dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap acara-acara keagamaan dan hari besar nasional serta pesta diskon yang digelar di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Surabaya. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gorong-gorong yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan, dapat mengurangi biaya transportasi bagi kegiatan ekonomi sehingga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2012

Sumber: BPS Kota Surabaya, Februari 2013

- Keterangan: I. Sektor Pertanian
 II. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 III. Sektor Industri Pengolahan
 IV. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
 V. Sektor Konstruksi
 VI. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 VII. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 VIII. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 IX. Sektor Jasa-Jasa

Sepanjang tahun 2012 pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pengangkutan dan komunikasi (8,61%) dengan dukungan pertumbuhan dari subsektor jasa penunjang telekomunikasi yaitu 12,12%. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian (0,42%). Selain itu, terdapat tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan agregat Kota Surabaya, yakni sektor Pengangkutan dan Komunikasi (8,61%); sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,43%) serta sektor Listrik, Gas dan Air bersih (7,71%). Sementara pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur di tahun 2012 mencapai 7,27% dan Nasional sebesar 6,23%.

Tabel 1.
PERBANDINGAN INDIKATOR EKONOMI
KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2012*

	Surabaya	Jawa Timur	Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,32	7,27	6,23
PDB/PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	264,75	1.001,72	8.241,9
PDB/PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	101,35	393,67	2.618,1
PDB/PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	86,01	26,32	33,30

Sumber data: BPS Povinsi Jawa Timur, Februari 2013.

Catatan : *) data sementara

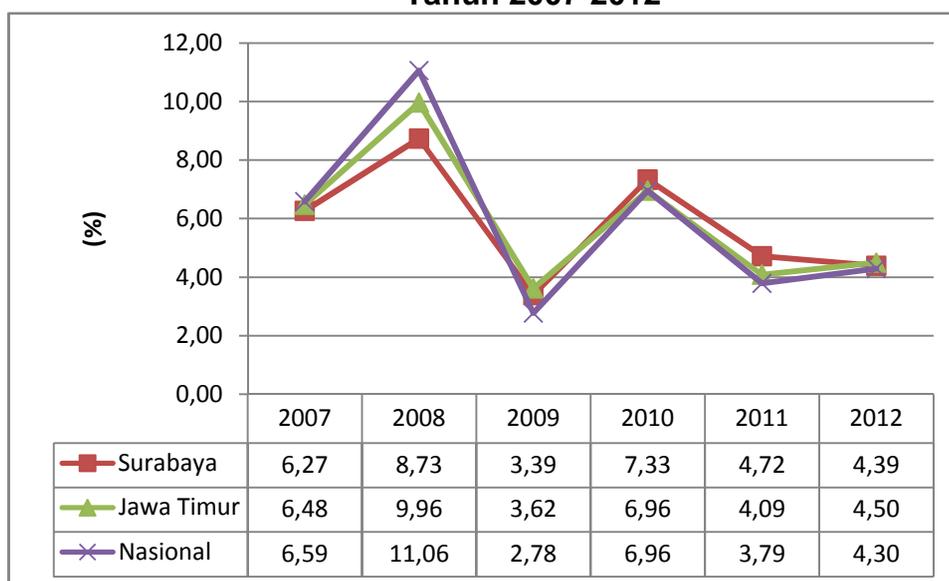
Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya di tahun 2012 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (7,27%) dan Nasional (6,23%). Hal ini menyebabkan jumlah PDRB ADHB kota Surabaya di tahun 2012 meningkat 12,54% dibanding tahun 2011 yang mencapai Rp 264,75 triliun. Demikian halnya dengan jumlah PDRB ADHK kota Surabaya tahun 2012 yang juga meningkat menjadi Rp 101,35 triliun atau lebih tinggi dari tahun 2011 yang nilainya Rp 94,44 triliun. Dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Surabaya tahun 2012 yang mencapai 3.078.028 jiwa, maka nilai PDRB perkapitanya (berdasarkan nilai ADHB) menjadi sebesar Rp 86,01 juta sebagaimana data yang ditunjukkan pada tabel xx di atas.

b. INFLASI

Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga barang dan jasa secara relatif mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya inflasi Kota Surabaya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Inflasi kota Surabaya di tahun 2012 mencapai 4,39% atau menurun dibandingkan tahun 2011 yaitu 4,72%. Sedangkan inflasi tahun 2012 di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai 4,50% dan Nasional sebesar 4,30%. Terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah ini menjadi pendukung menguatnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Gambar 1
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2007-2012



Sumber data: BPS Povinsi Jawa Timur, Februari 2013.

2.2. Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan potensi permasalahan yang masih akan dihadapi pada Tahun 2012, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan PAD sebesar angka 120,83% dari Rp.1.886.514.301.580,72 (2011). Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.4.693.361.549.064,00.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

- Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp.3.109.454.367.676,00 dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp.2.048.810.462.983,00.

- Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan–komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.
- Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2012.

c. Pembiayaan

- Pada sisi pembiayaan daerah yang direncanakan Pemerintah Kota dalam penerimaan sebesar Rp.502.999.263.250,00 dan pengeluaran sebesar Rp.38.095.981.655,00.
- Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.5.158.264.830.659,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.960.920.145.441,00, Belanja Modal sebesar

Rp.1.182.671.510.989,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.4.673.174.229,00. Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.901.683.406.643,00, Belanja Modal sebesar Rp.1.280.228.524.330,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.3.190.280.754,00.

Realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.382.179.570.371,63, Belanja Modal sebesar Rp.912.716.142.120,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.054.510.589,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.200.000.000,00. Sedangkan Realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 sebesar Rp.3.753.710.413.890,80 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.210.441.999.401,00, Belanja Modal sebesar Rp.543.111.645.989,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.156.768.500,00 dan Belanja Transfer tidak terealisasi.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.4.693.361.549.064,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.341.265.681.882,00, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.352.095.867.182,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah pada tahun 2012 ini tidak dianggarkan. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.3.971.688.604.325,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.139.625.575.460,00, Pendapatan transfer sebesar Rp.1.832.063.028.865,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah pada tahun 2011 juga tidak dianggarkan.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.279.613.848.832,61, Pendapatan transfer sebesar Rp.2.354.670.621.821,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.17.468.000,00. Sedangkan Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.886.514.301.580,72, Pendapatan transfer sebesar Rp.1.871.795.125.730,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.725.000.000,00.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 dan 2011.

TAHUN 2012

KODE KEG.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.392.916.194.00	5.387.086.426.00	64.19
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.205.511.683.00	2.390.268.932.00	74.57
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11.996.791.335.00	8.921.216.700.00	74.36
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	415.131.827.371.00	282.380.134.480.00	68.02
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	139.933.219.299.00	114.952.588.721.00	82.15
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	9.490.951.828.00	7.867.495.550.00	82.89
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.914.280.080.00	33.899.832.222.00	70.75
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.471.393.006.00	64.765.187.527.00	76.67
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.243.411.912.00	21.073.787.270.00	83.48
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	207.393.002.478.00	182.393.629.626.00	87.95
1 02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	82.457.850.092.00	55.655.709.328.00	67.50
1 02 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	157.282.592.119.00	148.155.017.793.00	94.20
1 02 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak	40.845.849.106.00	39.622.752.704.00	97.01
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.810.392.179.00	8.492.354.656.00	71.91
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.388.766.603.00	2.693.110.469.00	79.47
1 03 28	Program pengendalian banjir	178.198.857.202.00	158.617.577.065.00	89.01
1 03 31	Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkota	5.684.737.188.00	2.999.723.922.00	52.77
1 03 32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	311.055.785.078.00	252.882.741.734.00	81.30
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.216.590.683.00	2.538.600.981.00	78.92
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.015.604.641.00	4.128.408.552.00	20.63
1 04 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24.926.456.845.00	20.664.173.626.00	82.90
1 04 22	Program Utilitas Perkotaan	109.953.312.277.00	82.177.179.532.00	74.74
1 04 23	Program Perumahan dan Permukiman	104.769.186.466.00	73.374.719.190.00	70.03
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.642.599.981.00	4.451.457.379.00	78.89
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.826.557.251.00	48.673.495.202.00	73.94
1 05 18	Program Penataan Ruang	12.239.934.379.00	8.008.236.015.00	65.43
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.501.788.713.00	1.256.441.125.00	83.66

1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.762.970.00	440.263.410.00	62.83
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.098.562.039.00	13.206.095.533.00	77.24
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.795.710.750.00	6.092.931.616.00	89.66
1 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.381.612.494.00	1.878.603.013.00	78.88
1 07 21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	64.430.729.158.00	57.461.908.658.00	89.18
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.028.274.798.00	4.282.946.385.00	85.18
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.426.326.957.00	1.176.209.167.00	82.46
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.065.517.989.00	13.004.657.700.00	92.46
1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	47.026.701.281.00	27.440.330.138.00	58.35
1 08 25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	116.650.958.253.00	102.430.224.399.00	87.81
1 09 19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	4.874.092.341.00	3.225.132.610.00	66.17
1 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.452.372.342.00	3.215.968.621.00	72.23
1 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	766.326.171.00	641.207.936.00	83.67
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.643.051.795.00	13.350.265.378.00	56.47
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.772.225.485.00	4.044.642.765.00	84.75
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.514.948.450.00	1.330.557.750.00	87.83
1 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.576.022.461.00	2.340.593.919.00	90.86
1 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.800.201.748.00	1.616.577.930.00	89.80
1 12 15	Program Keluarga Berencana	3.151.070.846.00	2.626.992.650.00	83.37
1 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.010.888.293.00	841.368.381.00	83.23
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.404.558.00	507.114.889.00	81.35
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25.139.133.077.00	21.291.693.716.00	84.70
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.756.915.400.00	2.278.750.105.00	82.66
1 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.197.427.00	865.582.980.00	79.18
1 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	782.352.190.00	622.121.566.00	79.52
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	11.403.807.076.00	9.728.351.743.00	85.31

1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.213.057.00	831.056.988.00	84.78
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.967.060.00	338.190.679.00	78.84
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah	18.384.892.633.00	15.125.155.360.00	82.27
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.942.187.888.00	2.350.045.334.00	79.87
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.327.200.776.00	1.139.881.170.00	85.89
1 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.180.770.00	281.876.092.00	86.42
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inves	4.188.488.085.00	3.610.577.777.00	86.20
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.656.001.669.00	4.095.236.424.00	87.96
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	573.710.528.00	504.639.165.00	87.96
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.977.680.309.00	14.698.254.295.00	91.99
1 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.021.100.768.00	1.208.703.744.00	59.80
1 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	968.936.424.00	520.538.500.00	53.72
1 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.767.636.680.00	4.263.069.470.00	89.42
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	52.624.689.692.00	35.136.446.760.00	66.77
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.277.818.919.00	2.000.027.995.00	87.80
1 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.800.530.274.00	1.688.759.807.00	93.79
1 19 16	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan Kriminal	28.753.171.160.00	24.958.656.492.00	86.80
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.086.797.032.00	79.454.239.680.00	81.00
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.851.593.687.00	65.546.360.364.00	78.17
1 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	62.773.375.506.00	36.142.658.440.00	57.58
1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan daerah	60.796.401.609.00	40.658.985.434.00	66.88
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.607.940.335.00	5.167.879.300.00	92.15
1 20 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	401.259.144.00	323.259.713.00	80.56
1 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	8.304.190.671.00	5.417.180.178.00	65.23
1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.434.344.948.00	2.491.114.113.00	72.54
1 20 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	13.616.887.397.00	9.862.259.246.00	72.43

1 20 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	13.616.887.397.00	9.862.259.246.00	72.43
1 20 31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	22.177.371.476.00	18.330.620.726.00	82.65
1 20 32	Program Penataan Daerah Otonom	38.882.852.962.00	34.213.213.540.00	87.99
1 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.825.686.00	337.655.525.00	96.80
1 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.406.212.00	76.696.108.00	83.00
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	6.540.038.809.00	5.174.691.859.00	79.12
1 22 20	Program Penanggulangan Kemiskinan	12.190.571.336.00	9.229.839.322.00	75.71
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.826.984.889.00	1.624.563.891.00	88.92
1 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.142.556.318.00	907.269.286.00	79.41
1 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	440.243.548.00	405.921.507.00	92.20
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.921.298.812.00	6.387.823.102.00	92.29
1 25 19	Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	13.420.403.735.00	12.371.840.375.00	92.19
1 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.300.718.503.00	1.200.570.592.00	92.30
1 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	392.436.649.00	362.558.253.00	92.39
1 26 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.264.607.726.00	9.862.514.719.00	96.08
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.177.191.743.00	3.935.007.693.00	94.20
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	665.660.793.00	637.030.327.00	95.70
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.681.498.217.00	4.148.460.634.00	88.61
2 04 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12.635.841.794.00	11.419.810.496.00	90.38
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.724.638.049.00	1.626.882.879.00	94.33
2 05 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	8.506.794.722.00	8.204.326.044.00	96.44
2 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.246.972.137.00	1.042.935.601.00	83.64
2 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.449.291.778.00	1.374.272.165.00	94.82
2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	997.729.992.00	882.651.532.00	88.47
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	17.554.064.951.00	3.239.931.411.00	18.46
JUMLAH TOTAL		3.109.454.367.676.00	2.430.904.524.412.00	78.18

Tahun 2011

KODE KEG.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.677.609.539.00	3.429.059.091.00	60.40
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.750.144.716.00	2.449.983.636.00	65.33
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.205.655.013.00	6.093.326.734.00	66.19
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	466.945.935.836.00	314.931.064.285.00	67.02
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	171.194.116.308.00	142.042.266.274.00	82.97
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	10.625.500.287.00	8.964.551.598.00	84.37
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.364.849.352.00	35.679.508.470.00	80.42
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.052.232.060.00	69.150.574.785.00	81.37
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.833.616.383.00	17.876.550.198.00	75.28
1 02 06	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	113.096.065.667.00	147.193.326.100.00	83.35
1 02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	58.023.153.596.00	40.665.934.207.00	71.27
1 02 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	122.273.743.116.00	33.140.958.508.00	45.47
1 02 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak	39.298.079.405.00	37.383.227.072.00	95.13
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.378.394.834.00	6.986.731.143.00	56.44
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.730.812.706.00	3.192.149.242.00	67.48
1 03 28	Program pengendalian banjir	241.763.252.366.00	94.370.742.454.00	39.03
1 03 31	Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkota	1.319.699.286.00	521.494.946.00	39.52
1 03 32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	365.344.426.282.00	152.550.801.866.00	41.41
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.262.909.159.00	2.466.345.733.00	75.59
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.512.367.699.00	2.754.687.282.00	14.12
1 04 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	26.652.007.456.00	16.759.833.027.00	62.88
1 04 22	Program Utilitas Perkotaan	92.831.550.075.00	82.161.081.765.00	88.51
1 04 23	Program Perumahan dan Permukiman	111.708.217.510.00	49.354.401.333.00	44.18
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.384.182.160.00	1.556.778.964.00	65.30
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.897.438.465.00	32.712.919.091.00	47.48
1 05 18	Program Penataan Ruang	18.193.689.671.00	12.584.113.329.00	69.17
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.230.760.646.00	1.831.626.074.00	56.69
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	784.774.190.00	477.139.350.00	60.80
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	23.711.512.709.00	15.745.003.997.00	66.40
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.656.642.896.00	5.315.449.171.00	93.97
1 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.062.975.752.00	1.453.627.184.00	70.46
1 07 21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	77.836.750.350.00	59.124.554.948.00	75.96
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.819.437.677.00	4.769.176.764.00	81.95
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	774.583.946.00	712.948.284.00	92.04
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.232.914.272.00	9.435.495.698.00	84.00

1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	66.163.489.250.00	33.259.118.114.00	50.27
1 08 25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	113.332.094.538.00	95.829.923.820.00	84.56
1 09 19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	6.350.895.301.00	2.791.709.360.00	43.96
1 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.652.451.967.00	2.166.616.171.00	59.32
1 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.264.291.304.00	1.379.514.191.00	60.92
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	13.953.378.922.00	7.190.712.672.00	51.53
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.443.412.775.00	3.858.672.263.00	86.84
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.533.052.219.00	1.149.513.950.00	74.98
1 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.456.933.251.00	2.152.244.331.00	87.60
1 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.222.751.480.00	1.097.423.400.00	89.75
1 12 15	Program Keluarga Berencana	3.646.963.152.00	2.850.433.463.00	78.16
1 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905.425.962.00	793.889.418.00	87.68
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	925.439.713.00	835.618.815.00	90.29
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	16.821.695.528.00	15.660.391.283.00	85.47
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.152.264.751.00	1.768.831.480.00	82.18
1 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.006.622.764.00	627.282.395.00	62.32
1 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836.329.766.00	672.802.408.00	80.45
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	16.701.530.893.00	11.939.114.925.00	71.49
1 14 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.562.518.854.00	2.165.730.480.00	84.52
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	819.515.594.00	658.428.795.00	80.34
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.676.648.00	492.185.267.00	93.63
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah	30.853.627.159.00	17.764.050.866.00	57.58
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.943.192.324.00	3.187.728.260.00	80.84
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.256.095.926.00	874.934.216.00	69.66
1 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494.922.112.00	427.954.800.00	86.47
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inves	4.684.084.960.00	3.486.512.150.00	74.43
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.680.347.510.00	3.927.012.083.00	83.90
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421.127.177.00	386.626.579.00	91.81
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.308.656.806.00	2.049.969.150.00	88.79
1 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.942.989.527.00	2.871.545.895.00	48.32
1 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.316.251.513.00	1.741.517.100.00	40.35
1 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.379.569.088.00	3.000.138.970.00	88.77
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	53.394.612.229.00	34.281.742.215.00	64.20
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.895.893.089.00	2.310.580.181.00	79.79
1 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.937.123.759.00	1.737.907.940.00	89.72
1 19 16	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan Kriminal	31.918.041.863.00	25.440.816.938.00	79.71

1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.297.167.278.00	59.763.405.585.00	81.54
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.264.738.384.00	41.779.072.771.00	69.33
1 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	59.992.337.733.00	33.047.947.527.00	55.09
1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan daerah	79.808.837.268.00	46.062.821.189.00	57.72
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6.821.450.141.00	5.706.505.170.00	83.66
1 20 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1.511.979.829.00	1.086.889.230.00	71.89
1 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4.237.538.645.00	3.047.033.425.00	71.91
1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.017.581.692.00	3.075.528.409.00	61.30
1 20 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	14.494.305.589.00	10.690.683.479.00	73.76
1 20 31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	21.303.731.234.00	11.358.002.331.00	53.31
1 20 32	Program Penataan Daerah Otonom	43.268.592.999.00	29.478.291.969.00	68.13
1 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491.354.123.00	403.833.685.00	82.19
1 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.068.055.00	154.808.797.00	84.56
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	7.251.365.011.00	6.255.425.653.00	86.27
1 22 20	Program Penanggulangan Kemiskinan	16.863.556.551.00	10.898.580.350.00	64.63
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2.394.685.731.00	2.007.098.665.00	83.81
1 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.530.234.754.00	967.235.834.00	63.21
1 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	712.941.970.00	605.444.480.00	84.92
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.703.393.254.00	6.606.964.479.00	85.77
1 25 19	Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	26.966.931.585.00	22.895.084.601.00	84.90
1 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.064.861.340.00	1.005.770.276.00	94.45
1 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354.083.764.00	334.557.915.00	94.49
1 26 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.567.928.898.00	9.641.185.855.00	91.23
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.417.397.144.00	1.168.010.783.00	82.41
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	681.093.066.00	611.148.827.00	89.73
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	9.655.828.936.00	4.771.539.417.00	49.42
2 04 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10.643.913.040.00	9.227.646.848.00	86.69
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.001.326.522.00	827.267.123.00	82.62
2 05 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	10.944.322.249.00	4.474.407.480.00	40.88
2 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.698.680.905.00	1.253.546.038.00	73.80
2 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.408.102.539.00	1.169.704.410.00	83.07
2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1.093.627.617.00	899.851.022.00	82.28
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	13.752.647.409.00	6.100.374.747.00	44.36
JUMLAH TOTAL		3.173.532.876.314.00	2.046.042.295.317.00	64.2

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 sebesar Rp.4.693.361.549.064,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.341.265.681.882,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.409.496.932.932,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.607.033.790.222,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.309.819.125.000,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.23.066.440.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.2.679.579.028,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 sebesar Rp.3.971.688.604.325,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.139.625.575.460,07, Dana Perimbangan sebesar Rp.973.067.060.126,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.484.013.627.911,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.356.905.561.800,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.15.397.200.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar sebesar Rp.2.679.579.028,00.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 (tercapai 98,74%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.279.613.848.832,61 (tercapai 97,37%), Dana Perimbangan sebesar Rp.1.433.067.691.897,00 (tercapai 101,67%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.594.448.090.669,00 (tercapai 97,93%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.309.819.125.000,00 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp.16.777.000.000,00 (tercapai 72,73%), dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.558.714.255,00 (tercapai 20,85%), , Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.17.468.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 (tercapai 94,65%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.886.514.301.580,72 (tercapai 88,17%), Dana Perimbangan sebesar Rp.963.419.947.354,00 (tercapai 99,01%), Pendapatan Hibah sebesar Rp.600.000.000,00, Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.509.508.087.368,00 (tercapai 103,98%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.386.951.310.320,00 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.10.364.000.000,00 (tercapai 61,34%), dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.1.551.780.688,00 (tercapai 57,91%), , Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.125.000.000,00

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2012 dan 2011 sebesar Rp.5.158.264.830.659,00 dan Rp.5.195.102.211.727,00. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 dan Rp.3.753.710.413.890,80 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.868.245.698.669,19 dan Rp.1.707.668.118.574,00, belanja langsung/program sebesar Rp.2.430.904.524.411,44 dan Rp.2.046.042.295.316,80.

Realisasi pendapatan pada tahun 2012 sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 maka terjadi surplus sebesar Rp.335.151.715.572,98. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.503.149.922.343,27 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp.32.882.244.978,00 sehingga menghasilkan SILPA tahun 2012 sebesar Rp805.419.392.938,25. Sedangkan Realisasi pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar Rp.3.753.710.413.890,80 maka terjadi surplus sebesar Rp.5.324.013.419,92. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.508.635.998.157,35 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp.10.960.748.326,00 sehingga menghasilkan SILPA tahun 2011 sebesar Rp502.999.263.251,27. Secara rinci realisasi APBD kota Surabaya Tahun 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2012

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	2.279.613.848.832,61	
b. Dana Perimbangan	1.433.067.691.897,00	
c. Hibah	0,00	
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	594.448.090.669,00	
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	309.819.125.000,00	
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi	16.777.000.000,00	
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi	558.714.255,00	
h. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17.468.000,00	
Jumlah Pendapatan		4.634.301.938.653,61
2. Belanja Daerah		
Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	1.601.256.346.557,00	
b. Belanja Bunga	2.223.619.192,00	
c. Belanja Hibah	258.999.514.331,19	
d. Belanja Bantuan Sosial	867.500.000,00	
e. Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	1.200.000.000,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644.208.000,00	
f. Belanja Tidak Terduga	3.054.510.589,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.868.245.698.669,19
Belanja Langsung/Program		
a. Belanja Pegawai	307.548.751.751,58	
b. Belanja Barang dan Jasa	1.210.639.630.539,86	
c. Belanja Modal	912.716.142.120,00	
Jumlah Belanja Langsung/Program		2.430.904.524.411,44
Jumlah Belanja Daerah		4.299.150.223.080,63
Surplus/Defisit		335.151.715.572,98
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	503.149.922.343,27	
b. Pengeluaran	32.882.244.978,00	
Jumlah Pembiayaan		470.267.677.365,27
SILPA Tahun 2012		805.419.392.938,25

Tabel 3.1.2
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2011

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	1.886.514.301.580,72	
b. Dana Perimbangan	963.419.947.354,00	
c. Hibah	600.000.000,00	
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	509.508.087.368,00	
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	386.951.310.320,00	
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi	10.364.000.000,00	
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi	1.551.780.688,00	
h. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	125.000.000,00	
Jumlah Pendapatan		3.759.034.427.310,72
2. Belanja Daerah		
Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	1.377.173.082.114,00	
b. Belanja Bunga	2.903.307.374,00	
c. Belanja Hibah	325.744.017.586,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	1.046.730.000,00	
e. Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644.213.000,00	
f. Belanja Tidak Terduga	156.768.500,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.707.668.118.574,00
Belanja Langsung/Program		
a. Belanja Pegawai	337.939.443.824,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	1.164.991.205.503,80	
c. Belanja Modal	543.111.645.989,00	
Jumlah Belanja Langsung/Program		2.046.042.295.316,80
Jumlah Belanja Daerah		3.753.710.413.890,80
Surplus/Defisit		5.324.013.419,92
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	508.635.998.157,35	
b. Pengeluaran	10.960.748.326,00	
Jumlah Pembiayaan		497.675.249.831,35
SILPA Tahun 2011		502.999.263.251,27

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2012, diolah

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Penjelasan terkait capaian target pendapatan

Penjelasan terkait capaian target pendapatan pada beberapa SKPD yang kurang maksimal selama tahun 2012 secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Kendala yang dihadapi RSUD Bhakti Dharma Husada :**
 - Kekurangan tenaga dokter spesialis (dokter spesialis bedah kekurangan 2 orang, obstetri dan gynecologi kekurangan 1 orang, dan dokter spesialis anestesi kekurangan 2 orang).
 - Kamar operasi yang dapat dioperasikan hanya 1 unit, yang lain belum memenuhi standard.
 - Terdapat piutang jamkesmas untuk periode pelayanan bulan September s.d Desember yang belum terealisasi berkisar Rp.900 juta.

- **Kendala yang dihadapi Dinas Kebakaran :**
 - Penghentian sementara pungutan retribusi pemeriksaan alat kebakaran sesuai SK Walikota Nomor 188.45/336/436.1.2/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Surat Ketetapan Retribusi Daerah
 - Perda baru tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan baru ditetapkan tanggal 30 April 2012, sehingga bulan Januari s.d April tidak dapat memungut retribusi alat pemadam kebakaran.
 - Terdapat item retribusi yang ditiadakan sesuai Perda yang baru sehingga mengurangi potensi retribusi (semula 7 item menjadi 2 item)

- **Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan :**
 - Selama 3 bulan (Januari-Maret) retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir tidak dapat dipungut karena keterlambatan pengesahan Perda.
 - a. Perda 8/2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2012.
 - b. Perda No 9/2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan pada 29 Maret 2012.
 - Terdapat kendaraan wajib uji yang mutasi keluar dari Surabaya.
 - Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang memuat bahwa untuk kendaraan baru, uji kendaraan bermotor pertama dilaksanakan setelah 1 tahun sehingga mengurangi potensi retribusi.

- **Kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan :**
 - Bulan Januari-Juli 2012, PDAM belum dapat melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sesuai Perda 10/2012. Pemungutan retribusi dimulai pada bulan Agustus 2012.

- Retribusi pelayanan kebersihan Non Pelanggan PDAM baru dipungut mulai tanggal 1 Mei 2012.
 - Evaluasi Perda oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, bahwa Perda yang mengatur retribusi penyedotan kakus harus dipisahkan dengan Perda Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sehingga retribusinya belum dapat dipungut sampai dengan ditetapkannya Perda tersendiri.
- **Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :**
- Perda baru (Perda Nomor 13/2012) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan tanggal 10 Mei 2012 sehingga bulan Januari s.d April tidak dapat dipungut.
 - Pada UPTD THR, banyak stand yang tutup, gedung hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
 - Pada UPTD Tugu Pahlawan, terdapat perubahan Perda yang memuat tentang penghapusan retribusi masuk untuk anak sekolah/mahasiswa yang berkunjung ke museum Tugu Pahlawan, sehingga mengurangi potensi PAD.
 - Gedung eks Mitra dalam tahap pembangunan sehingga halaman tidak bisa difungsikan.
 - Lahan parkir pada gedung GNI tidak memadai
 - Tidak ada peminat sewa gamelan

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Optimalisasi pemungutan retribusi sesuai Perda baru agar PAD dapat tercapai dengan maksimal
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal
- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalan sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang. Karena terdapat peraturan yang menghapus pemungutan retribusi atau salah satu komponen retribusi, sehingga mengurangi potensi retribusi yang selama ini menyokong perolehan PAD.

- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.

b. Penjelasan terkait capaian target belanja

Penjelasan terkait capaian target belanja pada beberapa SKPD yang kurang maksimal selama tahun 2012 secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Pendidikan :

- Kegiatan DAK alokasi yang terserap hanya untuk alokasi 2010 sedangkan alokasi tahun 2011 dan 2012 tidak dapat diserap
- ISO 14000 mengalami gagal lelang sedangkan ISO 9001 sebanyak 11 lembaga telah terserap
- Anggaran makan minum SMK terdapat sisa karena permintaan sekolah tidak sebanyak yang dialokasikan.
- Alokasi transport PAUD terdapat sisa relatif besar karena banyak pendidik yang merangkap lebih dari 1 lembaga sehingga hanya berhak dari 1 lembaga saja, pendidik PAUD yang menerima TPP & yang menerima status PNS Dinas Pendidikan banyak yang tidak diusulkan.
- Kegiatan yang dibiayai bantuan keuangan propinsi hanya kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk siswa madrasah Diniyah dan guru madrasah Diniyah/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB. Sedangkan kegiatan lainnya yang dibiayai dari bantuan keuangan propinsi tidak dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut :
 - ❖ Belum ada juknis pelaksanaannya
 - ❖ Terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya dengan dana dari APBD Kota Surabaya.
 - ❖ Petunjuk Teknis tidak sesuai dengan kondisi riil Kota Surabaya, antara lain klasifikasi bangunan SMK yang dikembangkan sesuai juknis yaitu bertipe B, sedangkan seluruh klasifikasi bangunan SMK di Surabaya telah bertipe A.
 - ❖ Perubahan lokasi Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi semula direncanakan di Surabaya dialihkan ke Kabupaten Ponorogo.
 - ❖ Alokasi perubahan dana tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh SDN Menanggal 601 Kota Surabaya.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Kesehatan :**
 - Terdapat sisa lelang pengadaan sebagai berikut :
 - ❖ Pengadaan insektisida terdapat sisa lelang sebesar Rp.150.304.000,00.
 - ❖ Pengadaan temephos terdapat sisa lelang sebesar Rp.237.600.000,00
 - ❖ Pengadaan PMT Paliatif terdapat sisa lelang sebesar Rp.151.181.800,00
 - ❖ Pengadaan obat terdapat sisa lelang sebesar Rp350.249.130,00
 - ❖ Pengadaan perbekalan kesehatan terdapat sisa lelang sebanyak Rp.302.273.400,00
 - ❖ Pengadaan perbekalan kesehatan paket 2 terdapat sisa lelang sebanyak Rp.645.117.000,00
 - ❖ Pengadaan perbekalan kesehatan paket 1 terdapat sisa lelang sebanyak Rp.1.837.041.534,00
 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas tambahan anggaran saat PAK tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu.
 - Pada kegiatan yang dibiayai dari DAK, sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sisa alokasi anggaran merupakan hal-hal sebagai berikut :
 - ❖ Sisa lelang rehab puskesmas Dukuh Pakis sebesar Rp650.821.342,00
 - ❖ Sisa lelang pengadaan obat pada kegiatan yang dibiayai DAK sebesar Rp396.632.158,00
 - ❖ Terdapat pengadaan obat yang tidak terserap karena retender akibat dari perubahan volume (pengadaan obat 6)
 - ❖ Pengadaan reagen HIV 2 dan 3 tidak diserap karena terjadi double anggaran, mendapat dropping dari Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok yang dibiayai dari bagi hasil cukai tembakau terdapat sisa lelang sebesar Rp.698.402.781,00
- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja RSUD Bhakti Dharma Husada antara lain :**
 - Terdapat sisa pengadaan langsung, lelang dan swakelola sebesar Rp.462.688.210,00
 - Pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang dianggarkan saat PAK, tidak dapat diserap karena keterbatasan waktu.
 - Belanja pemberian snack pegawai tidak dapat diserap karena sarana dan prasarana kurang memadai serta kurangnya tenaga khusus yang

mengelola snack kurang (tenaga gizi yang saat ini ada berorientasi pada pasien)

- Pengadaan alat kesehatan rumah sakit masih dalam proses (23 paket meliputi pengadaan alat orthopedi, alat sterilisasi, peralatan ICU, peralatan perawatan)
- Adanya pembatalan pelatihan hemodialisa untuk dokter, karena ruang hemodialisis belum tersedia
- Beberapa kegiatan diklat (Diklat TNA dari Bapelkes Murnajati dan Diklat yang diadakan oleh RSUD dr.Soetomo) belum ada kepastian dari pihak penyelenggara diklat
- Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp3.644.981.989,20 pada kegiatan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akhibat dampak asap rokok yang dibiayai dari bagi hasil cukai hasil tembakau tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk pekerjaan yang harus dilelang.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja RSUD dr. M.Soewandhie antara lain :**

- Pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran tidak dilaksanakan antara lain :
 - Pengadaan AC for ventilator AVEA yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp154.000.000,00 karena terdapat kesalahan kode rekening
 - Pemasangan Instalasi Gas Medis yang dialokasikan sebesar Rp163.410.500,00 karena ruangan belum siap digunakan
- Pengadaan obat untuk hemodialisa yang dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 tidak diserap karena terdapat double anggaran dengan kegiatan 0007.
- Pada kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit :
 - Bantuan pendidikan S2 yang dialokasikan sebesar Rp45.000.000,00 tidak dapat diserap karena surat tugas belanja belum terbit.
 - Pelatihan Keperawatan ICU Dasar yang dialokasikan sebesar Rp24.200.000,00 tidak dilaksanakan karena dana tidak mencukupi akibat kenaikan tarif pelatihan, dan Pelatihan Keperawatan NICU yang dialokasikan sebesar Rp.48.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pelatihan di RS Jantung Harapan Kita.
- Pengadaan VGA yang dialokasikan sebesar Rp.32.582.000,00 tidak dapat dilaksanakan karena spesifikasi terlalu rendah.

- Pengadaan tempat jarum yang dialokasikan sebanyak Rp.43.560.000,00 tidak dilaksanakan karena stok tahun 2011 masih ada.
 - Pengadaan pilon ukuran 6mx1,65,x0,4m yang dialokasikan sebesar Rp.29.700.000,00 tidak diserap karena double anggaran dengan kegiatan 0002.
- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan antara lain :**
- Pada kegiatan kelengkapan jalan, terdapat pekerjaan yang tidak selesai yaitu pekerjaan pedestrian Jl.Tembaan, Jl.Mayjend Sungkono.
 - Kegiatan pemeliharaan rutin jalan, jembatan terdapat 2 pekerjaan yang mengalami redesign yaitu Jembatan Tambak Wedi dan Platuk Donomulyo.
 - Pembebasan lahan terdapat kendala pada balik nama, warisan dan warga yang belum bersedia dengan harga yang ditawarkan.
 - Frontage A.Yani (BRI-Siwalankerto) gagal lelang 3 kali.
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pematuan terdapat beberapa paket lelang diputuskan untuk break kontrak dan hanya dibayar sesuai fisik terpasang. Dan juga terdapat paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan dengan warga.
 - Pembangunan sarana prasarana pematuan terdapat beberapa pekerjaan yang diputuskan kontraknya dan hanya dibayar sesuai progres fisik saja.
- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah antara lain :**
- Pengadaan tanah lokasi Simomulyo sudah terbeli tanggal 20 Nopember 2012, sedangkan pengadaan lainnya mengalami kendala antara lain :
 - ✓ Lokasi di Dukuh Setro masih proses balik nama waris dan pemecahan sertifikat
 - ✓ Kalianak, pemilik tanah belum memberi respon atau surat nego
 - ✓ Pemilik tanah di Kedurus, Gundih, Bongkaran yang direncanakan untuk bangunan Puskesmas, pemiliknya membatalkan rencana jual beli.
 - ✓ Pengadaan tanah di Deles dan Wonokromo, Lurah dan Camatya belum menyerahkan bukti kepemilikan sehingga Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kesulitan melakukan appraisal

- ✓ Di Sawah Pulo masih dalam proses appraisal
 - Sebagian pengelola arsip mengundurkan diri karena diterima kerja di tempat lain

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain :**
 - Pembangunan pos pemadam kebakaran batal dikerjakan (Kalijudan) karena ada penolakan dari warga, 3 paket pekerjaan yang lain dilaksanakan.
 - Rumah sederhana veteran di Pakal sudah tinggal menunggu proses serah terima.
 - Renovasi Gedung Balai Pemuda diberhentikan karena menunggu surat dari kepolisian berkaitan dengan terbakarnya gedung tersebut
 - Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk kegiatan yang dibiayai DAK belum dapat dilaksanakan
 - Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, banyak paket bermasalah atau mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan teknisnya yang disebabkan karena akses masuk material bahan dan masalah non teknis (Penolakan warga).

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan antara lain :**
 - Kegiatan sosialisasi pemanfaatan BGG belum dapat dilaksanakan karena menunggu aturan dari Pusat
 - Pekerjaan kajian pendataan angkutan umum dan kajian sosial operator angkutan umum tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapatkan penyedia.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Kebersihan dan Pertamanan antara lain :**
 - Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran maupun sisa lelang. Yang merupakan sisa lelang pada kegiatan/pekerjaan :
 - ✓ Pengembangan lahan makam, rehabilitasi makam desa.
 - ✓ Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di TPA Benowo
 - Pada kegiatan pembebasan lahan di sekitar TPA Benowo, sampai dengan akhir tahun belum ada lahan yang dibebaskan.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana antara lain :**
 - Pada kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, belanja kebutuhan alat dan bahan untuk pelatihan ketrampilan karena peserta pelatihan 6300 orang dari target sebesar 7000 orang
 - Honor pembicara khusus tidak terserap dalam kegiatan.
 - Pengadaan IUD Kit, BKB Kit, dan Implant Kit yang dibiayai DAK terdapat sisa mati lelang
 - Honor pembiacara khusus/Praktisi di beberapa kegiatan tidak terserap.
 - Pelayanan KB MOP tidak mencapai target yang dianggarkan sehingga terdapat sisa anggaran.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja antara lain :**
 - Jumlah calon wirausaha baru hasil seleksi untuk mendapatkan bantuan sarana prasaran usaha sebanyak 142 kelompok dari target 160 kelompok.
 - Jangka waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak Kota Surabaya di 3 lokasi dilaksanakan selama 9 bulan, sedangkan dialokasikan selama 12 bulan.
 - Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan pelatihan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha sebanyak 1720 orang dari target sebanyak 1880 orang.
 - Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3 sebanyak 320 perusahaan dari target 360 perusahaan
 - Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaan yang diawasi sebanyak 163 lembaga dari 180 lembaga.

- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain :**
 - Sentra PKL yang tidak dapat dilaksanakan adalah :
 - a) Sentra PKL Keputih karena menunggu hasil kajian pemanfaatan eks TPA yang dibuat Bappeko
 - b) Bulak Banteng, karena di lokasi yang direncanakan akan dibangun PKL telah dibangun pasar tradisional oleh warga (proses pembangunan pasar telah dihentikan karena tidak memiliki ijin dari Pemkot)

- c) Wonokusumo karena luasan lahan BTKD diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menampung jumlah eksisting PKL, sehingga dukuatkan akan menciptakan permasalahan baru terkait penetapan PKL yang direlokasi
 - d) Babat Jerawat karena sentra PKL Babat Jerawat I belum beroperasi secara optimal
 - e) Sentra PKL Kebraon karena sengketa kepemilikan aset BTKD
 - f) Sentra RMI-Kebun Bibit tidak dapat dilaksanakan tahun 2012 karena proses penyempurnaan DED yang membutuhkan waktu sampai dengan Triwulan III sehingga pengerjaan fisik diperkirakan tidak akan selesai pada tahun 2012.
- Pembangunan jalan paving sebesar Rp.478.098.114,00 serta belanja modal meja, kursi, dan rombongan, genset portable, tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan sentra PKL yang tidak dapat dilaksanakan.
 - Honor narasumber setingkat eselon II yang ada di beberapa kegiatan tidak terserap
 - Biaya sewa stand lebih rendah dari pada alokasi anggaran, pada kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif
 - Kegiatan bintek hanya dapat dilaksanakan 16 kali sesuai jumlah sentra yang telah beroperasi dari 25 lokasi yang direncanakan.
- **Hal – hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Dinas Pertanian antara lain :**
- Pekerjaan mengenai Amdal KBS tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada rekanan yang minat selama pelaksanaan lelang.
 - Pada kegiatan pengelolaan kawasan lindung pesisir Surabaya, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :
 - Rehab bangunan pos menara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.877.764,00
 - Renovasi mushola dan kamar mandi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.030.277,00
 - Biaya perencanaan pembangunan tambat labuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.096.000,00 karena sudah didanai dari kegiatan konservasi flora dan fauna
 - Tenaga Ahli Madya Kajian teknis pembangunan tanggul yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00

- Pengadaan Solar Cell Sunrise 130 wp yang dianggarkan sebesar Rp.42.570.000,00 Karena komponennya kurang lengkap.

Berdasarkan data realisasi belanja dan permasalahan beserta upaya yang telah dilaksanakan SKPD, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- SKPD Masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar tidak terjadi double anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun bahkan terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya peraturan atau upaya yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan penyerapan keuangan yang terlambat dibanding dengan kemajuan fisik pekerjaan dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh SKPD maupun pihak ketiga pemenang lelang.
- Pada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai dari dana diluar APBD (misal : DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, dan lainnya) hendaknya lebih diperhatikan, mengingat pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada penerimaan dana yang dicairkan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan anggaran tersebut dan batas waktu pencairan dana lebih singkat dibanding dengan kegiatan yang didanai dari APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Di Pemerintah Kota Surabaya entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

❖ Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

❖ Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

❖ Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

❖ **Transaksi dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

❖ **Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang.

Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

❖ **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

❖ **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Dana Bagi Hasil
- d. Piutang Dana Alokasi Umum
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

❖ **Piutang Lain-Lain**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d. Piutang Dividen
- e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

❖ **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a. persediaan alat tulis kantor
- b. persediaan alat listrik
- c. persediaan material/bahan
- d. persediaan benda pos
- e. persediaan bahan bakar
- f. persediaan bahan makanan pokok

❖ **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah , misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

- Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

❖ Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

1. biaya impor
2. biaya persiapan tempat
3. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
4. biaya pemasangan (installation cost)
5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
6. biaya konstruksi
7. biaya kepanitiaan

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan sampai dengan 31 Desember 2012 belum dilaksanakan dan bertahap akan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selesai dilaksanakan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

❖ **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga

❖ **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. lisensi dan franchise
- c. hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya
- d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

5. Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

❖ **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari :

❖ **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : Utang Taspen, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

❖ **Utang Bunga**

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

❖ **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.

Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

❖ **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

❖ **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

❖ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Terdiri dari : diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap, diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas : diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

❖ **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang

yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun akuitas dana yang terkait.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
- b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
- c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ **Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

(I) PENJELASAN LAPORAN NERACA

Neraca merupakan Lampiran II dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dan disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2012 Pemerintah Kota Surabaya secara umum sebagai berikut :

Posisi Keuangan terkait dengan

Aset sebesar	Rp.	35.358.824.156.594,80
Kewajiban sebesar	Rp.	71.947.416.278,83
Ekuitas Dana sebesar	Rp.	35.286.876.740.315,97

Jumlah **Aset** sebesar Rp.35.358.824.156.594,80; terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.1.145.622.991.452,60; Investasi Jangka panjang sebesar Rp.1.697.206.373.389,32; Aset Tetap sebesar Rp.32.276.066.905.289,07 serta Aset lainnya sebesar Rp.239.927.886.463,81.

Jumlah **Kewajiban** sebesar Rp.71.947.416.278,83; terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.71.947.416.278,83; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,00.

Total **Ekuitas Dana** sebesar Rp.35.286.876.740.315,97; terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.1.073.675.575.173,77; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.34.213.201.165.142,20.

I. ASET	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 35.358.824.156.594,80	Rp 33.441.086.637.722,43

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset sebesar Rp.35.358.824.156.594,80 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
- Aset lancar	1.145.622.991.452,60	875.102.668.530,13
- Investasi jangka panjang	1.697.206.373.389,32	906.946.038.066,74
- Aset tetap	32.276.066.905.289,07	31.484.362.969.879,60
- Aset lainnya	239.927.886.463,81	174.674.961.245,96
Jumlah	35.358.824.156.594,80	33.441.086.637.722,43

A. ASET LANCAR	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 1.145.622.991.452,60	Rp 875.102.668.530,13

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Persediaan.

1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 802.394.710.664,45	Rp 506.259.735.245,66

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Bank Jatim No. Rek 0011007000	Rp	702.394.710.664,45	Rp	206.259.735.245,66
▪ Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB171778)	Rp	100.000.000.000,00	Rp	300.000.000.000,00
Jumlah	Rp	802.394.710.664,45	Rp	506.259.735.245,66

2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 699.959.598,00	Rp 300.738.179,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp.699.959.598,00 terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	551.631.037,00
2.	Kecamatan Tegalsari	148.328.561,00
Jumlah		699.959.598,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 699.959.598,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2013.

3. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 245.871.790,00	Rp 125.737.773,28

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.245.871.790,00 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada tahun 2013

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp.245.871.790,00 terdapat pada SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	76.656.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	96.000.500,00
3	Dinas Perhubungan	24.286.900,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	48.928.390,00
	JUMLAH	245.871.790,00

4. Kas di BLUD RSUD dr.M.Soewandhie	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 32.847.216.891,80	Rp 21.743.429.586,61

Saldo kas di BLUD RSUD dr. SOEWANDHIE per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 32.847.216.891,80 terdiri dari :

- Bank Jatim No. Rek .0011.233.074 Rp 12.833.786.892,66
- Deposito Bank Jatim (berjangka 1 bulan)

- DB 221302	Rp	5.000.000.000,00
- DB 221303	Rp	5.000.000.000,00
- DB 221305	Rp	5.000.000.000,00
- DB 221306	Rp	5.000.000.000,00
▪ Kas tunai	Rp	13.429.999,14
Jumlah	Rp	32.847.216.891,80

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
5. Piutang Pajak	Rp 574.367.758.421,00	Rp 609.739.454.344,00

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.574.367.758.421,00 dan Rp.609.853.445.277,00 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Piutang Pajak Hotel	Rp	7.117.297.877,00	Rp	8.744.788.768,00
▪ Piutang Pajak Restoran	Rp	12.402.086.401,00	Rp	12.700.308.028,00
▪ Piutang Pajak Hiburan	Rp	1.393.255.295,00	Rp	1.465.260.779,00
▪ Piutang Pajak Reklame	Rp	16.807.539.120,00	Rp	8.373.080.325,00
▪ Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp	93.130.558,00	Rp	94.817.921,00
▪ Pajak Parkir	Rp	543.761.278,00	Rp	625.218.278,00
▪ BPHTB	Rp	2.495.619.941,00	Rp	2.383.931.434,00
▪ Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	533.459.374.951,00	Rp	575.352.048.811,00
▪ Pajak Air Tanah	Rp	55.693.000,00	Rp	0,00
Jumlah (lampiran 1)	Rp	574.367.758.421,00	Rp	609.739.454.344,00

Mutasi Piutang Pajak tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	609.739.454.344,00
Penambahan Tahun 2012	Rp	55.192.445.084,00
Pengurangan Tahun 2012	Rp	90.564.141.007,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	574.367.758.421,00

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2012	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2012
1	Pajak Hotel	8.744.788.768,00	41.252.830,00	1.668.743.721,00	7.117.297.877,00
2	Pajak Restoran	12.700.308.028,00	39.482.123,00	337.703.750,00	12.402.086.401,00
3	Pajak Hiburan	1.465.260.779,00	41.919.349,00	113.924.833,00	1.393.255.295,00
4	Pajak Reklame	8.373.080.325,00	9.663.284.575,00	1.228.825.780,00	16.807.539.120,00
5	PPJ Non PLN	94.817.921,00	29.865,00	1.717.228,00	93.130.558,00
6	Pajak	625.218.278,00	5.410.000,00	86.867.000,00	543.761.278,00

	Parkir				
7	BPHTB	2.383.931.434,00	542.396.957,00	430.708.450,00	2.495.619.941,00
8	PBB	575.352.048.811,00	44.802.976.385,00	86.695.650.245,00	533.459.374.951,00
9	Air Tanah	0,00	55.693.000,00	0,00	55.693.000,00
Jumlah		609.739.454.344,00	55.192.445.084,00	90.564.141.007,00	574.367.758.421,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp.433.459.374.951,00 tersebut berasal dari pelimpahan Piutang PBB dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui 12 KPP Pratama kepada Pemkot Surabaya tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.619.519.003.081,00. Pelimpahan tersebut dalam rangka pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari DJP sebagai pajak daerah yang akan dikelola Pemkot Surabaya.

Proses pengalihan PBB tersebut telah didukung dengan penyerahan satu keping cakram digital (CD) yang berisi basis data SISMIOP piutang PBB per 31 Desember 2010 dan CD berformat Microsoft excel (ME). Terhadap CD SISMIOP dan CD ME tersebut, masih terdapat selisih jumlah sebagai berikut:

No	Data Direktorat Jenderal Pajak pada saat pelimpahan PBB kepada Pemkot Surabaya	BAST	CD SISMIOP	CD ME
1	Surabaya Genteng	14.232.153.134,00	13.566.925.178,00	14.232.153.134,00
2	Surabaya Gubeng	73.079.350.000,00	73.104.689.130,00	72.468.420.485,00
3	Surabaya Krembangan	15.416.160.000,00	12.831.574.305,00	15.416.159.616,00
4	Surabaya Pabean Cantikan	11.389.989.441,00	11.393.474.724,00	11.396.157.578,00
5	Surabaya Rungkut	67.851.398.000,00	50.488.035.893,00	67.851.150.371,00
6	Surabaya Sawahan	42.979.818.000,00	42.994.663.120,00	42.979.818.419,00
7	Surabaya Simokerto	17.400.283.000,00	20.643.638.998,00	17.400.283.000,00
8	Surabaya Mulyorejo	74.832.464.908,00	93.316.275.756,00	74.832.464.908,00
9	Surabaya Sukomanunggal	146.121.706.871,00	140.295.562.579,00	146.121.706.871,00
10	Surabaya Tegalsari	15.511.255.775,00	15.476.966.431,00	15.511.255.775,00
11	Surabaya Wonocolo	59.334.972.590,00	59.038.352.560,00	59.334.972.590,00
12	Surabaya Karangpilang	81.369.451.362,00	81.380.366.774,00	81.369.451.362,00
Total		619.519.003.081,00	614.530.525.448,00	618.913.994.109,00
Selisih antara BAST dengan		CD SISMIOP	4.988.477.633,00	
		CD ME		605.008.972,00

Perkembangan saldo Piutang PBB tersebut dari saat pelimpahan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No	KKP Pratama	Berita Acara Serah Terima	Nilai (Rp)
1	Surabaya Genteng	BA-03/WPJ.11/KP.09/2011	14.232.153.134,00
2	Surabaya Gubeng	BA-04/WPJ.11/KP.04/2011	73.079.350.000,00
3	Surabaya Krembangan	BA-042/WPJ.11/KP.0201/2011	15.416.160.000,00
4	Surabaya Pabean Cantikan	BA-05/WPJ.11/KP.03/2011	11.389.989.441,00
5	Surabaya Rungkut	BA-02/WPJ.11/KP08/2011	67.851.398.000,00

6	Surabaya Sawahan	BA-03/WPJ.11/KP.06/2011	42.979.818.000,00
7	Surabaya Simokerto	BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011	17.400.283.000,00
8	Surabaya Mulyorejo	BA-10/WPJ.11/KP.12/2011	74.832.464.908,00
9	Surabaya Sukomanunggal	BA-12/WPJ.11/KP.01/2011	146.121.706.871,00
10	Surabaya Tegalsari	BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011	15.511.255.775,00
11	Surabaya Wonocolo	BA-03/WPJ.11/KP.07/2011	59.334.972.590,00
12	Surabaya Karangpilang	BA-03 A/WPJ.11/KP.13/2011	81.369.451.362,00
Total			619.519.003.081,00
Koreksi Tambah Tahun 2011			785.227.405,00
Koreksi Kurang Tahun 2011			(18.226.432.683,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2011			441.089.588.831,00
Pelunasan PBB TA 2011			(467.815.337.823,00)
Saldo Piutang PBB 31 Des 2011			575.352.048.811,00
Koreksi Tambah Tahun 2012			8.097.548.164,00
Koreksi Kurang Tahun 2012			(993.772.745,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2012			494.666.680.974,00
Pelunasan PBB TA 2012			(543.663.130.253,00)
Saldo Piutang PBB TA 2012 (per 31 Desember)			533.459.374.951,00

Piutang PBB per 31 Desember 2012 senilai Rp533.459.374.951,00 tersebut masih belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan memperhitungkan denda keterlambatan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori Piutang	Piutang (Rp)
1.	Data Konfirmasi (laporan Wajib Pajak dan Koordinasi DJP Kanwil Jatim I/Pembayaran Elektronik)	6.533.988.362
2.	Telah dilakukan penagihan dan angsuran	43.521.613.132
3.	Wajib Pajak melaporkan Ketetapan Ganda	6.108.394.582
4.	Belum ditemukan obyek dan wajib pajak	97.059.214.645
5.	Belum teridentifikasi	380.236.164.230
JUMLAH		533.459.374.951

Pemerintah Kota Surabaya akan berupaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut melalui beberapa upaya yang berkelanjutan yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur I dan KPP Pratama serta Bank tempat dilakukan PBB;
- ❖ Menyusun Peraturan Walikota tentang perbaikan data dan pendataan kembali tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
- ❖ Merencanakan kegiatan/pekerjaan atas pemutakhiran dan pendataan PBB;
- ❖ Menyusun Peraturan Walikota yang berkaitan dengan tindak lanjut piutang PBB antara lain: (1) Penagihan Pajak Daerah; (2) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak daerah; (3) Penghapusan Piutang Daerah yang sudah kadaluarsa.

6. Piutang Retribusi

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Rp 35.452.090.268,36

Rp 11.670.364.704,51

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.35.452.090.268,36 dan Rp.11.670.364.704,51 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		2012		2011
▪ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	88.653.875,00	Rp	88.653.875,00
▪ Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp	758.346.735,00	Rp	748.866.105,00
▪ Retribusi Kebersihan pada PDAM	Rp	966.776.120,00	Rp	1.928.383.002,60
▪ Retribusi Kakus	Rp	0,00	Rp	15.948.337,50
▪ Retribusi Pemakaman	Rp	0,00	Rp	4.100.000,00
▪ Retribusi THR	Rp	237.780.843,00	Rp	216.121.689,00
▪ Retribusi Balai Pemuda	Rp	181.776.000,00	Rp	181.776.000,00
▪ Retribusi Ampel	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Retribusi THP Kenjeran	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp	1.400.337.526,08	Rp	1.404.849.238,00
▪ Retribusi IMB - Ciptakarya	Rp	29.750.859.565,00	Rp	4.112.250.240,00
▪ Retribusi SKRK- Ciptakarya	Rp	400.115.623,00	Rp	2.267.107.296,00
▪ Retribusi sewa stand Terminal	Rp	221.440.500,00	Rp	135.360.400,00
▪ Retribusi Pelayanan- BDH	Rp	980.742.444,00	Rp	285.459.946,41
▪ Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp	73.139.790,00	Rp	281.488.575,00
▪ Retribusi Gelanggang Remaja	Rp	2.000.000,00	Rp	0,00
▪ Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Rp	390.121.247,28	Rp	0,00
Jumlah	Rp	35.452.090.268,36	Rp	11.670.364.704,51

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2012	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2012
1.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.653.875,00	0,00	0,00	88.653.875,00
2.	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	748.866.105,00	49.722.530,00	40.241.900,00	758.346.735,00
3.	Retribusi Kebersihan pada PDAM	1.928.383.002,60	966.776.120,00	1.928.383.002,60	966.776.120,00

4.	Retribusi Kakus	15.948.337,50	0,00	15.948.337,50	0,00
5.	Retribusi Pemakaman	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
4.	Retribusi THR	216.121.689,00	66.985.269,00	45.326.115,00	237.780.843,00
6.	Retribusi Balai Pemuda	181.776.000,00	0,00	0,00	181.776.000,00
7.	Retribusi Ampel	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Retribusi THP Kenjeran	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	1.404.849.238,00	0,08	4.511.712,00	1.400.337.526,08
10.	Retribusi IMB - Ciptakarya	4.112.250.240,00	28.795.388.660,00	3.156.779.335,00	29.750.859.565,00
11.	Retribusi SKRK-Ciptakarya	2.267.107.296,00	18.855.000,00	1.885.846.673,00	400.115.623,00
12.	Retribusi sewa stand Terminal	135.360.400,00	277.044.266,00	190.964.166,00	221.440.500,00
13.	Retribusi Pelayanan Kesehatan -BDH	285.459.946,41	953.501.494,00	258.218.996,41	980.742.444,00
14.	Retribusi Ijin Gangguan (HO) BLH	281.488.575,00	7.416.848.656,20	7.625.197.441,20	73.139.790,00
15.	Retribusi Gelanggang Remaja (Dispora)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16.	Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	0,00	390.121.247,28	0,00	390.121.247,28
	Jumlah	11.670.364.704,51	38.937.243.242,56	15.155.517.678,71	35.452.090.268,36

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
7. Piutang lain-lain	Rp 75.268.588.006,83	Rp 70.470.342.258,56

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.75.268.588.006,83 dan Rp.70.470.342.258,56, dengan rincian saldo sebagai berikut :

URAIAN		2012		2011
▪ Piutang RSUD dr Soewandhie				
▪ Piutang jamkesmas kuota RSUD dr. Soewandhie	Rp	4.274.045.526,81	Rp	1.478.772.578,06
▪ Piutang jamkesmas non kuota RSUD dr Soewandhie	Rp	284.015.391,52	Rp	0,00
▪ Piutang askes sosial RSUD dr. Soewandhie	Rp	104.387.500,00	Rp	102.325.500,00
▪ Piutang obat askes RSUD dr. Soewandhie	Rp	131.697.894,00	Rp	130.583.493,00
▪ Piutang obat In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp	4.449.531,00	Rp	909.205,00

▪ Piutang In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp	11.354.250,00	Rp	6.206.875,00
▪ Piutang PT. KAI RSUD dr. Soewandhie	Rp	85.610.925,00	Rp	62.899.725,00
▪ Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp	185.274.343,50	Rp	185.274.343,50
▪ Piutang Lain-lain eks PFK	Rp	0,00	Rp	7.865.192,00
▪ Piutang bantuan Parpol Bakesbang Linmas	Rp	155.000.000,00	Rp	162.500.000,00
▪ Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp	2.696.404.190,00	Rp	2.696.404.190,00
▪ Piutang sewa gedung Siola				
▪ Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	Rp	1.810.598.400,00	Rp	1.740.960.000,00
▪ Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	Rp	254.176.000,00	Rp	244.400.000,00
▪ Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Siola serta denda	Rp	0,00	Rp	388.964.356,00
▪ Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Tunjungan City Hopefull	Rp	1.339.957.601,00	Rp	1.212.631.314,00
▪ Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran kel Karah oleh Yayasan Unmer	Rp	0,00	Rp	120.000.000,00
▪ Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	Rp	0,00	Rp	111.023.082,00

▪ Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa				
▪ Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	Rp	384.498.301,00	Rp	384.498.301,00
▪ Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	Rp	871.922.880,00	Rp	871.922.880,00
▪ Piutang dana bagi hasil dari Provinsi				
▪ Piutang DBH Provinsi – Pajak	Rp	57.987.186.370,00	Rp	54.681.102.386,00
▪ Piutang DBH Provinsi – Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	22.362.472,00	Rp	9.617.990,00
▪ Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora	Rp	95.550.000,00	Rp	57.000.000,00
▪ Piutang sewa Gelora Bung Tomo – Dispora	Rp	110.000.000,00	Rp	0,00
▪ Piutang dividen PD Pasar Surya	Rp	0,00	Rp	800.000.000,00
▪ Piutang dividen BPR SAU Tahun 2010	Rp	0,00	Rp	828.661.878,00
▪ Piutang dividen PT. SKU Tahun 2012	Rp	274.277.461,00	Rp	0,00
▪ Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	Rp	4.185.818.970,00	Rp	4.185.818.970,00
Jumlah	Rp	75.268.588.006,83	Rp	70.470.342.258,56

Mutasi Piutang Lain-lain Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 1-1-2012	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2012
1.	Piutang RSUD dr. Soewandhie				
	• Piutang Jamkesmas Kuota	1.478.772.578,06	24.468.610.666,18	21.673.337.717,43	4.274.045.526,81
	• Piutang Jamkesmas Non Kuota	0,00	19.104.068.794,09	18.820.053.402,57	284.015.391,52

	• Piutang askes sosial	102.325.500,00	1.125.658.000,00	1.123.596.000,00	104.387.500,00
	• Piutang Obat Askes	130.583.493,00	1.334.680.789,00	1.333.566.388,00	131.697.894,00
	• Piutang Obat In Health	909.205,00	10.052.047,00	6.511.721,00	4.449.531,00
	• Piutang In Health	6.206.875,00	39.535.525,00	34.388.150,00	11.354.250,00
	• Piutang kepada PT KAI	62.899.725,00	229.065.750,00	206.354.550,00	85.610.925,00
2.	Piutang Lain-lain eks DPRD	185.274.343,50	0,00	0,00	185.274.343,50
3.	Piutang kelebihan penyetoran PFK	7.865.192,00	0,00	7.865.192,00	0,00
4.	Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	162.500.000,00	0,00	7.500.000,00	155.000.000,00
5.	Piutang sewa gedung Siola	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Siola serta denda	388.964.356,00	0,00	388.964.356,00	0,00
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT. Tunjungan City Hopefull	1.212.631.314,00	1.339.957.601,00	1.212.631.314,00	1.339.957.601,00
	• Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	1.740.960.000,00	1.810.598.400,00	1.740.960.000,00	1.810.598.400,00
	• Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	244.400.000,00	254.176.000,00	244.400.000,00	254.176.000,00
6.	Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran Kel. Karah oleh Yayasan UNMER	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
7.	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	2.696.404.190,00	0,00	0,00	2.696.404.190,00
8.	Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	111.023.082,00	0,00	111.023.082,00	0,00
9.	Piutang kepada Rekanan penyedia barang jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	384.498.301,00	0,00	0,00	384.498.301,00
	• Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	871.922.880,00	0,00	0,00	871.922.880,00
10.	Piutang dana bagi hasil dari Pemprov	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Bagi Hasil Pajak	54.681.102.386,00	57.987.186.370,00	54.681.102.386,00	57.987.186.370,00
	• Sumbangan Pihak Ketiga	9.617.990,00	22.362.472,00	9.617.990,00	22.362.472,00
11.	Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora	57.000.000,00	95.550.000,00	57.000.000,00	95.550.000,00
12.	Piutang sewa Gelora Bung Tomo-Dispora	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00

13.	Piutang dividen PD Pasar Surya	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00
14.	Piutang dividen PT. SKU tahun 2012	0,00	274.277.461,00	0,00	274.277.461,00
15.	Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	4.185.818.970,00	4.185.818.970,00	4.185.818.970,00	4.185.818.970,00
16	Piutang deviden pada PD BPR SAU	828.661.878,00	0,00	828.661.878,00	0,00
Jumlah		70.470.342.258,56	112.391.598.845,27	107.593.353.097,00	75.268.588.006,83

- 1.a. Piutang jamkesmas Kuota RSUD dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp.4.274.045.526,75 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Kuota Tahun 2012, sedangkan piutang Tahun 2011 sebesar Rp.1.478.772.578,06 telah dilunasi Tahun 2012.
 - b. Piutang Jamkesmas Non Kuota RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.284.015.391,52 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Kuota Tahun 2012.
 - c. Piutang askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.104.387.500,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan pasien askes Tahun 2012 ke PT.Askes Surabaya.
 - d. Piutang obat askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.131.697.894,00 merupakan klaim pemakaian obat Tahun 2012 ke PT.Askes Surabaya.
 - e. Piutang obat In Health dr. Mochamad Soewandhie merupakan klaim pemakaian obat In Health selama 2012 sebesar Rp.4.449.531,00.
 - f. Piutang In Health dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp.11.354.250,00 merupakan klaim pelayanan In Health Tahun 2012.
 - g. Piutang PT.KAI dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp.85.610.925,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan kepada selama tahun 2012.
2. Piutang lain-lain eks DPRD meliputi kelebihan pembayaran penghasilan DPRD Kota Surabaya tahun 2004 yang melebihi ketentuan SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003 dan sisa Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2001-2002 yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Adapun nama para pejabat DPRD Kota Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) HS,SH anggota DPRD dengan kerugian daerah senilai Rp.41.251.668,70
 - (b) YSS, anggota DPRD senilai Rp.45.751.668,70
 - (c) H.Ism, anggota DPRD senilai Rp.40.051.668,70

- (d)) FS, anggota DPRD senilai Rp.36.751.668,70
- (e)) MB, anggota DPRD senilai Rp.21.467.668,70
3. Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas sebesar Rp.162.500.000,00 berdasar hasil konfirmasi BPK RI ke Kejaksaan Negeri Surabaya, terdapat pengembalian yang disetor langsung ke Kejaksaan Negeri Surabaya sebesar Rp7.500.000,00 (Partai Patriot), sehingga sisa piutang Tahun 2012 sebesar Rp.155.000.000,00.
 - 4 a. Pada Tahun 2012 PT. Tunjungan City Hopefull mempunyai tunggakan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp.1.339.957.601,00.
 - b. Piutang sewa Tahun 2012 Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Jl. Tunjungan No. 3 sebesar Rp.1.810.598.400,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.
 - c. Piutang sewa selama Tahun 2012 atas JPO dan pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl. Tanjung Anom sebesar Rp.254.176.000,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.
 5. Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran Kelurahan Karah oleh Yayasan UNMER sebesar Rp120.000.000,00, dihapus dari piutang dikarenakan Pihak Yayasan UNMER belum melakukan ganti rugi berupa pembangunan Sarana Kelurahan Karah sebesar Rp120.000.000,00 sebagaimana yang diperjanjikan dalam pemakaian tanah dan tanah yang digunakan masih tercatat pada Neraca Pemerintah Kota Surabaya.
 6. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya sebesar Rp.2.696.404.190,00 belum ada pelunasan karena pihak TVRI masih mengajukan banding.
 - 7 a. Piutang kepada rekanan penyedia barang/jasa atas sanksi administrasi penyedia barang jasa sebesar Rp.384.498.301,00 berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD. Tahun 2010 sampai Tahun 2012 belum ada pelunasan.
 - b. Sedangkan piutang atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan sebesar Rp.871.922.880,00 berasal dari Nilai Jaminan yang semula berada di aset lain-lain, tapi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena telah melewati batas waktu sehingga di konversi menjadi Piutang Lain-lain. Rincian saldo per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Rekanan	Piutang sanksi administrasi	Piutang Jaminan Pelaksanaan
1.	PT Rukun Jaya Madura Group	137.412.792,00	402.409.920,00
2.	PT Rukun Jaya Madura Group	121.435.375,00	210.180.000,00
3.	PT Daya Guna Permata	82.100.069,00	198.306.720,00

4.	CV Endah Elok Energi	43.550.065,00	61.026.240,00
	Jumlah	384.498.301,00	871.922.880,00

8. Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya selama Tahun 2012 berasal dari : Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.57.987.186.370,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp.22.362.472,00.
9. Piutang sewa Gelora 10 Nopember sebesar Rp.95.550.000,00 merupakan penambahan atas sewa pemakaian lapangan Tahun 2012 oleh PSSI Surabaya sebesar Rp.56.091.000,00 dan Panitia Festival Pemuda dan Hari Lapangan (FPHP) 2012 sebesar Rp.39.459.000,00.
10. Piutang sewa Gelora Bung Tomo sebesar Rp.110.000.000,00 merupakan penambahan atas sewa pemakaian lapangan Tahun 2012 oleh Persebaya.
11. Piutang deviden pada PT Surya Karsa Utama sebesar Rp.274.277.461,00, sesuai data laporan keuangan PT Surya Karsa Utama tahun 2012.
12. Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan sebesar Rp.4.185.818.970,00 berdasar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan GMI (yang diwakili oleh PT Gala Bumi Perkasa) nomor 180/1096/436.1.2/2010.

8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 271.360.000,00	Rp 271.360.000,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.271.360.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya. Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 sebesar Rp.271.360.000,00 terdiri atas :

NO	N A M A	SISA CICILAN
		(Rp)
1	(Alm) STJ	6.350.000,00
2	(Alm) Drs. M	37.800.000,00
3	(Alm) M	6.000.000,00
4	S, BE	46.000.000,00
5	Drs. A C	8.000.000,00
6	Drs. SMJ	50.000.000,00
7	Drs. SMS	4.700.000,00
8	SNRY	5.350.000,00
9	MNW	36.000.000,00
10	MTN	71.160.000,00
	J U M L A H	271.360.000,00

9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	(Rp431.166.027.040,33)	(Rp391.173.156.533,50)

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasar atas umur piutang dan jenis piutang sebagai berikut :

- Penyisihan Piutang Pajak (Lampiran 2)	Rp	(424.782.976.430,00)	Rp	(385.387.872.285,00)
- Penyisihan Piutang Retribusi (Lampiran 3)	Rp	(2.350.676.910,83)	Rp	(1.522.795.718,00)
- Penyisihan Piutang Lain-lain (Lampiran 4)	Rp	(3.761.013.699,50)	Rp	(3.991.128.530,50)
- Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	(271.360.000,00)	Rp	(271.360.000,00)
T O T A L	Rp	(431.166.027.040,33)	Rp	(391.173.156.533,50)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2012 sebesar (Rp.424.782.976.430,00) terdiri dari :

▪ Piutang Pajak Hotel	Rp	(4.344.716.832,00)	Rp	(3.284.768.303,00)
▪ Piutang Pajak Restoran	Rp	(9.640.126.838,00)	Rp	(6.192.039.454,00)
▪ Piutang Pajak Hiburan	Rp	(1.102.234.478,00)	Rp	(885.072.145,00)
▪ Piutang Pajak Reklame	Rp	(5.266.581.020,00)	Rp	(4.145.562.087,00)
▪ Piutang Pajak	Rp	(84.832.067,00)	Rp	(73.758.288,00)

Penerangan Jalan Non PLN				
▪ Pajak Parkir	Rp	(404.467.002,00)	Rp	(334.989.682,00)
▪ BPHTB	Rp	(1.199.211.695,00)	Rp	(705.095.949,00)
▪ Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	(402.739.622.143,00)	Rp	(369.766.586.377,00)
▪ Pajak Air Tanah	Rp	(1.184.355,00)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(424.782.976.430,00)	Rp	(385.387.872.285,00)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2012 sebesar (Rp.2.350.676.910,83) terdiri dari :

▪ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	(88.653.875,00)	Rp	(88.653.875,00)
▪ Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp	(614.611.863,75)	Rp	(548.899.196,25)
▪ Retribusi THR	Rp	(89.107.467,25)	Rp	(54.021.920,25)
▪ Retribusi Balai Pemuda	Rp	(161.238.000,00)	Rp	(141.519.000,00)
▪ Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp	(1.042.352.822,58)	Rp	(678.472.751,50)
▪ Retribusi IMB (Cipta Karya)	Rp	(238.867.726,25)	Rp	0,00
▪ Retribusi SKRK (Cipta Karya)	Rp	(97.205.155,75)	Rp	0,00
▪ Retribusi sewa stand Terminal	Rp	(11.829.762,75)	Rp	(11.228.975,00)
▪ Retribusi pelayanan (BDH)	Rp	(6.810.237,50)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(2.350.676.910,83)	Rp	(1.522.795.718,00)

Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 sebesar (Rp.3.761.013.699,50) terdiri dari :

▪ Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp	(185.274.343,50)	Rp	(185.274.343,50)
▪ Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	Rp	(0,00)	Rp	(27.755.770,50)
▪ Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	Rp	(155.000.000,00)	Rp	(162.500.000,00)
▪ Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran Kel. Karah oleh Yayasan UNMER	Rp	(0,00)	Rp	(120.000.000,00)
▪ Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasar-	Rp	(288.373.726,00)	Rp	(192.249.150,50)

kan perhitungan bersama PPK SKPD				
▪ Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari rekanan	Rp	(435.961.440,00)	Rp	(217.980.720,00)
▪ Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Siola serta denda	Rp	(0,00)	Rp	(388.964.356,00)
▪ Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp	(2.696.404.190,00)	Rp	(2.696.404.190,00)
Jumlah	Rp	(3.761.013.699,50)	Rp	(3.991.128.530,50)

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 sebesar Rp271.360.000,00 terdiri dari:

Nama	31 Desember 2012	31 Desember 2011
• (Alm) STJ	Rp (6.350.000,00)	Rp (6.350.000,00)
• (Alm) Drs. M	Rp (37.800.000,00)	Rp (37.800.000,00)
• (Alm) M	Rp (6.000.000,00)	Rp (6.000.000,00)
• S, BE	Rp (46.000.000,00)	Rp (46.000.000,00)
• Drs. A C	Rp (8.000.000,00)	Rp (8.000.000,00)
• Drs. SMJ	Rp (50.000.000,00)	Rp (50.000.000,00)
• Drs. SMS	Rp (4.700.000,00)	Rp (4.700.000,00)
• SNRY	Rp (5.350.000,00)	Rp (5.350.000,00)
• MNW	Rp (36.000.000,00)	Rp (36.000.000,00)
• MTN	Rp (71.160.000,00)	Rp (71.160.000,00)
Jumlah	Rp (271.360.000,00)	Rp (271.360.000,00)

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
10. Piutang Bersih	Rp 254.193.769.655,86	Rp 300.978.364.773,57

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, maka piutang disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian piutang secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

- Piutang bersih Pajak	Rp	149.584.781.991,00	Rp	224.351.582.059,00
- Piutang bersih Retribusi	Rp	33.101.413.357,53	Rp	10.147.568.986,51
- Piutang bersih Lain-lain	Rp	71.507.574.307,33	Rp	66.479.213.728,06
TOTAL	Rp	254.193.769.655,86	Rp	300.978.364.773,57

11. Persediaan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp. 55.241.462.852,49	Rp. 45.694.662.971,01

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2012		2011	
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.088.627.586,79	Rp	1.544.277.908,69
Persediaan Obat-obatan				
• Dinas Kesehatan	Rp	12.829.089.927,00	Rp	13.584.561.255,00
• RS Dr Soewandhie	Rp	3.040.717.763,37	Rp	4.892.957.591,00
• Dinas Pertanian	Rp	26.752.308,00	Rp	22.566.400,00
• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp	10.078.426.274,48	Rp	3.636.519.994,10
Persediaan Bahan Makanan				
• RSUD. Dr. Soewandhie	Rp	107.736.675,00	Rp	126.006.200,00
• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp	135.751.059,00	Rp	75.108.410,00
Persediaan Bahan Material				
• Aspal dan Material Lainnya Dinas Bina Marga	Rp	1.322.730.778,30	Rp	1.593.164.038,20
• Aspal dan Material Lainnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp	2.050.429.638,00	Rp	1.619.138.447,00
• Bahan baku bangunan - Dinas Kebakaran	Rp	1.078.000,00	Rp	1.134.000,00
• Bahan baku bangunan – Dinas Cipta Karya	Rp	42.367.809,00	Rp	0,00
Persediaan Bahan Kimia				
• Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp	133.070.095,00	Rp	284.564.443,00
• Badan Lingkungan Hidup	Rp	18.053.200,00	Rp	267.185.820,00
Persediaan Bahan Habis Pakai Kedokteran				
• RSUD. Dr. Soewandhie	Rp	2.688.262.737,00	Rp	2.772.612.069,00

• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp	667.342.349,71	Rp	260.828.535,00
• Persediaan bongkaran gedung di Bagian Perlengkapan	Rp	349.053.000,00	Rp	43.681.000,00
Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp	483.130.890,00	Rp	126.719.250,00
Persediaan Ternak Dinas Pertanian	Rp	134.292.405,00	Rp	99.457.545,00
Persediaan Alat Kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Rp	67.632.270,00	Rp	19.107.000,00
Persediaan alat listrik RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp	70.779.591,67	Rp	108.914.245,00
Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp	19.906.138.495,17	Rp	14.616.158.821,22
Jumlah	Rp	55.241.462.852,49	Rp	45.694.662.972,01

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 1.697.206.373.389,32	Rp 906.946.038.066,74

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.719.946.334.691,32 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp.19.900.000,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp.1.719.926.434.691,32.

1. Investasi Non Permanen	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.10.750.000,00	Rp.69.808.313,25

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat

a. Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.4.083.307.955,27	Rp.4.230.491.400,00

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp.4.083.307.955,27,00 merupakan dana Pemerintah Kota Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat/koperasi di bawah pengawasan Tim Pokja. Dana tersebut terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1. Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 133.703.742,00	Rp 133.703.742,00
2. Bantuan Kepada Peternak Sapi Kereman Dinas Pertanian	Rp 18.300.000,00	Rp 18.300.000,00
3. Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima - Dinas Koperasi dan UMKM	Rp 3.931.304.213,27	Rp 4.078.487.658,00
Jumlah	Rp 4.083.307.955,27	Rp 4.230.491.400,00

- **Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.133.703.742,00.**

Saldo awal dana bergulir sebesar Rp.240.000.000,00 antara lain telah dilakukan penutupan rekening dana bergulir dengan sisa saldo sebesar Rp.83.998.807,59 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 08

Nopember 2010, selain itu juga terdapat honorarium dan biaya operasional yang diberikan berkaitan dengan penyampaian dana bergulir sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/114/402.01.04/2001 dan Nomor 188.45/115/402.01.04/2001 sebesar Rp.22.297.450,00.

Sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp.133.703.742,00 yang merupakan pinjaman Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Perdagangan yang digulirkan untuk :

- 22 UKM pada Tahap I dengan sisa tunggakan sebesar Rp.91.355.083,00
- 9 UKM pada Tahap II dengan sisa tunggakan sebesar Rp.42.348.659,00

Sejak Tahun 2003 sampai dengan saat ini tidak terjadi pengangsuran dari para UKM tersebut.

Pada bulan Nopember dan Desember 2009, telah dilakukan konfirmasi penagihan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda tangani langsung oleh pihak UKM atas pengakuan hutang dan kesanggupan membayar, namun sampai dengan saat ini belum ada UKM yang melakukan pengangsuran, meskipun sudah dilakukan penagihan/konfirmasi ulang.

Pada bulan September dan Nopember 2010 dilakukan upaya penagihan kembali dan proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Peminjam telah meninggal dunia, ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab
- Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi
- Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian
- Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kwitansi), sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank.

- **Bantuan kepada Peternak Sapi Kereman di Dinas Pertanian sebesar Rp.18.300.000,00.**

Dana bergulir berupa penyerahan sapi kepada pengaduh untuk dipelihara dengan cara penggemukan oleh pengaduh sesuai dengan surat perjanjian no. 524/986.1/402.4.10/2003 tanggal 30 Juni 2003 dengan kewajiban

selambat-lambatnya pada bulan ke-12 menyerahkan sapi hasil penggemukan kepada Dinas Pemantapan Pangan/Dinas Pertanian dengan sistem bagi hasil dengan pengembalian modal pokok untuk digulirkan kembali. Saldo awal dana bergulir sebesar Rp.41.600.000,00 berupa modal pokok pembelian 13 ekor sapi anakan seharga Rp.3.200.000,00 per ekornya. Dana tersebut diberikan kepada 13 pengaduh dilingkungan pemerintah kota surabaya. Posisi per 31 Desember 2012 dari ke 13 pengaduh telah melakukan angsuran kepada Dinas pertanian sebesar Rp.23.300.000,00, sehingga masih tersisa sebesar Rp.18.300.000,00.

Hasil konfirmasi kepada pengaduh diketahui bahwa keberadaan sapi dana bergulir sudah tidak ada. Pengaduh telah menjual sapi yang dipeliharanya untuk kemudian hasil penjualan digunakan sebagai modal kerja, sewa lahan garapan dan membayar operasi keluarganya, namun atas hasil penjualan tersebut tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota.Saldo bantuan sebesar Rp.18.300.000,00 merupakan tunggakan seluruh masyarakat kepada Dinas Pertanian. Dan sampai akhir Desember 2012 belum ada pelunasan.

- Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan Sektor Informal sebesar Rp.3.931.304.213,27.

Mutasi tahun 2012 adalah :

Saldo awal per 1 Januari 2012	Rp.	4.078.487.658,00
Penambahan tahun 2012	Rp.	12,27
Pengurangan tahun 2012	<u>Rp. (</u>	<u>147.183.457,00)</u>
Saldo akhir per 31 Desember 2012	Rp.	3.931.304.213,27

Pengurangan Investasi sebesar Rp.147.183.457,00 merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir ke Kas Umum Pemerintah Kota Surabaya dan koreksi saldo awal sebesar Rp.12,27, sehingga pokok dana bergulir berkurang menjadi sebesar Rp.3.931.304.213,27.

b. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.4.072.557.955,27	Rp.4.160.683.086,75

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun

2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut :

URAIAN		2012		2011
- Penyisihan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK)	Rp	(133.703.742,00)	Rp	(133.703.742,00)
- Penyisihan Dana Bantuan Sapi Kereman	Rp	(18.300.000,00)	Rp	(4.575.000,00)
- Penyisihan Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima	Rp	(3.920.554.213,27)	Rp	(4.022.404.344,75)
T O T A L (lampiran 5)	Rp	(4.072.557.955,27)	Rp	(4.160.683.086,75)

c. Investasi Non Permanen Bersih	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.10.750.000,00	Rp.69.808.313,25

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

- Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK) bersih	Rp	0,00	Rp	0,00
- Dana Bantuan Sapi Kereman bersih	Rp	0,00	Rp	13.725.000,00
- Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima bersih	Rp	10.750.000,00	Rp	56.083.313,25
T O T A L	Rp	10.750.000,00	Rp	69.808.313,25

2. Investasi Permanen	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp. 1.697.195.623.389,32	Rp.906.876.229.753,49

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp. 1.697.195.623.389,32	Rp.906.876.229.753,49

Penilaian Investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Metode Ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 100%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan Metode Biaya. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.1.697.195.623.389,32 dan Rp.906.876.229.753,49 adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Milik Daerah	Penyertaan Modal	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1.Perusahaan Milik Daerah				
a.	Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum	Rp 81.403.538.341,00	Rp 939.376.752.239,00	Rp 772.945.110.562,00
b.	Investasi pada PD Pasar Surya	Rp 15.993.122.665,00	Rp 29.169.344.035,00	Rp 26.938.907.825,00
c.	Investasi pada PD Rumah Potong Hewan	Rp 7.045.511.405,00	Rp 10.852.836.567,00	Rp 10.759.045.659,00
d.	Investasi Pada PT Surya Karsa Utama	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.810.420.573,00	Rp 1.407.717.071,33
e.	Investasi Pada PT BPR Surya artha Utama (SAU)	Rp 2.597.000.000,00	Rp 5.303.304.725,32	Rp 4.609.070.136,16
f.	PD Taman Satwa KBS	Rp 565.868.600.000,00	Rp 565.868.600.000,00	Rp 0,00
Jumlah 1		674.157.772.411,00	Rp 1.552.381.258.139,32	Rp 816.659.851.253,49
2.Lembaga Keuangan Bank				
a.	Investasi pada PT Bank Jatim	Rp 79.810.864.250,00	Rp 79.810.864.250,00	Rp 32.230.000.000,00
b.	Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00
Jumlah 2		Rp 80.008.923.250,00	Rp 80.008.923.250,00	Rp 32.428.059.000,00
3.Pihak Ketiga				
a.	Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Rp 7.500.000.000,00	Rp 64.253.235.000,00	Rp 57.219.567.500,00
b.	Investasi pada PT Abbatoir Surya Jaya	Rp 900.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00
c.	Investasi PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)	Rp 249.000.000,00	Rp 552.207.000,00	Rp 568.752.000,00
Jumlah 3		Rp 8.649.000.000,00	Rp 64.805.442.000,00	Rp 57.788.319.500,00
		Rp 762.815.695.661,00	Rp 1.697.195.623.389,32	Rp 906.876.229.753,49

1. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM adalah 100%. Nilai Investasi pada PDAM yang tersaji sebesar Rp.939.376.752.239,00 tersebut, terdapat selisih sebesar Rp.30.085.347.945,00 dengan nilai ekuitas yang disajikan dalam Neraca PDAM. Hal itu karena aset saluran pipa milik Pemkot Surabaya yang digunakan oleh PDAM senilai Rp.30.085.347.945,00, pada Neraca PDAM telah dicatat sebagai penyertaan Pemkot Surabaya. Namun, penyertaan tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan aset dimaksud masih tercatat sebagai Aset Lainnya dalam Neraca Pemkot Surabaya.

2. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Pasar Surya adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Rumah Potong Hewan adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) adalah sebesar 98,67%. Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT.BPR Surya Artha Utama(SAU), sesuai akta notaries Kukuh Muljo Rahardjo, SH nomor 108 tanggal 15 Mei 2010, para pemegang sahama PT.SKU menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan PT.SKU pada PT.BPR SAU kepada Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp2.597.000.000,00 atau 98%.
5. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT Bank Jatim adalah sebesar 3,99%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.BPR Jatim adalah sebesar 0,29%. Sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%.
6. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. SIER sebesar 25% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.
7. Kepemilikan modal PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas. Penyertaan pada PT Abbatoir dinilai Rp.0,00 karena Ekuitas PT Abbatoir per 31 Desember 2012 bernilai minus, yaitu Rp.1.582.478.049,30
8. dan PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.

Jumlah Kepemilikan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. PDAM sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.81.403.538.341,00.
2. PD Pasar Surya sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.15.993.122.665,00.
3. PD Rumah Potong Hewan sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.7.045.511.405,00.

4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) sebesar Rp.1.250.000.000,00 berupa saham sebanyak 1.250 lembar dengan harga per-sahamnya sebesar Rp.1.000.000,00.
5. Penyertaan modal pada PT BPR SAU sebesar Rp.2.597.000.000,00 berupa saham sebanyak 2.597 lembar dengan harga Rp.1.000.000,00 per lembar sahamnya. Pada awalnya, Pemerintah Kota Surabaya menyetor modal ke PT.SKU sebesar Rp.3.700.000.000,00 atau 3.700 lembar saham. Pada Tahun 2004, PT.SKU menyetor modal kepada PT.BPR SAU sebesar Rp.2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham. Pada Tahun 2010, PT.SKU mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT.BPR SAU (yang semula/Tahun 2004 senilai Rp.2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham dan pada Tahun 2010 telah menjadi Rp.2.597.000.000,00 atau 2.597 lembar saham kepada Pemerintah Kota Surabaya.
6. Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepemilikan modal ke PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp.565.868.600.000,00 berupa Tanah seluas 15,3 Ha.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Lembaga Keuangan Bank adalah dengan Investasi pada PT Bank Jatim dengan total investasi semula sebesar Rp.32.230.000.000,00 berupa kepemilikan saham sebanyak 32.230 lembar harga per sahamnya sebesar Rp.1.000.000,00 mendapat tambahan dana cadangan umum yang dikonversi menjadi saham sehingga total penyertaan menjadi sebesar Rp79.810.864.250,00 atau sebanyak 319.243.457 lembar harga per sahamnya sebesar Rp.250,00, sesuai Berita Acara RUPS LB No 19 Tanggal 19 Maret 2012. Sedangkan investasi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Jatim sebesar Rp.198.059.000,00 adalah berupa kepemilikan saham sebanyak 198 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp.1.000.000,00.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah dengan melakukan Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT.SIER) sebesar Rp.7.500.000.000,00, yang merupakan kepemilikan saham sebanyak 7.500 lembar yang harga per-lembaranya adalah sebesar Rp.1.000.000,00.
9. Investasi kepada PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar Rp.900.000.000,00 merupakan kepemilikan saham sebanyak 9.000 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp.100.000,00,
10. Penyertaan modal kepada PT STAR merupakan kepemilikan saham sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp.249.000.000,00 atau senilai Rp.207.500,00 per lembar saham atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Sasana Wisata sebagai

penyertaan (*inbrenng*) sebagai modal saham dalam PT.STAR sesuai perjanjian penggunaan tanah nomor 181.2/1739/411.12/87 tanggal 20 Juli 1987. Atas penyertaan modal tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan sertifikasi HGB diatas HPL Nomor 21/K, surat ukur Nomor 1271 Tahun 1988 atas nama PT.Sasana Wisata dan berakhir tahun 2006.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
C. ASET TETAP	Rp32.276.066.905.289,07	Rp31.484.362.969.879,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
1. Tanah	Rp	26.360.913.183.989,70	Rp	26.362.731.077.482,70
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.388.948.910.302,04	Rp	1.084.161.627.492,50
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.021.660.083.968,87	Rp	1.794.339.244.299,93
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	2.379.557.319.282,78	Rp	2.194.003.803.452,38
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	46.519.609.130,27	Rp	34.458.820.629,05
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	78.467.798.615,41	Rp	14.668.396.523,00
JUMLAH	Rp	32.276.066.905.289,07	Rp	31.484.362.969.879,60

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1. Tanah	Rp.26.360.913.183.989,70	Rp.26.362.731.077.482,70

Tanah senilai Rp.26.360.913.183.989,70 dan Rp.26.362.731.077.482,70 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
- Tanah Kampung	Rp	1.154.046.858.847,38	Rp	1.163.390.526.408,37
- Tanah Kuburan	Rp	89.766.113.841,00	Rp	89.766.113.841,00
- Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	Rp	28.325.250.328,00	Rp	28.325.250.328,00
- Tanah Kebun Campuran Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	Rp	49.709.000,00	Rp	49.709.000,00

- Tanah Hutan Untuk Penggunaan Khusus	Rp	1.853.712.217.710,00	Rp	1.853.712.217.710,00
- Tanah Tambak	Rp	62.910.421.897,00	Rp	62.910.421.897,00
- Tanah Danau	Rp	7.983.704.000,00	Rp	7.983.704.000,00
- Tanah Penggalan	Rp	589.315.441,00	Rp	589.315.441,00
- Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	Rp	9.588.774.298.814,00	Rp	9.585.933.241.145,00
- Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Rp	14.450.826.844,50	Rp	14.353.295.991,50
- Tanah Untuk Bangunan Industri	Rp	12.630.000,00	Rp	12.630.000,00
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Rp	1.574.432.865.400,33	Rp	1.645.035.468.273,33
- Tanah Kosong	Rp	56.122.491.708,00	Rp	59.470.491.708,00
- Tanah Bangunan Pengairan	Rp	50.364.180.776,00	Rp	46.829.180.776,00
- Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Rp	609.962.754.981,50	Rp	609.962.754.981,50
- Tanah Lembiran/Bantaran/ Lepe-lepe/Stren dll	Rp	2.451.020.595,00	Rp	2.451.020.595,00
- Tanah Lapangan Olah raga	Rp	247.351.225.949,00	Rp	246.744.913.949,00
- Tanah Lapangan Parkir	Rp	2.162.530.600,00	Rp	2.162.530.600,00
- Tanah Lapangan Penimbun Barang	Rp	376.537.766,00	Rp	376.537.766,00
- Tanah Untuk Bangunan Jalan	Rp	10.743.544.796.587,00	Rp	10.621.435.528.142,60
- Tanah Untuk Bangunan Air	Rp	247.258.166.104,00	Rp	247.258.166.104,00
- Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Rp	2.283.150.000,00	Rp	49.995.942.025,41
- Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Rp	0,00	Rp	0,00
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Rp	23.982.116.800,00	Rp	23.982.116.800,00
JUMLAH	Rp	26.360.913.183.989,70	Rp	26.362.731.077.482,70

Mutasi Tanah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	26.362.731.077.482,70
Penambahan Tahun 2012	Rp	192.934.204.511,01
Pengurangan Tahun 2012	Rp	194.752.098.004,01
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	<u>26.360.913.183.989,70</u>

Penambahan Tanah tahun 2012 sebesar Rp.192.934.204.511,01 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2012 sebesar Rp.130.300.590.776,00
(lampiran 6) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal tanah Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp.136.872.202.550,00 namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap tanah sebesar Rp.127.645.609.550,00. Sedangkan sisa belanja modal tanah sebesar Rp.9.226.593.000,00 diklasifikasikan sebagai asset tetap bukan tanah
 - b. Belanja modal selain tanah setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang diakui sebagai asset tetap tanah sebesar Rp.950.000,00 .
 - c. Belanja Barang dan Jasa berupa belanja Bahan Baku bangunan dan Jasa Konsultasi perencanaan dan pengawasan yang dikapitalisasikan menjadi asset tetap tanah sebesar Rp.2.654.031.226,00 .
- Penambahan asset tetap tanah yang belum tercatat selama tahun 2012 sebesar Rp.33.567.361.296,00.
- Adanya koreksi BPK tahun 2011 atas pencatatan gedung dan bangunan Rusun Romo Kalisari yang seharusnya tercatat sebagai asset tetap tanah sebesar Rp.3.355.572.439,00.
- Koreksi atas nilai tanah yang digunakan oleh Yayasan Unmer sesuai hasil analisa ganti rugi tahun 2007 sebesar Rp25.278.680.000,00
- Reklasifikasi atas nilai tanah yang dipinjam pakai kepada instansi lain sebesar Rp432.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai aset lainnya.

Pengurangan Aset Tanah selama tahun 2012 sebesar Rp.194.752.098.004,01 berasal dari :

- Reklasifikasi menjadi investasi permanen berupa penanaman modal PD. Satwa Wahana Kebun Binatang Surabaya berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 sebesar Rp.123.155.120.000,00

- Tanah milik Pelindo yang dicatat menjadi tanah Pemkot Surabaya sebesar Rp.180.873,00
- Pencatatan ganda atas 10 bidang tanah sebesar . Rp.9.308.208.000,00
- Tanah milik Koperasi Pemkot Surabaya yang dicatat menjadi tanah Pemkot Surabaya sebesar Rp.171.600.000,00
- Koreksi nilai atas bangunan yang berdiri di atas tanah selama tahun 2012 sebesar Rp.7.328.775.999,99.
- Reklasifikasi menjadi asset lainnya berupa Bangun Kelola Serah (BKS) TPA Benowo berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 658.1/4347/436.6.5/2012 tanggal 88/JBU-SO/8/2012

08 Agustus 2012 sebesar Rp.54.788.213.131,02 dengan PT. Sumber Organik.

Terdapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dengan status pinjam pakai kepada Korem 084/Bhaskara Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/398/436.1.2/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang digunakan sebagai Kantor Koramil.

NO.	LOKASI DAN PENGGUNAAN OLEH INSTANSI LAIN	LUAS TANAH YANG DIMANFAATKAN INSTANSI LAIN	REGISTER	KETERANGAN
1.	Kantor Koramil Kecamatan Sukolilo Jl. Arif Rahman Hakim No.207 Surabaya	± 835,40 m ² berdasarkan gambar situasi tanah nomor 53/UMG/P&P/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	0335572	Sebagian BTKD Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo GS. 5/T/90 seluas 5.501 m ²
2.	Kantor Koramil Kecamatan Kenjeran Jl.Bulak Banteng Madya Surabaya	± 1.469,20 m ² berdasarkan gambar situasi tanah nomor 54/UMG/P&P/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	0335605	Sebagian BTKD Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran GS.5/T/91 seluas 14.380 m ²
3.	Kantor Koramil Kecamatan Benowo Jl. Raya Sememi Surabaya	± 1.701 m ² berdasarkan gambar situasi tanah nomor 55/UMG/P7P/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	0335677	Sebagian BTKD Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo GS.162/U/91 seluas 14.380 m ²

Dalam tahun 2012 telah selesai disertifikatkan sebanyak 13 bidang tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Wiyung, Benowo, Bulak, Simokerto, Semampir dan Tambaksari seluas 81.049 m² (**lampiran 7**) terdiri dari 13 sertifikat hak pakai yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengamankan asset dan memperkuat bukti kepemilikan sebagai dasar pencatatan dalam neraca. Upaya sertifikasi ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan kota Surabaya.

Daftar permasalahan hukum terkait sengketa tanah yang masih berada dalam proses peradilan sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai **lampiran 8**.

2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp1.388.948.910.302,04	Rp1.084.161.627.492,50

Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.388.948.910.302,04 dan Rp.1.084.161.627.492,50 merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
– Alat Besar/Berat Darat	Rp	66.992.450.579,30	Rp	55.307.796.755,35
– Alat Besar/Berat Apung	Rp	8.089.200,00	Rp	8.089.200,00
– Alat-alat Bantu	Rp	59.660.494.175,26	Rp	59.294.891.960,26
– Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	229.781.793.192,32	Rp	184.672.256.157,47
– Alat Angkutan darat Tak Bermotor	Rp	5.166.256.101,75	Rp	5.110.156.101,75
– Alat Angkut Apung Bermotor	Rp	2.095.210.727,20	Rp	1.384.210.727,20
– Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp	1.947.208.637,00	Rp	1.414.630.270,00
– Alat Bengkel Bermesin	Rp	10.291.083.721,30	Rp	9.821.830.736,31
– Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp	2.716.866.245,77	Rp	2.408.461.745,77
– Alat Ukur	Rp	11.143.152.055,22	Rp	9.870.189.980,20
– Alat Pengolahan	Rp	4.194.833.820,39	Rp	3.828.025.000,38
– Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	Rp	854.491.765,93	Rp	731.834.765,93
– Alat Kantor	Rp	87.567.258.750,99	Rp	76.961.764.022,12

– Alat Rumah Tangga	Rp	186.075.962.554,59	Rp	161.624.177.641,01
– Komputer dan Printer	Rp	216.721.817.364,15	Rp	196.297.122.218,32
– Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	10.028.223.131,83	Rp	9.288.407.242,47
– Alat Studio	Rp	39.028.290.740,83	Rp	33.318.528.992,88
– Alat Komunikasi	Rp	12.549.151.002,14	Rp	10.852.334.077,27
– Peralatan Pemancar	Rp	6.385.929.774,78	Rp	5.895.574.774,90
– Alat kedokteran	Rp	273.891.512.207,43	Rp	131.219.977.463,50
– Alat Kesehatan	Rp	10.055.694.866,61	Rp	6.246.997.557,09
– Alat Unit-unit Laboratorium	Rp	86.094.259.085,73	Rp	71.965.989.893,12
– Alat Peraga/Praktik Sekolah	Rp	29.037.202.409,41	Rp	28.211.039.160,08
– Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp	579.354.186,60	Rp	552.690.186,60
– Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp	2.224.450.402,35	Rp	2.224.450.402,35
– Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp	3.946.699.964,00	Rp	3.929.099.964,00
– Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp	2.493.780.024,49	Rp	2.493.780.024,49
– Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	13.927.082.740,59	Rp	7.584.383.000,99
– Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp	1.639.194.470,69	Rp	1.570.163.420,69
– Senjata Api	Rp	4.250.000,00	Rp	4.250.000,00
– Persenjataan Non Senjata Api	Rp	68.554.050,00	Rp	68.554.050,00
JUMLAH	Rp	1.388.948.910.302,04	Rp	1.084.161.627.492,50

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	1.084.161.627.492,50
Penambahan tahun 2012	Rp	323.838.764.247,86
Pengurangan tahun 2012	Rp	19.051.481.438,32
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	1.388.948.910.302,04

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2012 sebesar Rp.323.828.764.247,86 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2012 sebesar Rp.286.641.548.281,44
(lampiran 9) diperoleh dari :

- a. Belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp.282.966.010.775,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan, yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.280.869.814.903,44. Sisa belanja modal sebesar Rp.2.096.195.871,56 yang menjadi asset tetap bukan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.863.825.286,00, yang menjadi bukan asset tetap sebesar Rp.232.024.750,00 dan nominal sebesar Rp.345.835,56 terdiri atas Rp.345.850,00 merupakan kelebihan atas pembayaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Bagian Perlengkapan yang mana sudah disetor pada tahun 2013 dengan bukti STS no.000233/KAS/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 serta (Rp.14,44) selisih pembulatan atas pencatatan asset tetap diperbandingkan dengan belanja modal .
- b. Belanja modal selain peralatan dan mesin setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.4.991.466.178 .
- c. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.780.267.200,00.
- Hibah dari 5 instansi/lembaga yang sudah ada naskah pemberian hibah selama tahun 2012 sebesar Rp.2.044.776.485,00.
 - Hibah dari PT Bank Jatim Cabang Surabaya yang belum ada naskah pemberian hibah namun fisik barang sudah diterima tahun 2012 sebesar Rp.294.415.000,00.
 - Penambahan asset peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2012 sebesar Rp.4.125.443.850,00
 - Koreksi pembulatan pada saldo awal sebesar Rp.44,68 dan koreksi penambahan atas penyesuaian nilai neraca dengan daftar asset TA 2012 sebesar Rp.30.732.580.586,74.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2012 sebesar Rp.19.589.062.350,32 terdiri atas :

- Penghapusan asset Peralatan dan Mesin selama tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/103/436.12/2012; 188.45/114/436.1.2/2012; 188.45/305/436.1.2/2012 sebesar Rp.3.695.005.139,72;

- Reklasifikasi menjadi asset lainnya dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan menggunakan kerjasama pemanfaatan bangunan serah (BKS/BOT) dengan PT. Sumber Organik dalam hal kerjasama penyediaan prasarana dan sarana tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo berupa mesin jembatan timbang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp.688.902.000,00;
- Koreksi atas Peralatan dan perlengkapan sekolah yang telah dihibahkan kepada sekolah swasta yang penyerahan fisiknya dilaksanakan pada TA. 2008, namun baru dilakukan proses usulan penghapusan TA. 2012 sebesar Rp858.073.425,00;
- Koreksi penyesuaian aset tetap atas kesalahan penganggaran sebesar Rp604.345.663,00;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena dipinjam pakai pihak ketiga selama tahun 2012 sebesar Rp.7.986.327.045,60;
- Pengurangan lainnya (koreksi saldo awal, hilang) selama tahun 2012 sebesar Rp.5.218.828.165,00.

3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp2.021.660.083.968,87	Rp1.794.339.244.299,93

Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.021.660.083.968,87 dan Rp.1.794.339.244.299,93 merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	1.906.983.950.639,81	Rp	1.696.154.387.012,71
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	37.113.774.778,10	Rp	30.238.712.512,10
- Bangunan Menara	Rp	1.142.459.346,58	Rp	797.138.873,02
- Bangunan bersejarah	Rp	670.447.477,00	Rp	670.447.477,00
- Tugu peringatan /Prasasti	Rp	8.995.151.151,00	Rp	8.671.597.151,00
- Tugu peringatan	Rp	316.282.522,40	Rp	316.282.522,40
- Tugu Titik Kontrol/Pasti/Tand	Rp	18.050.777.314,62	Rp	17.879.212.108,62

a Batas				
- Rambu-rambu	Rp	23.972.700.174,83	Rp	21.617.013.724,50
- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Rp	3.105.921.806,70	Rp	1.218.524.306,75
- Sarana Prasarana - Taman	Rp	20.159.462.155,29	Rp	15.811.964.344,29
- Sarana Prasarana Pemakaman	Rp	1.149.156.602,54	Rp	963.964.267,54
JUMLAH	Rp	2.021.660.083.968,87	Rp	1.794.339.244.299,93

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	1.794.339.244.299,93
Penambahan tahun 2012	Rp	236.405.775.450,44
Pengurangan tahun 2012	Rp	9.084.935.781,50
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	<u>2.021.660.083.968,87</u>

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2012 sebesar Rp.236.405.775.450,44 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2012 sebesar Rp217.651.044.056,44(**lampiran 10**) diperoleh dari :
 - a) Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp.268.319.373.162,00 namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.202.898.316.024,0 menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.202.898.317.119,44, terdapat selisih pembulatan atas pencatatan asset tetap diperbandingkan dengan belanja modal sebesar Rp.1.095,44, sedangkan sisa belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.65.421.057.138,00 diklasifikasikan menjadi asset tetap selain gedung dan bangunan sebesar Rp65.088.008.699,00 dan non asset tetap sebesar Rp.333.048.439,00.
 - b) Belanja modal selain gedung dan bangunan yang diklasifikasikan menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.11.433.391.641,00.
 - c) Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi asset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.3.319.335.296,00.
- Hibah dari PT Telkom berupa revitalisasi fasilitas public di Taman Bungkul yang diterima tahun 2012 berdasarkan perjanjian naskah hibah CTel709/HK810/CDC-F2000000/2012 dan Nomor 415.4/3227/436.2.3/2012 tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp.345.723.733,00.

- Penambahan nilai asset gedung dan bangunan yang belum tercatat dalam kartu inventaris sebesar Rp.2.638.440.000,00.
- Koreksi atas pinjam pakai yang semula dicatat pada aset lainnya sebesar Rp374.000.000,00
- Mutasi Saldo KDP 2011 yang TA 2012 dilanjutkan dan sudah dimanfaatkan pada DCKTR Rp13.656.562.069,00
- Koreksi nilai tambah sebesar Rp.963.699.000,00
- Koreksi atas kelebihan dalam melakukan transaksi penghapusan sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/349/436.1.2/2012 tentang penghapusan atas 13,6% Bangunan Terminal Purabaya sebesar Rp.122.196.408,00 namun dihapus seluruhnya sebesar Rp.898.503.000,00 sehingga dilakukan koreksi lebih hapus sebesar Rp.776.306.592,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2012 sebesar Rp.9.084.935.781,50 terdiri atas :

- Penghapusan asset Gedung dan Bangunan selama tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/104/436.1.2/2012; 188.45/221/436.1.2/2012; 188.45/422/436.1.2/2012; 188.45/349/436.1.2/2012 sebesar Rp.2.540.015.018,00;
- Penghapusan sebagian dari Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/422/436.1.2/2012 selama tahun 2012 sebesar Rp.444.352.662,50;
- Reklasifikasi menjadi asset lainnya dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan menggunakan kerjasama pemanfaatan bangunan serah (BGS/BOT) dengan PT. Sumber Organik dalam hal kerjasama penyediaan prasarana dan sarana tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo berupa bangunan dan sarana pelengkap berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp.1.592.005.662,00;
- Koreksi hapus bangunan gedung selama tahun 2012 sebesar Rp.1.152.990.000,00.
- Adanya koreksi BPK tahun 2011 atas pencatatan gedung dan bangunan Rusun Romo Kalisari yang seharusnya tercatat sebagai aset tetap tanah sebesar Rp3.355.572.439,00, berupa pengurangan.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.2.379.557.319.282,78	Rp.2.194.003.803.452,38

Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp.2.379.557.319.282,78 dan Rp.2.194.003.803.452,38 merupakan nilai jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
- Jalan	Rp	1.140.103.274.226,51	Rp	1.050.675.159.439,26
- Jembatan	Rp	174.678.759.147,29	Rp	171.669.281.712,29
- Bangunan Air Irigasi	Rp	88.477.822.847,00	Rp	88.423.063.447,00
- Bangunan Air Pasang Surut	Rp	45.237.033.628,00	Rp	44.520.624.205,00
- Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	Rp	12.304.544.061,10	Rp	12.304.544.061,10
- Bangunan Air Pengaman Sungai dan Penanggulangan bencana alam	Rp	595.635.542.831,80	Rp	527.589.477.095,80
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	5.332.359.735,30	Rp	4.755.144.459,10
- Bangunan Air Bersih /Air Baku	Rp	4.338.561.411,56	Rp	4.259.989.552,56
- Bangunan Air Kotor	Rp	41.476.856.020,70	Rp	41.442.039.219,70
- Bangunan Air Laut	Rp	637.242.332,95	Rp	588.807.139,00
- Instalasi Air Minum /Air Bersih	Rp	14.413.575.985,00	Rp	10.906.529.245,00
- Instalasi Air Kotor	Rp	8.594.610.647,20	Rp	8.526.770.424,20
- Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Rp	13.980.987.208,00	Rp	14.726.060.208,00
- Instalasi Pembangkit Listrik	Rp	1.017.968.011,00	Rp	343.579.250,00
- Instalasi Gardu Listrik	Rp	3.509.025.198,60	Rp	3.429.941.961,60
- Instalasi Gas	Rp	1.646.611.186,50	Rp	1.446.576.186,50
- Instalasi Pengaman	Rp	31.380.000,00	Rp	31.380.000,00
- Jaringan Air Minum	Rp	5.377.540.476,00		4.858.369.883,00
- Jaringan Listrik	Rp	221.341.570.406,87	Rp	202.120.635.481,87
- Jaringan Telepon	Rp	61.789.001,00	Rp	61.789.001,00

- Jaringan Gas	Rp	1.360.264.920,40	Rp	1.324.041.480,40
JUMLAH	Rp	2.379.557.319.282,78	Rp	2.194.003.803.452,38

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	2.194.003.803.452,38
Penambahan tahun 2012	Rp	186.298.588.830,40
Pengurangan tahun 2012	Rp	745.073.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	<u>2.379.557.319.282,78</u>

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi selama tahun 2012 sebesar Rp. 186.298.588.830,40 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2012 sebesar Rp186.298.588.830,40 (**lampiran 11**) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp.211.703.906.887,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi asset tetap Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.185.603.521.991,45 sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp.26.100.384.895,55 merupakan belanja modal yang tidak menjadi asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.24.045.794.700,00, yang menjadi bukan asset tetap sebesar Rp.441.516.000,00 serta yang menjadi belanja dibayar dimuka sebesar Rp.1.613.074.195,55.
 - b. Belanja modal selain belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan menjadi asset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.695.066.838,95.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi selama tahun 2012 sebesar Rp.745.073.000,00 merupakan pengurangan dikarenakan Reklasifikasi menjadi asset lainnya dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan menggunakan kerjasama pemanfaatan bangun guna serah (BGS/BOT) dengan PT. Sumber Organik dalam hal kerjasama penyediaan prasarana dan sarana tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo berupa Filtrasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tanggal 3 Juli 2012.

5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp. 46.519.609.130,27	Rp.34.458.820.629,05

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.46.519.609.130,27 dan Rp.34.458.820.629,05 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
- Buku	Rp 39.997.710.223,76	Rp 28.755.063.089,76
- Terbitan Berkala	Rp 232.095.658,00	Rp 232.095.658,00
- Barang-barang Perpustakaan	Rp 836.214.689,00	Rp 734.463.473,00
- Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 3.214.624.905,83	Rp 3.262.144.905,83
- Alat Olahraga Lainnya	Rp 372.968.476,96	Rp 372.968.476,96
- Hewan dan Ternak	Rp 32.528.276,15	Rp 35.305.760,70
- Tanaman	Rp 1.091.269.264,80	Rp 1.066.779.264,80
- Aset tetap lainnya berasal dr Dana BOS	Rp 742.197.635,78	Rp 0,00
JUMLAH	Rp 46.519.609.130,27	Rp 34.458.820.629,05

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp 34.458.820.629,05
Penambahan tahun 2012	Rp 12.111.085.985,77
Pengurangan tahun 2012	Rp 50.297.484,55
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	<u>Rp 46.519.609.130,27</u>

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2012 sebesar Rp.12.111.085.985,77 merupakan :

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2012 sebesar Rp.11.368.888.350,00 **(lampiran 12)** diperoleh dari :
 - a. Belanja modal asset tetap lainnya Tahun 2012 dialokasikan Rp.11.965.688.300,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa

diklasifikasikan menjadi asset tetap lainnya sebesar Rp.11.344.398.350,00 sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp.621.289.950,00 menjadi selain Aset Tetap Lainnya.

- b. Belanja modal selain Aset Tetap Lainnya yang setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.24.490.000,00 .
- c. Hibah pengadaan dana BOS yang disalurkan kepada Sekolah Dasar dan SMP Negeri diwilayah Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.457.174.112,77 dan Rp.285.023.523,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2012 sebesar Rp.47.520.000,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi saldo awal asset tetap lainnya dikarenakan sudah diserahterimakan dan dikirim ke China sesuai Berita Acara Nomor : 556/118/BAST.1/436.5.12/2007 berupa barang bercorak kesenian sebesar Rp.47.520.000,00 dan Koreksi kurang atas penyesuaian neraca dan simbada berdasarkan bukti kepemilikan dan laporan dari SKPD sebesar Rp.2.777.484,55.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.78.467.798.615,41	Rp.14.668.396.523,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp.78.467.798.615,41 dan Rp.14.668.396.523,00 merupakan pelaksanaan pekerjaan yang pengerjaannya per 31 Desember 2012 dan 2011 belum selesai dan belum siap dipakai. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan terdapat dalam **Lampiran 13**.

D. ASET LAINNYA	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp 239.927.886.463,81	Rp 174.674.961.245,96

Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri dari :

No.	URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)	64.164.000,00	0,00
2.	Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186.112.082.293,02	140.005.452.346,10
3.	Aset Tak Berwujud	5.019.695.615,20	3.795.515.975,80
4.	Aset Lain-lain	48.731.944.555,59	30.873.992.924,00
	JUMLAH	239.927.886.463,81	174.674.961.245,96

a. Tagihan Tuntutan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	Rp.64.164.000,00	Rp.0,00

Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	0,00
Penambahan tahun 2012	Rp	80.000.000,00
Pengurangan tahun 2012	Rp	15.836.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	64.164.000,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Sebesar Rp.64.164.000,00 terdiri atas :

No.	NAMA	SISA CICILAN (Rp)
1.	Drs. M I	35.000.000,00
2.	M P	29.164.000,00
	JUMLAH	64.164.000,00

b. Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.186.112.082.293,02	Rp.140.005.452.346,16

Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp. 186.112.082.293,02 dan Rp.140.005.452.346,16 terdiri dari :

▪ Bangun, Kelola, Serah (BKS)	Rp	147.779.494.793,0	Rp	89.965.301.000,00
▪ Bangun, Serah, Kelola (BSK)	Rp	4.969.192.500,00	Rp	4.969.192.500,00
▪ Kerjasama Operasi (KSO)	Rp	33.363.395.000,00	Rp	33.363.395.000,00
▪ Pinjam Pakai	Rp	0,00	Rp	11.707.563.846,16
Jumlah	Rp	186.112.082.293,02	Rp	140.005.452.346,16

▪ Bangun, Kelola, Serah (BKS)	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.147.779.494.793,02	Rp.89.965.301.000,00

Bangun, Kelola, Serah (BKS) per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.147.779.494.793,02 dan Rp.89.965.301.000,00 dapat dirinci sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none"> Tempat Usaha Jl. Kusuma bangsa No. 116 Surabaya Perjanjian No. 511.3/953/402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 dengan PT Sasana Boga Berlaku 30 tahun sejak pembangunan selesai Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga 	Rp	13.490.000.000,00	Rp	13.490.000.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi (Jl. Pasar Turi 21). Sesuai perjanjian kerjasama tanggal 9 Maret 2010 Nomor 180/1096/436.1.2/2010 dengan PT. Gala Bumi Perkasa. Berlaku 25 tahun sejak penyerahan obyek berupa tanah. Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga. Dari aset tanah seluas 43.800 m² senilai Rp.121.720.200.000, yang merupakan milik Pemerintah Kota Surabaya adalah 27.519 m² bila dinilai secara proporsional sebesar Rp.76.475.301.000,00. 	Rp	76.475.301.000,00	Rp	76.475.301.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dalam hal kerjasama penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan PT. Sumber Organik dengan jangka waktu 20 Tahun. 	Rp	57.814.193.793,02	Rp	0,00
Jumlah	Rp	147.779.494.793,02	Rp	89.965.301.000,00

▪ **Bangun, Serah,**

Kelola

31 Desember 2012

31 Desember 2011

(BSK)

Rp.4.969.192.500,00

Rp.4.969.192.500,00

Bangun, Serah, Kelola (BSK) per 31 Desember 2012 sebesar Rp.4.969.192.500,00 merupakan tanah Pemkot Surabaya yang disertakan dalam kerjasama pembangunan Rumah Susun di Lokasi Warugunung

Kecamatan Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas Nomor 648.21.1412.1/402.601/97 dan Nomor Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 dan berakhir sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Bangunan merupakan milik Perum Perumnas sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Pengembalian biaya investasi yang telah dibayar Pemerintah Kota Surabaya kepada Perum Perumnas hingga Desember 2012 sebesar Rp.982.553.992,00.

▪ Kerjasama Operasi (KSO)	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.33.363.395.000,00	Rp.33.363.395.000,00

Kerjasama Operasi (KSO) per 31 Desember 2012 sebesar Rp.33.363.395.000,00 merupakan Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incenerator), perjanjian dengan PT.Unicomindo Perdana Nomor 658.1/11/402.1.02/ 1989 tanggal 26 Juli 1989 yang berlaku selama 9 tahun, sebagaimana telah diadendum dengan kontrak Nomor 658.1/11/402.1.01/1989 tanggal 16 Nopember 1989 yang berlaku selama 8 tahun. Saat ini Incenerator tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak difungsikan serta belum ada penyelesaian pembayaran selisih kurs, angsuran pokok serta beban biaya operasional dan pemeliharaan antara PT.Unicomindo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

▪ Pinjam Pakai	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.0,00	Rp.11.707.563.846,16

Mutasi Pinjam Pakai tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	11.707.563.846,16
Penambahan tahun 2012	Rp	7.986.327.045,60
Pengurangan tahun 2012	Rp	19.693.890.891,76
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	0,00

Penambahan Pinjam Pakai tahun 2012 sebesar Rp.7.986.327.045,60
(lampiran 14)

Pengurangan Pinjam Pakai tahun 2012 sebesar Rp.19.693.890.891,76 merupakan koreksi reklas diakui sebagai asset tetap.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
3. Aset Tak Berwujud	Rp.5.019.695.615,20	Rp3.795.515.975,80

Aset Tak Berwujud senilai Rp.5.019.695.615,20 dan Rp.3.795.515.975,80 merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

▪ Perangkat Lunak/software	Rp 4.474.571.453,80	Rp 3.399.727.887,30
▪ Hak Cipta/Paten/Lisensi	Rp 545.124.161,40	395.788.088,40
Jumlah	Rp 4.892.413.003,20	Rp 3.795.515.975,80

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	3.795.515.975,80
Penambahan Tahun 2012	Rp	1.251.569.639,40
Pengurangan Tahun 2012	Rp	27.390.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	<u>5.019.695.615,20</u>

Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2012 sebesar Rp.1.251.569.639,40 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2012 sebesar Rp888.960.446,00 **(lampiran 15)**
- Belanja modal selain Aset Tak Berwujud setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp.189.566.580,00.
- Belanja barang dan jasa yang bisa diklasifikasikan menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp.18.370.000,00.
- Koreksi atas aset hibah pengadaan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah Dasar dan SMP Negeri berupa antivirus sebesar Rp.154.672.612,00.
- Koreksi pembulatan sebesar Rp.1,40.

Pengurangan Aset Tak Berwujud tahun 2012 sebesar Rp.27.390.000 merupakan koreksi atas SIM Antrian Loker Rawat Jalan sebesar Rp.9.020.000,00 dan koreksi atas antivirus yang telah *out of date* sebesar Rp.18.370.000,00

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
4. Aset Lain-lain	Rp.48.731.944.555,59	Rp.30.873.992.924,00

Aset lain – lain per 31 Desember 2012 dan 2011 mempunyai saldo sebesar Rp.48.731.944.555,59 dan Rp.30.873.992.924,00 dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN		31 Desember 2012		31 Desember 2011
▪ Piutang Banpol Bakesbang Linmas	Rp	660.000.000,00	Rp	645.000.000,00
▪ Inventaris yang akan dihapus – Bagian Perlengkapan	Rp	997.718.404,00	Rp	139.644.979,00
▪ Pembayaran dana bergulir – Dinas Koperasi	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00
▪ Penyertaan Modal PDAM	Rp	30.085.347.945,00	Rp	30.085.347.945,00
▪ Belanja dibayar dimuka	Rp	16.984.878.206,59	Rp	0,00
Jumlah	Rp	48.731.944.555,59	Rp	30.873.992.924,00

- Aset lain-lain berupa piutang Banpol dari Bakesbang Linmas sebesar Rp.645.000.000,00 yang disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat No.24/O.5.10.4/Fd.1/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp.445.000.000,00 dan dua penyetoran tanggal 10 Juli 2007 dengan total sebesar Rp.200.000.000,00. Dan berdasar hasil konfirmasi BPK RI ke Kejaksaan Negeri Surabaya, terdapat pengembalian yang disetor langsung ke Kejaksaan Negeri Surabaya sebesar Rp.15.000.000,00.
- Inventaris yang akan dihapuskan sebesar Rp.997.718.404,00, berupa peralatan dan perlengkapan sekolah yang telah dihibahkan kepada sekolah swasta yang penyerahan fisiknya pada tahun 2008 namun baru dilakukan proses usulan penghapusan TA 2012.
- Saldo sebesar Rp.4.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pembayaran bantuan modal dana bergulir yang salah masuk rekening Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.
- Aset lain-lain sebesar Rp.30.085.347.945,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Pemerintah Kota Surabaya untuk penyertaan modal kepada PDAM, tetapi karena Perda untuk penyertaan modal masih dalam proses penyusunan maka dicatat dalam Aset Lainnya.
- Belanja dibayar dimuka sebesar Rp.16.984.878.206,59 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Rp	6.975.823.359,33	Rp	0,00
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp	9.896.174.653,61	Rp	0,00

Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	112.880.193,65	Rp	0,00
TOTAL	Rp	16.984.878.206,59	Rp	0,00

Jumlah tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan fisik dan pengawasan pembangunan yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 dan Surat Edaran No 903/6984/436.2.2/2012 tanggal 19 Desember 2012 dapat dibayarkan terlebih dahulu dan mendapat perpanjangan 50 hari untuk menyelesaikan pembangunan melewati Tahun Anggaran 2012.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.71.947.416.278,83	Rp.91.330.068.751,76

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang .

Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2012 mempunyai kewajiban sebesar Rp.71.947.416.278,83.

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.71.947.416.278,83	Rp.69.408.572.102,76

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 30.522.494.216,00	Rp 25.312.504.952,00
(2) Utang Bunga	Rp 0,00	Rp 507.208.628,76
(3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 10.960.748.326,00
(4) Utang Jangka Pen-dek lainnya	Rp 41.424.922.062,83	Rp 32.628.110.196,00
Jumlah	Rp 71.947.416.278,83	Rp 69.408.572.102,76

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp. 30.522.494.216,00	Rp.25.312.504.952,00

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut di atas dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
▪ Titipan Pihak Ketiga	Rp 30.522.494.216,00	Rp 25.017.839.440,00
▪ Utang pajak di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 0,00	Rp 294.665.512,00
Jumlah	Rp 30.522.494.216,00	Rp 25.312.504.952,00

Titipan Pihak Ketiga di BUD sebesar **Rp 30.522.494.216,00** terdiri dari :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2012 (Rp)
1	Bongkar reklame	26.105.173.256,00
2	Rusun Waru Gunung	3.976.733,00
3	Partisipasi pengelolaan kebun bibit	160.000.000,00
4	Pelepasan tanah Jalan Kenari	4.231.318.000,00
5	PFK Gaji PNSD Tahun 2012	22.026.227,00
	Jumlah	30.522.494.216,00

- Bongkar reklame sebesar Rp.26.105.173.256,00 merupakan jaminan biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang perhitungan nilai sewa reklame, tahun 2012 terdapat penambahan titipan bongkar reklame sebesar Rp.5.504.654.776,00.
- Partisipasi pengelolaan kebun bibit sebesar Rp.160.000.000,00 berdasarkan perjanjian Nomor 593/19/402.1.04/98 tanggal 17 Pebruari 1998 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Surya Inti Permata. Atas partisipasi pengelolaan kebun bibit terdapat sengketa gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Surya Inti Permata sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat I dan PT. Floraya Indah Sentosa sebagai Tergugat II, saat ini pada tingkat peninjauan kembali.
- Rusun Waru Gunung sebesar Rp3.976.733,00 merupakan titipan pembayaran penghuni rusun di lokasi Waru Gunung sesuai perjanjian dengan Perum

Perumnas No.648.21.1412.1/402.601/97 dan No. Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997.

- Pelepasan tanah Jalan Kenari Rp4.231.318.000,00 merupakan penyetoran uang titipan atas pelepasan ganti rugi tanah di jalan kenari oleh PT. Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
2. Utang Bunga	Rp 0,00	Rp 507.208.628,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga per 31 Desember 2012.

Mutasi Utang Bunga Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	507.208.628,76
Penambahan Tahun 2012	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2012	Rp	507.208.628,76
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	0,00

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 10.960.748.326,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012.

Mutasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	10.960.748.326,00
Penambahan Tahun 2012	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2012	Rp	10.960.748.326,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	0,00

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp. 41.424.922.062,83	Rp.32.628.110.196,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.41.424.922.062,83 dan Rp.32.628.110.196,00 terdiri dari :

▪ Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp	15.277.709.539,25	Rp	8.838.568.039,00
▪ Utang Pemerintah Pusat Inpres No 15/ 1979	Rp	10.238.900,00	Rp	10.238.900,00

▪ Kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004	Rp	3.336.339.500,00	Rp	3.336.339.500,00
▪ Kewajiban akibat beda kurs atas pembayaran termijn 13, 14, 15 dan 16	Rp	15.769.789.528,00	Rp	15.769.789.528,00
▪ Bagi hasil retribusi terminal Purabaya bag Kab Sidoarjo	Rp	5.088.082.959,00	Rp	4.673.174.229,00
▪ Utang pembayaran pengolahan sampah TPA Benowo kepada PT. Sumber Organik – DKP	Rp	716.407.200,00	Rp	0,00
▪ Utang biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya.	Rp	1.226.354.436,58	Rp	0,00
Jumlah	Rp	41.424.922.062,83	Rp	32.628.110.196,00

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.15.277.709.539,25 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2012 belum dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	8.838.568.039,00
Penambahan tahun 2012	Rp	346.487.503.787,24
Pengurangan tahun 2012	Rp	340.048.362.286,99
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	15.277.709.539,25

Utang kepada Pihak Ketiga tersebut terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
▪ Utang Belanja atas tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru (Dinas Pendidikan)	Rp 6.142.896.612,00	Rp 3.008.019.002,00
▪ Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	Rp 910.869.327,00	Rp 960.540.102,00
▪ Utang jasa bank Bulan Januari-Desember 2011 (Dinas Koperasi dan UMKM)	Rp 0,00	Rp 46.845.055,00
▪ Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	Rp 40.260.480,00	Rp 0,00

▪ Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	Rp	2.101.352.173,25	Rp	1.205.675.080,00
▪ Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	Rp	5.614.421.200,00	Rp	3.617.488.800,00
▪ Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)		467.909.747,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	15.277.709.539,25	Rp	8.838.568.039,00

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2012	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2012
1.	Utang Belanja atas Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru (Dinas Pendidikan)	3.008.019.002,00	306.683.534.508,00	303.548.656.898,00	6.142.898.612,00
2.	Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan (Cipta Karya)	960.540.102,00	0,00	49.670.775,00	910.869.327,00
3.	Utang jasa bank Bulan Januari-Desember 2011 (Dinas Koperasi)	46.845.055,00	0,00	46.845.055,00	0,00
4.	Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	0,00	13.520.321.094,83	13.480.060.614,83	40.260.480,00
5.	Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	1.205.675.080,00	20.201.317.237,41	19.305.640.144,16	2.101.352.173,25
6.	Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	3.617.488.800,00	5.614.421.200,00	3.617.488.800,00	5.614.421.200,00
7.	Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)	0,00	467.909.747,00	0,00	467.909.747,00
	Jumlah	8.838.568.039,00	346.487.503.787,24	340.048.362.286,99	15.277.711.539,25

Utang Perhitungan Pihak Ketiga selama tahun 2012 sebesar Rp15.277.711.539,25, dengan perincian sebagai berikut :

- Utang belanja atas Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar Rp6.142.896.612,00.
- Utang belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 910.869.327,00 terdiri atas :
 - a. PT. Daya Guna Permata Rp 143.386.035,00
 - b. PT. Rukun Jaya Madura Group Rp 147.980.587,00
 - c. PT. Rukun Jaya Madura Group Rp 187.473.089,00
 - d. CV. Endah Elok Energi Rp 78.667.680,00
 - e. PT. Royan Jaya Rp 177.563.153,00

f. PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp	25.261.827,00
g. PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp	16.669.651,00
h. CV. Dinamika Raya	Rp	49.644.705,00
i. CV. Dinamika Raya	Rp	34.589.500,00
j. PT. Delta Buana	Rp	49.633.100,00
	Rp	<u>910.869.327,00</u>

- Utang pembelian obat dan alat kesehatan sebesar Rp40.260.480,00 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai 31 Desember 2012 belum dibayar oleh RSUD dr.M Soewandhie.
- Utang pelayanan jamkesmas dan askes RSUD Soewandhie selama tahun 2012 sebesar Rp2.101.352.173,25, terdiri dari pelayanan jamkesmas non kuota sebesar Rp286.570.393,61, pelayanan jamkesmas kuota sebesar Rp1.709.618.210,70, pelayanan askes In Health PT. KAI sebesar Rp48.445.416,81, dan pelayanan pasien umum sebesar Rp56.718.152,13.
- Utang klaim jamkesmas non kuota Dinas Kesehatan tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

- RSUD dr. Soetomo	Rp	4.336.923.000,00
- BKMM	Rp	12.288.700,00
- RSI A Yani	Rp	20.748.900,00
- Al Irsyad	Rp	168.554.300,00
- Darus Syifa	Rp	28.757.400,00
- RSI Jemursari	Rp	78.910.100,00
- RS Mata Undaan	Rp	22.559.600,00
- RS Brawijaya	Rp	26.447.200,00
- Karang Tembok / BP 4	Rp	91.511.900,00
- Bhakti Rahayu	Rp	3.841.500,00
- RS Jiwa Menur	Rp	152.638.200,00
- RSU Haji Surabaya	Rp	446.232.300,00
- RSUD Soewandhie	Rp	220.440.500,00
- RS UNAIR	Rp	<u>4.567.600,00</u>
Jumlah	Rp	5.614.421.200,00

- Utang klaim jamkesda propinsi Dinas Kesehatan selama tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- RSUD dr. Soetomo	Rp	354.855.406,00
--------------------	----	----------------

- BKMM	Rp	1.078.925,00
- RSJ Menur	Rp	44.673.558,00
- RSUD Haji	Rp	25.054.310,00
- BP4	Rp	8.663.179,00
- RS Saiful Anwar	Rp	1.578.758,00
- RSUD Soewandhie	Rp	31.859.733,00
- RS Kusta Kediri	<u>Rp</u>	<u>145.878,00</u>
Jumlah	Rp	467.909.747,00

Utang Pemerintah Pusat sesuai Inpres No.15/1979 sebesar Rp.10.238.900,00 merupakan utang yang digunakan untuk membangun Pasar Blauran.

Utang Belanja Kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp.3.336.339.500,00 merupakan kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Laporan Posisi Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dan Perkembangan Keadaan Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Hutang ini timbul sebagai akibat adanya Perjanjian/Kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 tentang Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor 658.1-676 tanggal 2 September 1989. Terhadap Kontrak diatas telah diadakan Addendum Nomor 658.1/34/402.01.02/1989 tanggal 16 Nopember 1989 jo 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pdt.6/2011 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2011 mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian yang diminta oleh PT. UNICOMINDO PERDANA atas kerugian materiil sebesar Rp.4.137.060.980,00, dengan rincian Pembayaran termijn 15 dan 16 sebesar Rp.3.336.339.500,00 dan beban bunga (moratorium) sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15 dan 16 sebesar Rp.800.721.480,00. Atas putusan PN Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan banding, dan sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada keputusan hukum yang berlaku tetap (inkrah) atas hal tersebut.

Kewajiban akibat beda Kurs sebesar Rp.15.769.789.528,00 dihitung berdasarkan kurs Rp 6.250 / US\$ sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 658.1/183/PUMDA tanggal 18 April 2000 tentang kesepakatan mengenai nilai kurs yang digunakan untuk menghitung kewajiban beda kurs atas sisa pembayaran (termijn 13, 14, 15 dan 16) dan Surat dari PT. Unicomindo kepada Pemerintah Kota Surabaya Nomor SP.10.05.01.2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Permohonan Pembayaran Biaya Beda Kurs termijn 13,14, 15 dan 16 Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Pada tanggal 01 November 2011, PT Unicomindo mengajukan gugatan sebesar Rp.133.075.549.248,00 (terdiri dari piutang Rp137.212.610.228,00 dikurangi Rp.4.137.060.980,00 yang diajukan gugatan dengan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.SBY) kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas kewajiban yang belum terpenuhi sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdiri dari Setoran Hasil Usaha (SHU) ke 15 dan 16, serta beda kurs termin SHU ke 13, 14, 15 dan 16. Atas gugatan PT. Unicomindo tersebut, sudah ada putusan sela tanggal 10 April 2012, yang isinya antara lain "pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas perkara tersebut, karena berdasarkan pertimbangan mejelis hakim penyelesaian melalui panitia arbitrase sebagaimana dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Unicomindo untuk pembayaran beda kurs termin 13, 14, 15, 16.

Bagi hasil retribusi Terminal Purabaya bagian Kabupaten Sidoarjo untuk Bulan Oktober, November, Desember 2008 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp.6.288.082.959,00 terdapat pembayaran Rp.1.200.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 03013/LS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan sisa sebesar Rp.5.088.082.959,00 sampai dengan 31 Desember 2012 belum dibayarkan karena mulai tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009 pengelolaan Terminal Purabaya mengalami kerugian. Hal tersebut berdasarkan kajian Tim Appraisal (Independen) PT. Daksana Intra Swadaya. Total kerugian sampai dengan 30 Juni 2009 mencapai sebesar Rp.15.507.579.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

- b. Pada tahun 2006 merugi sebesar Rp.2.790.246.997,00
- c. Pada tahun 2007 merugi sebesar Rp.4.131.287.925,00
- d. Pada tahun 2008 merugi sebesar Rp.5.561.460.052,00
- e. Per juni 2009 merugi sebesar Rp.3.024.584.329,00.

Utang Biaya Pengolahan Sampah TPA Benowo merupakan utang untuk periode 28-31 Desember 2012. Hal ini dikarenakan adanya Surat Perjanjian Kerjasama

Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor $\frac{\cdot / / \cdot \cdot /}{/ / /}$ tanggal 08 Agustus 2012 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik, dimana serah terima obyek kerjasama telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Obyek Kerjasama Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor $\frac{\cdot / / \cdot \cdot /}{/ / /}$ tanggal 23 Oktober 2012.

Utang biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp1.226.354.436,58, merupakan salah satu komponen kewajiban dalam percepatan pembayaran yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Penutupan atas perjanjian penerusan pinjaman No.SLA-764/DP3/1994 tanggal 14 September 1994 akan diproses oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setelah Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembayaran biaya prepayment premium dimaksud.

B. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.0,00	Rp.21.921.496.649,00

Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya atau diharapkan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1. Utang Kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.0,00	Rp.21.921.496.649,00

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 sebesar Rp.0,00, karena telah dilakukan percepatan pelunasan pada tanggal 14 November 2012.

Mutasi Utang Jangka Panjang selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2012	Rp	21.921.496.649,00
Penambahan tahun 2012	Rp	0,00
Pengurangan tahun 2012	Rp	21.921.496.649,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2012	Rp	0,00

Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan pelunasan atas utang kepada Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994 sebesar Rp21.921.496.652,00.

Atas percepatan pelunasan utang tersebut terdapat surat balasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S – 2100 / PB.4 / 2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran perjanjian penerusan pinjaman Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya No SLA-764/DP3/1994 yang dikenakan oleh IBRD sebesar USD126,611.03 dengan konversi kurs jual Bank Indonesia per 20 Nopember 2012 adalah kurs sebesar Rp9.686,00 per USD1 atau setara dengan Rp1.226.354.436,58. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penutupan atas perjanjian penerusan pinjaman No SLA-764/DP3/1994 tanggal 14 Desember 1994 akan diproses setelah Pemkot Surabaya melakukan pembayaran biaya prepayment premium.

III. EKUITAS DANA	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp35.286.876.740.315,97	Rp33.349.756.568.970,67

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp35.286.876.740.315,97 dan Rp.33.349.756.568.970,67 yang terdiri dari :

A. Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp1.073.675.575.173,77	Rp805.694.096.427,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 dan 2012. Ekuitas dana lancar terdiri dari :

NO.	URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	805.419.392.938,25	502.999.263.251,27
2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	245.871.790,00	125.737.773,28
3.	Cadangan Piutang	254.193.769.655,86	300.970.499.581,57
4.	Cadangan Persediaan	55.241.462.852,49	45.694662.972,01
5.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(41.424.922.062,83)	(44.096.067.150,76)
	JUMLAH	1.073.675.575.173,77	805.694.096.427,37

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp805.419.392.938,25	Rp502.999.263.251,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp805.419.392.938,25 berasal dari realisasi Pendapatan sebesar Rp4.634.301.938.653,61 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja sebesar Rp4.299.150.223.080,63 ditambah dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp470.267.677.365,27.

SILPA milik Pemkot Surabaya sebesar Rp805.419.392.938,25, terdiri dari:

- a. Kas di Kasda sebesar Rp771.872.216.448,45
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan sebesar Rp699.959.598,00
- c. BLUD RSUD dr.M. Soewandhie sebesar Rp32.847.216.891,80

2. Pendapatan Yang Ditangguhkan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp245.871.790,00	Rp125.737.773,28

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan lawan Akun dari Kas di Bendahara Penerimaan.

3. Cadangan Piutang	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp254.193.769.655,86	Rp300.970.499.581,57

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp254.193.769.655,86 merupakan lawan Akun Piutang bersih sebesar Rp254.193.769.655,86.

4. Cadangan Persediaan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp55.241.462.852,49	Rp45.694.662.972,01

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011, yang merupakan lawan akun Persediaan.

5. Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp(41.424.922.062,83)	Rp(44.096.067.150,76)

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah ini merupakan lawan dari kewajiban jangka pendek, kecuali Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

B. EKUITAS DANA INVESTASI	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp34.213.201.165.142,20	Rp32.544.062.472.543,30

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 dan 2011. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

NO.	URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.697.206.373.389,32	906.946.038.066,74
2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	32.276.066.905.289,07	31.484.362.969.879,60
3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	239.927.886.463,81	174.674.961.245,96
4.	Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	-	(21.921.496.649,00)
	JUMLAH	34.213.201.165.142,20	32.544.062.472.543,30

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp1.697.206.373.389,32	Rp906.946.038.066,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah ini merupakan lawan dari Akun Investasi Jangka panjang Non Permanen bersih sebesar Rp10.750.000,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp1.697.195.623.389,32.

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp.32.276.066.905.289,07	Rp.31.484.362.969.879,06

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Tetap yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	Rp239.927.886.463,81	Rp174.674.961.245,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Lainnya

terdiri atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain.

4. Dana yang Harus	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Disediakan untuk	<u>Rp0,00</u>	<u>(Rp21.921.496.649,00)</u>
Pembayaran Utang		
Jangka Panjang		

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah ini merupakan lawan Akun dari Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang Kepada Pemerintah Pusat.

Dengan demikian per 31 Desember 2012 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp35.358.824.156.594,80. Jumlah ini merupakan jumlah dari Kewajiban total Rp71.947.416.278,83 dan Ekuitas Dana sebesar Rp35.286.876.740.315,97.

(II). PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

I. PENDAPATAN

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2012 dan 2011 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun anggaran 2012 dan 2011 sebesar Rp.4.634.301.938.653,61 dan Rp.3.759.034.427.310,72 dari target pendapatan sebesar Rp.4.693.361.549.064,00 dan Rp.3.971.688.604.325,00 atau terealisasi pada tahun 2012 sebesar 98,74% dan pada tahun 2011 terealisasi sebesar 94,64%. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH /	
		Anggaran	Realisasi 2012	Realisasi 2011	(BERKURANG)	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = (4-3)	7
1	PENDAPATAN	4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61	3.759.034.427.310,72	(59.059.610.410,39)	98,74
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.341.265.681.882,00	2.279.613.848.832,61	1.886.514.301.580,72	(61.651.833.049,39)	97,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.909.562.850.000,00	1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27	(56.585.213.113,45)	97,04
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	203.721.977.378,00	183.482.993.434,78	209.834.317.887,85	(20.238.983.943,22)	90,07
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	97.652.321.173,00	97.696.057.372,81	75.962.115.305,92	43.736.199,81	100,04
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.328.533.331,00	145.457.161.138,47	112.359.720.633,68	15.128.627.807,47	111,61
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.352.095.867.182,00	2.354.670.621.821,00	1.871.795.125.730,00	2.574.754.639,00	100,11
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.409.496.932.932,00	1.433.067.691.897,00	963.419.947.354,00	23.570.758.965,00	101,67
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	283.859.542.304,00	299.746.830.080,00	225.590.330.815,00	15.887.287.776,00	105,60
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	10.784.302.628,00	18.467.773.817,00	8.692.232.539,00	7.683.471.189,00	171,25
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.061.625.528.000,00	1.061.625.528.000,00	679.262.759.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	53.227.560.000,00	53.227.560.000,00	49.874.625.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	309.819.125.000,00	309.819.125.000,00	386.951.310.320,00	0,00	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	309.819.125.000,00	309.819.125.000,00	386.951.310.320,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	632.779.809.250,00	611.783.804.924,00	521.423.868.056,00	(20.996.004.326,00)	96,68
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	607.033.790.222,00	594.448.090.669,00	509.508.087.368,00	(12.585.699.553,00)	97,93
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	23.066.440.000,00	16.777.000.000,00	10.364.000.000,00	(6.289.440.000,00)	72,73
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.679.579.028,00	558.714.255,00	1.551.780.688,00	(2.120.864.773,00)	20,85
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	17.468.000,00	725.000.000,00	17.468.000,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	17.468.000,00	125.000.000,00	17.468.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61	3.759.034.427.310,72	(59.059.610.410,39)	98,74

Rekapitulasi Pendapatan daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 dan Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi 2012	Realisasi 2011
1	Dinas Kesehatan	20.012.506.700,00	22.607.290.561,00	19.573.037.298,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	43.000.000.000,00	49.417.253.321,19	35.750.681.134,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	15.000.000.000,00	9.826.180.388,29	5.025.953.188,91
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	-	18.920.780,00	438.888.379,00
5	Dinas Kebaka ran	1.723.117.174,00	1.225.409.953,00	1.755.553.278,00
6	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	39.393.807.110,00	40.467.517.999,88	31.251.706.544,80
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	61.788.826.497,00	76.752.021.997,00	91.265.265.755,00
8	Dinas Perhubungan	37.084.968.620,00	30.643.203.793,00	31.612.362.780,00
9	Badan Lingkungan Hidup	7.500.000.000,00	7.625.197.441,20	7.479.458.535,00
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	30.940.641.116,00	14.562.091.366,04	23.544.764.965,72
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	980.350.000,00	1.299.545.000,00	2.446.107.500,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	16.500.000,00	13.174.996,00	229.558.333,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata	2.957.199.640,00	2.590.941.520,00	2.617.618.348,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	900.000.000,00	1.251.051.319,00	624.460.000,00
15	BagianPerlengkapan	1.010.800.000,00	1.110.344.000,00	701.706.900,00
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	4.430.674.519.697,00	4.374.465.273.208,01	3.504.247.343.345,60
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	378.312.510,00	378.312.510,00	454.856.825,00
18	Badan Perpustakaan dan Arsip	-	48.208.500,00	15.104.200,00
J U M LAH		4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61	3.759.034.427.310,72

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2012 sebesar Rp.2.341.265.681.882,00 dan tahun 2011 sebesar Rp.2.139.625.575.460,07 terealisasi sebesar Rp.2.279.622.816.832,61 atau 97,37% pada tahun 2012 dan terealisasi sebesar Rp.1.887.112.473.639,79 atau 88,20% pada tahun 2011, terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.1.909.562.850.000,00 dan Rp.1.691.550.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.1.852.977.636.886,55 dan Rp.1.488.358.147.753,27 atau sebesar 97,04% dari target tahun 2012 dan sebesar 87,99% dari target tahun 2011. Secara terinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun 2012 dan 2011 bersumber dari:

Kelompok Pajak Daerah	2012	2011
Pajak Hotel	Rp 126.540.958.475,55	Rp 108.205.704.969,00
Pajak Restoran	Rp 172.882.689.664,00	Rp 131.138.493.688,00
Pajak Hiburan	Rp 35.403.716.528,00	Rp 29.896.451.597,00
Pajak Reklame	Rp 117.601.450.951,00	Rp 90.232.362.728,38
Pajak Penerangan Jalan	Rp 224.323.267.329,00	Rp 192.089.354.040,00
Pajak Parkir	Rp 27.286.524.344,00	Rp 21.841.038.427,00
Pajak Air Bawah Tanah	Rp 1.297.629.300,00	Rp -
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 572.292.265.076,00	Rp 498.640.108.489,44
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 575.349.135.219,00	Rp 416.314.633.814,45
Jumlah	Rp 1.852.977.636.886,55	Rp 1.488.358.147.753,27

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Kelompok Pajak Daerah	2012	2011
	Pajak Hotel		
1	Hotel Bintang Lima	57.235.884.266,00	48.498.946.295,00
2	Hotel Bintang Empat	34.730.125.992,00	33.161.633.048,00
3	Hotel Bintang Tiga	16.318.867.632,00	13.250.126.618,00
4	Hotel Bintang Dua	1.886.799.587,55	854.956.285,00
5	Hotel Bintang Satu	1.040.981.616,00	866.991.402,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	517.395.754,00	124.625.292,00
7	Hotel Non Bintang	14.810.903.628,00	11.448.426.029,00
	Jumlah	126.540.958.475,55	108.205.704.969,00
	Pajak Restoran		
1	Restoran	163.766.258.232,00	128.035.607.367,00
2	Katering	9.116.431.432,00	3.102.886.321,00
	Jumlah	172.882.689.664,00	131.138.493.688,00
	Pajak Hiburan		
1	Tontonan Film / Bioskop	14.358.470.840,00	10.258.102.550,00
2	Hiburan Non Bioskop	18.116.174.313,00	16.938.614.096,00
3	Hiburan Insidentil	2.929.071.375,00	2.699.734.951,00
	Jumlah	35.403.716.528,00	29.896.451.597,00
	Pajak Reklame		
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	102.571.767.051,00	73.759.389.678,38
2	Reklame Insidentil	15.029.683.900,00	16.472.973.050,00
	Jumlah Pajak Reklame	117.601.450.951,00	90.232.362.728,38
	Pajak Penerangan Jalan		
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	223.928.718.954,00	191.561.854.077,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	394.548.375,00	527.499.963,00
	Jumlah	224.323.267.329,00	192.089.354.040,00
	Pajak Parkir		
1	Pajak Parkir	27.286.524.344,00	21.841.038.427,00
	Jumlah	27.286.524.344,00	21.841.038.427,00
	Pajak Air Tanah		
1	Pajak Air Tanah	1.297.629.300,00	0,00
	Jumlah	1.297.629.300,00	0,00
	Pajak Bumi Bangunan		
1	Pajak bumi Bangunan	572.292.265.076,00	498.640.108.489,44
	Jumlah	572.292.265.076,00	498.640.108.489,44

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	575.349.135.219,00	416.314.633.814,45
Jumlah		575.349.135.219,00	416.314.633.814,45
Total		1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27

b) Retribusi Daerah

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 Ditargetkan sebesar Rp.203.721.977.378,00 dan Rp.265.797.243.579,00, terealisasi sebesar Rp.183.482.993.434,78 dan Rp. Rp.209.834.317.887,85 atau terealisasi sebesar 90,07% dari target tahun 2012 dan sebesar 78,94% dari target tahun 2011. Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

Kelompok Retribusi	2012	2011
Reribusi Jasa Umum	Rp 70.805.253.043,90	Rp 108.689.088.799,05
Retribusi Jasa Usaha	Rp 45.500.413.898,88	Rp 39.709.531.900,80
Retribusi Perijinan Tertentu	Rp 67.177.326.492,00	Rp 61.435.697.188,00
Jumlah	Rp 183.482.993.434,78	Rp 209.834.317.887,85

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Kelompok Retribusi Daerah	2012	2011
Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.981.722.000,00	15.307.167.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	12.897.134.841,04	22.800.700.465,72
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.299.545.000,00	2.446.107.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.633.380.000,00	607.595.000,00
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.301.939.500,00	11.153.519.500,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12.693.725.200,00	12.286.136.900,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.225.409.953,00	1.755.553.278,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.021.152.241,00	37.966.032.982,00
9	Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	7.721.267.783,86	4.235.326.173,33
10	Retribusi Penyedotan Kakus	29.976.525,00	130.949.500,00
Jumlah		70.805.253.043,90	108.689.088.799,05
Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	378.312.510,00	454.856.825,00
2	Retribusi Terminal	6.806.094.733,00	6.336.819.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.168.329.000,00	1.178.881.500,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.397.011.520,00	2.317.068.098,00
5	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	33.353.781.444,41	27.556.081.533,61
6	Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	582.923.911,47	499.938.815,19
7	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	193.930.000,00	300.550.250,00
8	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	47.830.000,00	37.670.000,00
9	Pemakaian Gedung Serba Guna	553.280.000,00	583.257.500,00
10	Uang atas Pemakaian Tanah	18.920.780,00	438.888.379,00

11	Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	0,00	5.520.000,00
Jumlah		45.500.413.898,88	39.709.531.900,80
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	58.900.797.826,00	53.281.732.773,00
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	7.603.413.306,00	7.479.458.535,00
3	Retribusi Izin Trayek	673.115.360,00	657.005.880,00
4	Retribusi Ijin Jasa Konstruksi	0,00	17.500.000,00
Jumlah		67.177.326.492,00	61.435.697.188,00
Total		183.482.993.434,78	209.834.317.887,85

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.97.652.321.173,00 dan Rp.77.019.175.680,00, terealisasi sebesar Rp.97.696.057.372,81 dan Rp. 75.962.115.305,92 atau sebesar 100,04% dari target tahun 2012 dan sebesar 98,63% dari target tahun 2011. Rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2012	2011
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	Rp 94.589.069.262.81	Rp 71.785.523.872.92
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)	Rp 2.797.001.910.00	Rp 3.926.591.433.00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	Rp 309.986.200.00	Rp 250.000.000.00
Jumlah	Rp 97.696.057.372.81	Rp 75.962.115.305.92

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2012	2011
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD			
1	Bagian Laba PDAM	73.893.930.777,00	50.002.870.000,00
2	Bagian laba PD Pasar Surya	952.646.450,00	447.933.805,00
3	Bagian Laba PD Rumah Potong Hew an	424.910.042,00	320.055.291,00
4	Bagian Laba PT.Bank Jatim	18.005.208.523,81	20.995.680.776,92
5	Bagian Laba PT. BPR Jatim	14.190.000,00	18.984.000,00
6	Bagian laba PT. Surya Artha Utama	1.298.183.470,00	0,00
Jumlah		94.589.069.262,81	71.785.523.872,92
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN			
1	Bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2.797.001.910,00	3.926.591.433,00
Jumlah		2.797.001.910,00	3.926.591.433,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta			
1	Bagian Laba PT. STAR/ Taman Remaja Surabaya	309.986.200,00	250.000.000,00
Jumlah		309.986.200,00	250.000.000,00
Total		97.696.057.372,81	75.962.115.305,92

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.130.328.533.331,00 dan Rp. 105.259.156.201,07, terealisasi sebesar Rp.145.457.161.138,47 dan Rp.112.359.720.633,68 atau sebesar 111,61% dari target tahun 2012 dan sebesar 106,74% dari target tahun 2011, dapat dirinci lebih lanjut atas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2012	2011
Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp 1.094.508.000,00	Rp 636.500.900,00
Penerimaan Jasa Giro (Bank Jatim)	Rp 8.534.521.351,74	Rp 7.304.298.879,85
Bunga Deposito (Bank Jatim)	Rp 41.143.835.616,08	Rp 32.043.150.684,57
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bag.Perengkapan)	Rp 337.590.319,00	Rp 65.206.000,00
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 5.604.710.875,00	Rp 1.961.572.562,00
Pendapatan Denda Pajak	Rp 187.500.000,00	Rp -
Pendapatan Denda Retribusi	Rp 45.396.533,20	Rp -
Hasil Eksekusi Atas Jaminan	Rp 1.081.840.227,00	Rp 821.811.346,00
Pendapatan dari Pengembalian (Lampiran 16)	Rp 528.745.241,00	Rp 635.537.870,00
Penerimaan lain-lain	Rp 37.481.259.654,26	Rp 33.140.961.256,57
Pendapatan BLUD-RSUD Dr. Soewandhie	Rp 49.417.253.321,19	Rp 35.750.681.134,69
Jumlah	Rp 145.457.161.138,47	Rp 112.359.720.633,68

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2012	2011
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
1	Pelepasan Hak atas Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1.094.508.000,00	636.500.900,00
Jumlah		1.094.508.000,00	636.500.900,00
Penerimaan jasa Giro			
1	Jasa Giro Kas Daerah	7.837.608.928,10	4.667.172.976,64
2	Jasa Giro Pemegang kas	553.519.034,00	2.427.868.011,23
3	Jasa Giro BOPDA	143.393.389,64	209.257.891,98
Jumlah		8.534.521.351,74	7.304.298.879,85
Pendapatan Bunga Deposito			
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim	41.143.835.616,08	32.043.150.684,57
Jumlah		41.143.835.616,08	32.043.150.684,57
Tuntutan ganti Kerugian Daerah			
1	Kerugian Uang Daerah	321.754.319,00	0,00
2	Kerugian Barang Daerah	15.836.000,00	65.206.000,00
Jumlah		337.590.319,00	65.206.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pendidikan	57.255.334,00	77.900.807,00

2	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesehatan	469.582.049,00	307.389.778,00
3	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	1.598.753.444,00	614.348.855,00
4	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	32.333.223,00	23.018.247,00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penataan Ruang	2.640.066.441,00	611.834.153,00
6	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	984.800,00
7	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perhubungan	142.473.205,00	15.625.955,00
8	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	6.300.422,00	52.483.524,00
9	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	20.427.757,00
10	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Sosial	0,00	1.649.835,00
11	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.593.735,00	2.395.852,00
12	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penanaman Modal	0,00	524.262,00
13	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	465.692.162,00	9.438.663,00
14	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemerintahan Umum	0,00	93.072.202,00
15	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Komunikasi dan Informatika	416.351,00	83.188.335,00
16	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
17	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pertanian	2.439.294,00	47.289.537,00
18	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
19	Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kehutanan	5.141.580,00	0,00
	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan	22.803.456,00	0,00
	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perdagangan	18.905.920,00	0,00
	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perlengkapan	131.954.259,00	0,00
Jumlah		5.604.710.875,00	1.961.572.562,00
Pendapatan Denda Pajak			
1	Pendapatan BPHTB	187.500.000,00	0,00
Jumlah		187.500.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi			
1	Denda Retribusi Jasa Umum	26.100,00	0,00
2	Denda Retribusi Perizinan Tertentu	45.370.433,20	0,00
Jumlah		45.396.533,20	0,00
Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan			
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	1.081.840.227,00	821.811.346,00
Jumlah		1.081.840.227,00	821.811.346,00
Pendapatan dari Pengembalian			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	528.745.241,00	635.537.870,00
Jumlah		528.745.241,00	635.537.870,00
Penerimaan Lain-Lain			
1	Penerimaan Gedudung Wanita Chandra Kencana	193.800.000,00	105.565.000,00

2	Penerimaan Lain-Lain	6.570.660.248,91	20.994.286.177,62
3	Pengembalian Gaji Tunjangan	0,00	8.217.100,00
4	Kolam Renang Brantas	0,00	0,00
5	Rumah Peristirahatan	875.000,00	2.075.000,00
6	Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan	1.035.304.602,92	3.203.207.253,14
7	Sewa Gedung Jalan Walikota Mustajab nomor 84	129.214.000,00	160.236.000,00
8	Penerimaan Bunga dana Bergulir dari Koperasi dan Sektor Informal	13.174.996,00	229.558.333,00
9	Penerimaan Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte Bis	2.231.142.971,00	1.912.132.300,00
10	Penerimaan Lain yang belum diketahui informasi jenis pendapatannya	602.325,00	432.797.683,23
11	Sewa Bangunan dan Tanah Gedung Siola	1.212.631.314,00	0,00
12	Sewa Bangunan Tunjungan Center	1.740.960.000,00	0,00
13	Penerimaan dari PT. ASKES	6.730.481.165,43	5.056.496.813,58
14	Pendapatan dari Gelora 10 Nopember	511.807.000,00	576.335.000,00
15	Pendapatan dari Hasil Kontribusi Bangunan Guna Serah (BOT) Pasar Turi	4.414.893.640,00	0,00
16	Sewa Lapangan Hocky/Softball/Baseball	10.600.000,00	10.455.000,00
17	Sewa stadion Bung Tomo	359.060.000,00	0,00
18	Penerimaan Pemakaian Sewa Rumah susun	399.543.300,00	360.346.300,00
19	Penerimaan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di kuasai Pemkot	86.959.535,00	58.084.115,00
20	sewa BTS Mobile	11.866.524,00	16.064.981,00
21	Penerimaan Sanksi Administrasi Bahan Pustaka	21.223.500,00	15.104.200,00
22	Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Bangunan	11.806.459.532,00	0,00
Jumlah		37.481.259.654,26	33.140.961.256,57
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			
	Pendapatan BLUD - RSUD Dr. Soewandhie	49.417.253.321,19	35.750.681.134,69
Jumlah		49.417.253.321,19	35.750.681.134,69
Total		145.457.161.138,47	112.359.720.633,68

Penerimaan Lain-lain sebesar Rp.37.481.259.654,26 yang sudah diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.37.480.657.329,26 (**Lampiran 17**) dan sisanya belum diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.602.325,00(**Lampiran 18**).

2. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2012 dan tahun 2011 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.2.352.095.867.182,00 dan Rp.1.832.063.028.865,00, terealisasi sebesar Rp.2.354.670.621.821,00 dan Rp.1.871.795.125.730,00 atau terealisasi sebesar 100,11% dari target tahun 2012 dan sebesar 102,17% dari target tahun 2011.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat uraikan sebagai berikut :

- Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.283.859.542.304,00 dan Rp.221.518.180.068,00, terealisasi sebesar Rp.299.746.830.080,00 dan Rp.225.590.330.815,00 atau sebesar 105,60% dari target tahun 2012 dan sebesar 101,84% dari target tahun 2011. yang dapat dirinci lebih lanjut atas pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	2012	2011
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 25.324.300.633.00	Rp 41.788.454.750.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 481.469.231.00	Rp -
Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, 29, 21	Rp 252.390.887.869.00	Rp 163.995.617.981.00
Cukai Hasil Tembakau	Rp 21.550.172.347.00	Rp 19.806.258.084.00
Jumlah	Rp299.746.830.080.00	Rp225.590.330.815.00

- Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.10.784.302.628,00 dan Rp.5.599.253.058,00, terealisasi sebesar Rp.18.467.773.817,00 dan Rp.8.692.232.539,00 atau sebesar 171,25% dari target tahun 2012 dan 155,24% dari target tahun 2011 yang ditetapkan yang bersumber dari :

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2012	2011
Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 353.986.759,00	Rp 315.914.627,00
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Rp 7.215.326,00	Rp 13.954.798,00
Pungutan Hasil Perikanan	Rp 343.986.219,00	Rp 261.048.242,00
Pertambangan Minyak Bumi	Rp 14.776.052.218,00	Rp 7.830.508.597,00
Pertambangan Gas Bumi /Gas Alam	Rp 2.986.533.295,00	Rp 270.806.275,00
Iuran hak Kuasa Pertambangan	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 18.467.773.817,00	Rp 8.692.232.539,00

- Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.1.061.625.528.000,00 dan Rp.679.450.127.000,00, terealisasi sebesar

Rp.1.061.625.528.000,00 dan Rp.679.262.759.000,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2012 dan sebesar 99,97% dari target tahun 2011.

- Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.53.227.560.000,00 dan Rp.66.499.500.000,00, terealisasi sebesar Rp.53.227.560.000,00 dan Rp.49.874.625.000,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2012 dan 75% dari target tahun 2011.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Dana Penyesuaian

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.309.819.125.000,00 dan Rp.356.905.561.800,00, terealisasi sebesar Rp.309.819.125.000,00 dan Rp.386.951.310.320,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2012 dan 100% dari target tahun 2011. yang merupakan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dana Penyesuaian	2012	2011
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2012	Rp 7.812.000.000,00	Rp 10.083.000.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2012	Rp 302.007.125.000,00	Rp 213.022.713.320,00
Dana Penyesuaian DPPIP	Rp -	Rp -
Dana Penyesuaian DPIP	Rp -	Rp -
Dana Penyesuaian untuk Dana BOSNAS SD dan SMP Negeri/Swasta	Rp -	Rp 158.237.700.000,00
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	Rp -	Rp 5.607.897.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp 309.819.125.000,00	Rp 381.343.413.320,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi

- Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.607.033.790.222,00 dan Rp.490.013.627.911,00, terealisasi sebesar Rp.594.448.090.669,00 dan Rp.509.508.087.368,00 atau sebesar 97,93% dari target tahun 2012 dan 103,98% dari target tahun 2011.

Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi	2012	2011
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 190.134.343.632.00	Rp 175.873.740.308.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 229.282.433.756.00	Rp 224.423.979.609.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 173.590.773.964.00	Rp 107.780.987.601.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Rp -	Rp 93.091.037.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp 1.405.592.380.00	Rp 1.289.775.531.00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	Rp 34.946.937.00	Rp 46.513.282.00
Jumlah	Rp 594.448.090.669.00	Rp 509.508.087.368.00

- Bantuan Keuangan dari Provinsi

Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.23.066.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.777.000.000,00 Sedangkan pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.16.897.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.364.000.000,00 atau sebesar 72,73% dari target tahun 2012 dan sebesar 61,34% dari target tahun 2011.

Bantuan Keuangan dari Provinsi	2012	2011
Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 23.066.440.000.00	Rp 10.314.000.000.00
Kegiatan HUT 65 Provinsi	Rp -	Rp 50.000.000.00
Program Kopwan 2011	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 23.066.440.000.00	Rp 10.364.000.000.00

- Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi

Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.2.679.579.028,00 dan Rp.2.679.579.028,00, terealisasi sebesar Rp.558.714.255,00 dan Rp.1.551.780.688,00 atau sebesar 20,85% dari target tahun 2012 dan 57,91% dari target tahun 2011, yang terdiri dari pendapatan:

Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	2012	2011
Ijin Memperpanjang Tenaga Asing	Rp -	Rp -
RP3HH	Rp -	Rp 1.330.032.938.00
TERA	Rp 558.714.255.00	Rp 221.747.750.00
Jumlah	Rp 558.714.255.00	Rp 1.551.780.688.00

d. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2012 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan. Namun terdapat realisasi sebesar Rp.17.468.000,00 dari DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi).

II. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 dan Rp. 3.753.710.587.890,80 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp.5.158.264.830.659,00 dan Rp5.195.102.211.727,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.859.114.607.578,37 dan Rp. 1.441.391.623.836,20 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 83,34 % pada tahun 2012 dan sebesar 72,25 % pada tahun 2011. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Reallisasi 2011
		Anggaran	Realisasi 2012	(Rp)	%	
1	2	3	4	6 = (4-3)	7	5
2	BELANJA DAERAH	5.158.264.830.659,00	4.299.150.223.080,63	(859.114.607.578,37)	83,34	3.753.710.413.890,80
2,1	Belanja Operasi	3.960.920.145.441,00	3.382.179.570.371,63	(578.740.575.069,37)	85,39	3.210.441.999.401,80
2.1.1	Belanja Pegawai	2.130.113.763.032,00	1.908.805.098.308,58	(221.308.664.723,42)	89,61	1.715.112.525.938,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.525.064.821.291,00	1.210.639.630.539,86	(314.425.190.751,14)	79,38	1.164.991.205.503,80
2.1.3	Belanja Bunga	5.646.336.544,00	2.223.619.192,00	(3.422.717.352,00)	39,38	2.903.307.374,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	297.150.224.574,00	258.999.514.331,19	(38.150.710.242,81)	87,16	325.744.017.586,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.045.000.000,00	867.500.000,00	(177.500.000,00)	83,01	1.046.730.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan	1.900.000.000,00	644.208.000,00	(1.255.792.000,00)	33,91	644.213.000,00
2,2	Belanja Modal	1.182.671.510.989,00	912.716.142.120,00	(269.955.368.869,00)	77,17	543.111.645.989,00
2.2.1	Belanja Tanah	206.004.210.461,00	136.872.202.550,00	(69.132.007.911,00)	66,44	100.486.009.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	355.177.065.651,00	282.966.010.775,00	(72.211.054.876,00)	79,67	179.104.771.991,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	338.972.036.272,00	268.319.373.162,00	(70.652.663.110,00)	79,16	157.938.496.455,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	267.816.802.805,00	211.703.906.887,00	(56.112.895.918,00)	79,05	102.454.759.850,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	13.721.705.550,00	11.965.688.300,00	(1.756.017.250,00)	87,20	1.602.454.313,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya/Aset Tak	979.690.250,00	888.960.446,00	(90.729.804,00)	90,74	1.525.154.380,00

2,3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.054.510.589,00	(6.945.489.411,00)	30,55	156.768.500,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.054.510.589,00	(6.945.489.411,00)	30,55	156.768.500,00
2,4	Transfer	4.673.174.229,00	1.200.000.000,00	3,00	25,68	0,00
2.4.1	Transfer bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	4.673.174.229,00	1.200.000.000,00	(3.473.174.229,00)	25,68	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.3.960.920.145.441,00 dan Rp.3.901.683.406.643,00 direalisasikan sebesar Rp.3.382.179.570.371,63 atau 85,38 % dan Rp.3.210.441.999.401,90 atau 80,97%

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.2.130.113.763.032,00 dan Rp.1.965.502.958.749,00, terealisasi Rp.1.908.805.098.308,58 dan Rp.1.715.112.525.938,00 atau sebesar 89,61% dari target tahun 2012 dan sebesar 87,26% dari target tahun 2011. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.401.718.035.396,00 dan Rp.408.034.753.444,00 terealisasi sebesar Rp.307.548.751.751,58 dan Rp. 337.939.443.824,00 atau sebesar 76,55% dari target tahun 2012 dan sebesar 82,82% dari target tahun 2011. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.1.728.395.727.636,00 dan Rp.1.557.468.205.305,00 direalisasikan sebesar Rp.1.601.256.346.557,00 atau sebesar 92,64% dari target yang ditetapkan dan Rp. 1.377.173.082.114,00 atau sebesar 88,42% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 sebesar Rp.1.908.805.098.308,58 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai Tidak Langsung	
Gaji Pokok PNS/Uang representasi	916.002.697.656,00
Tambahan Penghasilan	319.578.755.315,00
B. Penerimaan Lainnya Pimp & angg DPRD serta KDHWKD	6.060.780.000,00
B. Penghasilan lainnya (guru PNS)	306.683.534.508,00
Insentif Pemungutan Pajak	52.930.579.078,00
Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	1.601.256.346.557,00
Belanja Pegawai Langsung	
Honorarium PNS	1.686.790.000,00
Honorarium Non PNS	68.092.276.387,00
Uang lembur	47.401.872.979,00
Penunjang kinerja kegiatan	119.417.512.039,00
Honorarium Pengelola Keg BOPDA	65.484.902.986,58
Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	5.465.397.360,00
Jumlah Belanja Pegawai Langsung	307.548.751.751,58
Jumlah Belanja Pegawai	1.908.805.098.308,58

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.1.525.064.821.291,00 dan Rp. 1.485.269.598.540,00 terealisasi Rp.1.210.639.630.539,86 atau sebesar 79,38% dan Rp.1.164.991.205.503,80 atau sebesar 78.43% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2012 sebesar Rp.1.210.639.630.539,86 adalah sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
Belanja Bahan Pakai Habis	145.823.920.530,09
Belanja Bahan / Material	36.007.676.265,20
Belanja Jasa Kantor	273.427.295.091,00
Belanja Premi Asuransi	257.842.683,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	26.439.027.748,86
Belanja Sewa Rumah / Gedung	7.783.975.520,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.071.158.658,00
Belanja Sewa Alat Berat	1.913.047.900,00
Belanja Sewa Perlengkapan	7.697.275.457,33
Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan	66.192.500,00
Belanja Makan Minum	74.838.065.635,00
Belanja Pakaian dan Atributnya	12.351.789.821,00
Belanja Perjalanan Dinas	36.992.617.219,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.842.000.000,00
Belanja Kursus/Diklat/Bintek PNS	16.042.527.098,00
Belanja Jasa Konsultansi	50.390.462.804,43
Belanja Pemeliharaan	161.089.762.869,00
Belanja Transport Lokal	51.004.777.500,00

Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	1.926.586.255,00
Belanja Pemberian Hadiah	3.786.821.505,00
Belanja Jasa Operasional Kegiatan	165.620.679.926,09
Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA	112.243.695.372,86
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat	17.022.432.181,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.210.639.630.539,86

c. Belanja Bunga

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.5.646.336.544,00 dan Rp. 7.102.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.223.619.192,00 atau terealisasi sebesar 39,38% pada tahun 2012 dan Rp.2.903.307.374,00 atau terealisasi sebesar 40,88% pada tahun 2011 dari target yang ditetapkan yang merupakan Belanja Bunga untuk pinjaman Loan IBRD Nomor 3726 Nomor SLA 764 DP3 1994.

d. Belanja Hibah (Lampiran 19)

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.297.150.224.574,00 dan Rp.437.308.349.354,00 direalisasikan sebesar Rp.258.999.514.331,19 atau 87,16% dan Rp. 325.744.017.586,00 atau 74,49% dari target yang ditetapkan, digunakan untuk :

Belanja Hibah	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	0,00	287.325.955.045,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	38.418.062.541,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.598.070.383,70	0,00
Belanja Hibah kepada Masyarakat	233.031.335.862,49	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	23.370.108.085,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah	258.999.514.331,19	325.744.017.586,00

e. Belanja Bantuan Sosial (Lampiran 20)

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.1.045.000.000,00 dan Rp. 4.600.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.867.500.000,00 atau terealisasi 83,01 % dan Rp. 1.046.730.000,00 atau terealisasi 22,75 % dari target yang ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat	0,00	43.700.000,00
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	38.000.000,00
Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	965.030.000,00
Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	867.500.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Bantuan Sosial	867.500.000,00	1.046.730.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.1.900.000.000,00 dan Rp.1.900.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.644.208.000,00 atau terealisasi 33,90% dan Rp. 644.213.000,00 atau terealisasi sebesar 33,91% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	644.208.000,00	644.213.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644.208.000,00	644.213.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.1.182.671.510.989,00 dan Rp. 1.280.228.524.330,00 direalisasikan sebesar Rp.912.716.142.120,00 atau 77,17% dan sebesar Rp.543.111.645.989,00 atau 42,42% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.206.004.210.461,00 dan Rp. 203.820.211.512,00 terealisasi sebesar Rp.136.872.202.550,00 atau sebesar 66,44% dan Rp. 100.486.009.000,00 atau sebesar 49,30% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun 2012 sebesar Rp.136.872.202.550,00 adalah sebagai berikut :

Belanja Tanah	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.808.920.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	135.063.282.550,00
Jumlah Belanja Tanah	136.872.202.550,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.355.177.065.651,00 dan Rp. 285.639.571.828,00 terealisasi sebesar Rp.282.966.010.775,00 atau sebesar 79,66% dan Rp. 179.104.771.991,00 atau sebesar 62,70% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2012 sebesar Rp.282.966.010.775,00 adalah sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan mesin	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat	12.372.878.632,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	39.415.357.406,00
Belanja Modal Alat Bantu Kerja	2.204.246.280,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan	252.846.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	55.401.787.831,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	7.735.961.615,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	152.101.378.061,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	13.481.554.950,00
Jumlah Belanja Peralatan dan mesin	282.966.010.775,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.338.972.036.272,00 dan Rp. 384.073.604.300,00 terealisasi sebesar Rp.268.319.373.162,00 atau sebesar 79,15% dan Rp. 157.938.496.455,00 atau sebesar 41,12% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2012 sebesar Rp.268.319.373.162,00 adalah sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	254.511.343.383,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemakaman	5.110.891.711,00
Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas	8.697.138.068,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	268.319.373.162,00

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.267.816.802.805,00 dan Rp. 389.506.730.552,00 terealisasi sebesar Rp.211.703.906.887,00 atau sebesar 79,05% dan Rp. 102.454.759.850,00 atau sebesar 26,30% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2012 sebesar Rp.211.703.906.887,00 sebagai berikut :

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	111.756.248.438,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	75.284.403.299,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi	4.807.842.955,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan	19.855.412.195,00
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.703.906.887,00

e. Belanja Aset Tetap lainnya.

Pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.13.721.705.550,00 dan Rp. 14.841.975.060,00 terealisasi sebesar Rp.11.965.688.300,00 atau sebesar 87,20% dan Rp. 1.602.454.313,00 atau sebesar 10,79% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 sebesar Rp.11.965.688.300,00 sebagai berikut :

Belanja Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku dan Perpustakaan	11.344.398.350,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	621.289.950,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	11.965.688.300,00

f. Belanja Aset Lainnya (Lampiran 21)

Belanja Aset Tak Berwujud pada tahun 2012 dan 2011 dianggarkan sebesar Rp.979.690.250,00 dan Rp.2.346.431.078,00 terealisasi sebesar Rp.888.960.446,00 atau sebesar 90,74% dan Rp.1.525.154.380,00 atau sebesar 65%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Rp.10.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 3.054.510.589,00 dan Rp156.768.500,00.

4. Transfer

Pada Tahun 2012 Transfer dianggarkan Rp.4.673.174.229,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Sidoarjo untuk bagi hasil Retribusi Terminal Purabaya terealisasi sebesar Rp.1.200.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2011 anggaran Transfer adalah Rp3.190.280.754,00 , namun tidak direalisasikan.

Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kota Surabaya menekankan tentang penggunaan Belanja Daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan. Pada Tahun 2012 dan tahun 2011 untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.5.158.264.830.659,00 dan Rp.5.195.102.211.727,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.4.299.150.223.080,63 dan Rp.3.753.710.587.890,80 per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Nomor	Nama SKPD	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)
		Anggaran	Realisasi 2012	Realisasi 2011	
1	Dinas Pendidikan	1.427.030.983.841,00	1.239.909.224.476,44	1.242.832.712.106,80	(187.121.759.364,56)
2	Dinas Kesehatan	410.763.179.135,00	354.474.885.162,00	317.487.667.328,00	(56.288.293.973,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	188.010.415.190,00	174.944.622.017,00	72.450.083.118,00	(13.065.793.173,00)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	91.135.741.599,00	73.090.187.368,00	46.094.229.353,00	(18.045.554.231,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan	599.463.038.613,00	492.475.826.921,00	308.462.459.027,00	(106.987.211.692,00)
6	Dinas Kebakaran	48.743.737.500,00	44.215.717.554,00	35.843.220.744,00	(4.528.019.946,00)
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	74.120.268.876,00	26.256.753.194,00	20.896.279.555,00	(47.863.515.682,00)
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	337.491.446.703,00	262.979.002.994,00	151.074.662.893,00	(74.512.443.709,00)
9	Badan Perencanaan Pembangunan	26.914.884.295,00	21.608.261.229,00	20.544.267.505,00	(5.306.623.066,00)
10	Dinas Perhubungan	119.175.456.898,00	105.392.649.816,00	103.585.973.711,00	(13.782.807.082,00)
11	Badan Lingkungan Hidup	21.476.888.337,00	19.672.888.498,00	15.438.414.208,00	(1.803.999.839,00)
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	307.009.624.753,00	253.629.465.819,00	248.471.877.492,00	(53.380.158.934,00)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	26.316.207.447,00	14.852.104.926,00	13.634.888.467,00	(11.464.102.521,00)
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	32.303.878.271,00	28.227.021.611,00	28.533.796.132,00	(4.076.856.660,00)
15	Dinas Sosial	37.182.581.628,00	30.629.391.656,00	24.827.854.365,00	(6.553.189.972,00)
16	Dinas Tenaga Kerja	22.679.325.554,00	19.576.376.290,00	21.623.086.572,00	(3.102.949.264,00)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20.149.004.346,00	12.013.417.893,00	15.223.366.120,00	(8.135.586.453,00)
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	10.765.172.375,00	9.405.774.328,00	8.625.269.543,00	(1.359.398.047,00)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31.106.462.191,00	28.131.268.041,00	23.893.948.986,00	(2.975.194.150,00)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	62.474.765.290,00	43.174.116.037,00	45.387.558.724,00	(19.300.649.253,00)
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.956.261.898,00	14.973.310.362,00	14.704.928.339,00	(1.982.951.536,00)
22	Satuan Polisi Pamong Praja	29.811.319.358,00	27.238.952.712,00	26.520.029.306,00	(2.572.366.646,00)
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.049.151.032,00	14.721.124.885,00	14.398.213.780,00	(1.328.026.147,00)
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.189.813.185,00	2.159.162.855,00	1.387.080.525,00	(30.650.330,00)
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.488.592.582,00	5.032.423.145,00	4.855.460.504,00	(456.169.437,00)
26	Bagian Hukum	7.551.640.794,00	6.202.095.738,00	5.507.366.628,00	(1.349.545.056,00)

27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	3.430.108.545,00	3.058.717.799,00	3.588.701.747,00	(371.390.746,00)
28	Bagian Kerjasama	13.908.095.194,00	9.558.182.853,00	6.298.227.285,00	(4.349.912.341,00)
29	Bagian Bina Program	11.834.032.908,00	10.220.243.077,00	9.248.493.551,00	(1.613.789.831,00)
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	3.041.648.805,00	2.769.921.500,00	1.992.287.905,00	(271.727.305,00)
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.683.655.809,00	2.354.052.392,00	2.336.451.612,00	(329.603.417,00)
32	Bagian Umum dan Protokol	61.544.097.775,00	51.139.090.297,00	39.596.168.561,00	(10.405.007.478,00)
33	Bagian Perlengkapan	118.994.088.316,00	95.102.492.664,00	52.919.063.729,00	(23.891.595.652,00)
34	Bagian Hubungan Masyarakat	7.631.860.794,00	7.026.726.665,00	6.280.883.044,00	(605.134.129,00)
35	Sekretariat DPRD	75.803.752.527,00	45.177.094.004,00	41.128.422.432,00	(30.626.658.523,00)
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	451.308.503.856,00	375.438.318.659,19	423.444.310.438,00	(75.870.185.196,81)
37	Inspektorat	11.484.822.948,00	10.910.343.944,00	9.965.184.574,00	(574.479.004,00)
38	Kecamatan Genteng	10.415.275.482,00	8.974.084.032,00	7.563.721.776,00	(1.441.191.450,00)
39	Kecamatan Simokerto	8.820.915.228,00	7.566.524.217,00	6.219.421.161,00	(1.254.391.011,00)
40	Kecamatan Tegalsari	9.858.366.599,00	8.527.930.283,00	7.219.452.403,00	(1.330.436.316,00)
41	Kecamatan Bubutan	9.880.334.767,00	8.762.596.137,00	6.852.291.913,00	(1.117.738.630,00)
42	Kecamatan Kenjeran	8.132.450.300,00	7.009.245.062,00	5.814.837.672,00	(1.123.205.238,00)
43	Kecamatan Pabean Cantian	9.494.532.289,00	7.943.527.128,00	6.518.365.172,00	(1.551.005.161,00)
44	Kecamatan Semampir	9.830.738.002,00	8.089.170.902,00	6.828.148.235,00	(1.741.567.100,00)
45	Kecamatan Krembangan	9.326.357.035,00	8.395.638.081,00	6.949.868.294,00	(930.718.954,00)
46	Kecamatan Tambaksari	11.690.590.577,00	10.105.776.237,00	8.355.419.681,00	(1.584.814.340,00)
47	Kecamatan Gubeng	10.623.339.471,00	9.593.124.314,00	7.958.689.591,00	(1.030.215.157,00)
48	Kecamatan Rungkut	9.800.385.604,00	8.625.757.118,00	7.119.257.698,00	(1.174.628.486,00)
49	Kecamatan Gunung Anyar	7.904.982.565,00	6.849.114.758,00	5.541.520.452,00	(1.055.867.807,00)
50	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	7.682.151.733,00	6.363.145.819,00	5.152.863.735,00	(1.319.005.914,00)
51	Kecamatan Sukolilo	10.563.149.465,00	9.447.034.584,00	7.248.256.223,00	(1.116.114.881,00)
52	Kecamatan Mulyorejo	10.042.961.216,00	8.129.362.719,00	6.805.046.821,00	(1.913.598.497,00)
53	Kecamatan Wonokromo	12.285.439.461,00	10.436.746.837,00	8.614.122.619,00	(1.848.692.624,00)
54	Kecamatan Karang Pilang	8.052.729.361,00	7.421.596.039,00	5.906.660.920,00	(631.133.322,00)
55	Kecamatan Dukuh Pakis	7.776.002.354,00	6.689.799.235,00	5.165.699.555,00	(1.086.203.119,00)
56	Kecamatan Gayungan	7.946.206.569,00	6.967.227.140,00	5.891.656.206,00	(978.979.429,00)
57	Kecamatan Jambangan	7.463.811.886,00	6.662.110.842,00	5.309.326.777,00	(801.701.044,00)
58	Kecamatan Wonocolo	9.009.745.975,00	7.832.487.897,00	6.567.971.368,00	(1.177.258.078,00)
59	Kecamatan Sawahan	11.534.602.769,00	10.610.111.562,00	8.570.342.094,00	(924.491.207,00)
60	Kecamatan Wiyung	7.191.071.234,00	6.169.453.665,00	5.178.867.263,00	(1.021.617.569,00)
61	Kecamatan Tandes	10.508.240.599,00	8.260.261.422,00	6.879.722.428,00	(2.247.979.177,00)
62	Kecamatan Asemrowo	7.484.470.605,00	6.360.666.471,00	4.724.023.306,00	(1.123.804.134,00)
63	Kecamatan Sukomanunggal	8.398.954.870,00	7.672.467.321,00	6.020.596.553,00	(726.487.549,00)
64	Kecamatan Benowo	8.349.676.467,00	6.399.786.940,00	5.254.142.872,00	(1.949.889.527,00)
65	Kecamatan Lakarsantri	9.591.007.543,00	8.179.961.107,00	6.540.525.831,00	(1.411.046.436,00)
66	Kecamatan Sambikerep	7.758.722.493,00	6.235.756.889,00	4.881.355.956,00	(1.522.965.604,00)
67	Kecamatan Pakal	8.556.161.269,00	7.463.926.985,00	5.868.730.021,00	(1.092.234.284,00)
68	Kecamatan Bulak	7.665.628.881,00	5.945.867.892,00	5.027.315.782,00	(1.719.760.989,00)
69	Badan Kepegawaian dan Diklat	25.126.398.884,00	17.711.406.433,00	18.949.219.290,00	(7.414.992.451,00)
70	Kantor Ketahanan Pangan	2.619.811.963,00	2.324.702.941,00	2.557.156.475,00	(295.109.022,00)
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.338.328.849,00	22.669.072.199,00	33.716.851.762,00	(2.669.256.650,00)
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	18.116.660.548,00	16.953.424.074,00	16.180.169.694,00	(1.163.236.474,00)
73	Dinas Pertanian	36.141.657.162,00	31.976.402.531,00	27.403.678.974,00	(4.165.254.631,00)
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	33.258.461.416,00	26.083.745.886,00	27.252.227.408,00	(7.174.715.530,00)
JUMLAH		5.158.264.830.659,00	4.299.150.223.080,63	3.753.710.413.890,80	(859.114.607.578,37)

III. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.470.267.677.365,27 dan Rp.497.675.249.831,35 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.464.903.281.595,00 dan Rp. 1.223.413.607.402,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp.5.364.395.770,27 dan selisih kurang sebesar Rp.725.738.357.570,65. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	502.999.263.250,00	502.999.263.251,27	1,27	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	150.659.092,00	150.659.092,00	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00		
	Jumlah Penerimaan	502.999.263.250,00	503.149.922.343,27	150.659.093,27	100,02
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.174.485.000,00	0,00	(5.174.485.000,00)	0,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	32.921.496.655,00	32.882.244.978,00	(39.251.677,00)	99,88
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	38.095.981.655,00	32.882.244.978,00	(5.213.736.677,00)	86,31
	Pembiayaan Neto	464.903.281.595,00	470.267.677.365,27	5.364.395.770,27	101,15
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	805.419.392.938,25	502.999.263.251,27	-

Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2011 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.234.413.607.402	505.770.166.765,28	(728.643.440.636,72)	40,97
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	2.865.831.392,07	2.865.831.392,07	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0		
	Jumlah Penerimaan	1.234.413.607.402	508.635.998.157,35	(725.777.609.244,65)	41,20
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah	0	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(39.251.674,00)	99,64
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran	11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(39.251.674,00)	99,64
	Pembiayaan Neto	1.223.413.607.402,00	497.675.249.831,35	(725.738.357.570,65)	40,68
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	502.999.263.251,27	502.999.263.251,27	-

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2012 dan Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.502.999.263.250,00 dan Rp1.234.413.607.402, terealisasi sebesar Rp.503.149.922.343,27 dan Rp508.635.998.157,35 atau 100,02% dan 41,20%. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA)

Pada Tahun 2012 dan Tahun 2011, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp.502.999.263.250,00 dan Rp1.234.413.607.402,00 terealisasi sebesar Rp.503.149.922.343,27 dan Rp.508.635.998.157,35 atau 100,02% dan 40,97%, berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2012 dan Tahun 2011, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dianggarkan masing-masing sebesar Rp0,00. Namun terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari pengembalian dana bergulir, yaitu:

- Tahun 2012 sebesar Rp.150.659.092,00 dari Dinas Koperasi;

- Tahun 2011 sebesar Rp2.865.831.392,07, terdiri dari Dinas Koperasi sebesar Rp2.267.833.333 serta dari Bapermas dan KB sebesar Rp597.998.059,07 atas pengembalian dana talangan raskin;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2012 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp.5.174.485.000,00 namun belum dapat terealisasi pada tahun bersangkutan dan Tahun 2011 tidak dianggarkan penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.

b. Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

Pada Tahun 2012 Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.32.921.496.655,00 dan direalisasi sebesar Rp.32.882.244.978,00 yang mana sebesar Rp.10.960.748.326,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994 dan nominal sebesar Rp21.921.496.652,00 merupakan percepatan pelunasan pinjaman IBRD tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012

Pada Tahun 2011 Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp.10.960.748.326,00, yang merupakan pembayaran pokok pinjaman utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2012 dan 2011 sebesar Rp.805.419.392.938,25 dan Rp502.999.263.251,27 terdiri dari :

URAIAN	2012	2011
SILPA Pemkot	Rp 772.572.176.046,45	Rp 81.255.833.664,66
SILPA BLUD RS dr Soewandhie	Rp 32.847.216.891,80	Rp 21.743.429.586,61
Jumlah	Rp 805.419.392.938,25	Rp 502.999.263.251,27

(III). PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN ARUS KAS

A. INFORMASI UMUM

Pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber

daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

❖ **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Pihak Ketiga).

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.

Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- Pendapatan dari Dana Alokasi Umum
- Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus
- Pendapatan dari Dana Penyesuaian
- Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi

- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Bagi Hasil

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pembelian aset tetap atau belanja modal.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
- Penerimaan Kembali Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal (investasi jangka panjang)
- Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Lainnya

d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non anggaran meliputi:

1. Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SP2D), seperti Pajak penghasilan, potongan Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

2. Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berhak.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2012

Tahun 2011

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 1.235.591.421.731,79 Rp 526.273.340.988,23

Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2012 dan Tahun 2011 masing-masing surplus sebesar Rp.1.235.591.421.731,79 dan Rp.526.273.340.988,23. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Arus Masuk Kas:	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Pajak Daerah	1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27
Retribusi Daerah	183.482.993.434,78	209.834.317.887,85
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	97.696.057.372,81	75.962.115.305,92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	94.945.399.817,28	75.972.538.598,99
Dana Bagi Hasil Pajak	299.746.830.080,00	225.590.330.815,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	18.467.773.817,00	8.692.232.539,00
Dana Alokasi Umum	1.061.625.528.000,00	679.262.759.000,00
Dana Alokasi Khusus	53.227.560.000,00	49.874.625.000,00
Dana Penyesuaian	309.819.125.000,00	386.951.310.320,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	594.448.090.669,00	509.508.087.368,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	558.714.255,00	1.551.780.688,00
Pendapatan Hibah	0,00	600.000.000,00
Bantuan Keuangan Propinsi	16.777.000.000,00	10.364.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	17.468.000,00	125.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.583.790.177.332,42	3.722.647.245.276,03

Arus Keluar Kas:		
Belanja Pegawai	1.897.483.528.203,58	1.711.126.696.293,00
Belanja Barang dan Jasa	1.183.725.875.284,86	1.154.752.171.534,80
Belanja Bunga	2.223.619.192,00	2.903.307.374,00
Belanja Hibah	258.999.514.331,19	325.744.017.586,00
Belanja Bantuan Sosial	867.500.000,00	1.046.730.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	644.208.000,00	644.213.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.054.510.589,00	156.768.500,00
Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.348.198.755.600,63	3.196.373.904.287,80

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2012 dan 2011 dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp.1.852.977.636.886,55 dan Rp.1.488.358.147.753,27 terdiri dari :

Pajak Hotel	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Pajak Hotel	126.540.958.475,55	108.205.704.969,00
Pajak Restoran	172.882.689.664,00	131.138.493.688,00
Pajak Hiburan	35.403.716.528,00	29.896.451.597,00
Pajak Reklame	117.601.450.951,00	90.232.362.728,38
Pajak Penerangan Jalan	224.323.267.329,00	192.089.354.040,00
Pajak Parkir	27.286.524.344,00	21.841.038.427,00
Pajak Air Tanah	1.297.629.300,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	572.292.265.076,00	498.640.108.489,44
BPHTB	575.349.135.219,00	416.314.633.814,45
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak	1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27

Dengan perincian sebagai berikut :

	Kelompok Pajak Daerah	2012	2011
	Pajak Hotel		
1	Hotel Bintang Lima	57.235.884.266,00	48.498.946.295,00
2	Hotel Bintang Empat	34.730.125.992,00	33.161.633.048,00
3	Hotel Bintang Tiga	16.318.867.632,00	13.250.126.618,00
4	Hotel Bintang Dua	1.886.799.587,55	854.956.285,00
5	Hotel Bintang Satu	1.040.981.616,00	866.991.402,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	517.395.754,00	124.625.292,00
7	Hotel Non Bintang	14.810.903.628,00	11.448.426.029,00
	Jumlah	126.540.958.475,55	108.205.704.969,00
	Pajak Restoran		
1	Restoran	163.766.258.232,00	128.035.607.367,00
2	Katering	9.116.431.432,00	3.102.886.321,00
	Jumlah	172.882.689.664,00	131.138.493.688,00

Pajak Hiburan			
1	Tontonan Film / Bioskop	14.358.470.840,00	10.258.102.550,00
2	Hiburan Non Bioskop	18.116.174.313,00	16.938.614.096,00
3	Hiburan Insidentil	2.929.071.375,00	2.699.734.951,00
Jumlah		35.403.716.528,00	29.896.451.597,00
Pajak Reklame			
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	102.571.767.051,00	73.759.389.678,38
2	Reklame Insidentil	15.029.683.900,00	16.472.973.050,00
Jumlah Pajak Reklame		117.601.450.951,00	90.232.362.728,38
Pajak Penerangan Jalan			
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	223.928.718.954,00	191.561.854.077,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	394.548.375,00	527.499.963,00
Jumlah		224.323.267.329,00	192.089.354.040,00
Pajak Parkir			
1	Pajak Parkir	27.286.524.344,00	21.841.038.427,00
Jumlah		27.286.524.344,00	21.841.038.427,00
Pajak Air Tanah			
1	Pajak Air Tanah	1.297.629.300,00	0,00
Jumlah		1.297.629.300,00	0,00
Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak bumi Bangunan	572.292.265.076,00	498.640.108.489,44
Jumlah		572.292.265.076,00	498.640.108.489,44
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	575.349.135.219,00	416.314.633.814,45
Jumlah		575.349.135.219,00	416.314.633.814,45
Total		1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.183.482.993.434,78 dan Rp 209.834.317.887,85 terdiri dari:

Retribusi	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	70.805.253.043,90	108.689.088.799,05
Retribusi Jasa Usaha	45.500.413.898,88	39.709.531.900,80
Retribusi Perijinan Tertentu	67.177.326.492,00	61.435.697.188,00
Jumlah	183.482.993.434,78	209.834.317.887,85

Retribusi Jasa Umum tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.70.805.253.043,90 dan Rp 108.689.088.799,05 terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	17.981.722.000,00	15.307.167.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	12.897.134.841,04	22.800.700.465,72
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas Catatan Sipil)	1.299.545.000,00	2.446.107.500,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	1.633.380.000,00	607.595.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	9.301.939.500,00	11.153.519.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	12.693.725.200,00	12.286.136.900,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas Kebakaran)	1.225.409.953,00	1.755.553.278,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	6.021.152.241,00	37.966.032.982,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada	7.721.267.783,86	4.235.326.173,33
Retribusi Penyedotan Kakus (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	29.976.525,00	130.949.500,00
Jumlah	70.805.253.043,90	108.689.088.799,05

Retribusi Jasa Usaha tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.45.500.413.898,88 dan Rp 39.709.531.900,80 terdiri dari:

Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	378.312.510,00	454.856.825,00
Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	6.806.094.733,00	6.336.819.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	1.168.329.000,00	1.178.881.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.397.011.520,00	2.317.068.098,00
Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)	33.353.781.444,41	27.556.081.533,61
Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah)	582.923.911,47	499.938.815,19
Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata)	193.930.000,00	300.550.250,00
Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas Pemuda dan Olah Raga)	47.830.000,00	37.670.000,00
Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol)	553.280.000,00	583.257.500,00
Uang atas Pemakaian Tanah (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah)	18.920.780,00	438.888.379,00
Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	0,00	5.520.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Retribusi Jasa Usaha	45.500.413.898,88	39.709.531.900,80

Retribusi Perijinan Tertentu tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.67.177.326.492 dan Rp. 61.435.697.188,00 terdiri dari:

Retribusi Perijinan Tertentu	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	58.900.797.826,00	53.281.732.773,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	7.603.413.306,00	7.479.458.535,00
Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	673.115.360,00	657.005.880,00
Retribusi Ijin Jasa Konstruksi	0,00	17.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Retribusi Perijinan Tertentu	67.177.326.492,00	61.435.697.188,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.97.696.057.372,81 dan Rp. 75.962.115.305,92 terdiri dari :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	94.589.069.262,81	71.785.523.872,92
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/ PT SIER	2.797.001.910,00	3.926.591.433,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya	309.986.200,00	250.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	97.696.057.372,81	75.962.115.305,92

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari :

Penyertaan Modal	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Perusahaan Daerah Air minum	73.893.930.777,00	50.002.870.000,00
Perusahaan Daerah Pasar Surya	952.646.450,00	447.933.805,00
Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	424.910.042,00	320.055.291,00
P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim	18.005.208.523,81	20.995.680.776,92
P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim	14.190.000,00	18.984.000,00
P.T BPR Surya Artha Utama	1.298.183.470,00	0,00
Jumlah	94.589.069.262,81	71.785.523.872,92

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN) adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.94.945.399.817,28 dan Rp.75.972.538.598,99, terdiri dari :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	8.534.521.351,74	7.304.298.879,85
Bunga Deposito	41.143.835.616,08	32.043.150.684,57
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	337.590.319,00	65.206.000,00
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.604.710.875,00	1.961.572.562,00
Denda Pajak	187.500.000,00	0,00
Denda Retribusi	45.396.533,20	0,00
Hasil Eksekusi Atas Jaminan	1.081.840.227,00	821.811.346,00
Pendapatan Pengembalian	528.745.241,00	635.537.870,00
Penerimaan Lain-Lain	37.481.259.654,26	33.140.961.256,57
Jumlah	94.945.399.817,28	75.972.538.598,99

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.299.746.830.080,00 dan Rp.225.590.330.815,00 terdiri dari :

Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan	25.324.300.633,00	41.788.454.750,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	481.469.231,00	0,00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29 dan 21	252.390.887.869,00	163.995.617.981,00
Cukai Hasil Tembakau	21.550.172.347,00	19.806.258.084,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak	299.746.830.080,00	225.590.330.815,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.18.467.773.817,00 dan Rp.8.692.232.539,00 terdiri dari:

Bagi Hasil Bukan Pajak	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Provisi Sumber Daya Hutan	353.986.759,00	315.914.627,00
Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi (Royalti)	7.215.326,00	13.954.798,00
Pungutan Hasil Perikanan	343.986.219,00	261.048.242,00
Pertambangan Minyak Bumi	14.776.052.218,00	7.830.508.597,00
Pertambangan Gas Bumi	2.986.533.295,00	270.806.275,00
Jumlah	18.467.773.817,00	8.692.232.539,00

- Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.061.625.528.000,00 dan pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.679.262.759.000,00.

- Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2012 sebesar Rp.53.227.560.000,00 dan pada Tahun 2011 sebesar Rp.49.874.625.000,00 Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.309.819.125.000,00 dan Rp.386.951.310.320,00 Terdiri dari

Dana Penyesuaian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009	0,00	10.083.000.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2010	7.812.000.000,00	0,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010	302.007.125.000,00	213.022.713.320,00
Dana BOSNAS SD dan SMP Negeri/Swasta	0,00	158.237.700.000,00
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	0,00	5.607.897.000,00
Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Penyesuaian	309.819.125.000,00	386.951.310.320,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.594.448.090.669,00 dan Rp.509.508.087.368,00 yang terdiri dari :

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	190.134.343.632,00	175.873.740.308,00
Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor	229.282.433.756,00	224.423.979.609,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	173.590.773.964,00	107.780.987.601,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	93.091.037,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.405.592.380,00	1.289.775.531,00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	34.946.937,00	46.513.282,00
Jumlah Arus Masuk kas dari Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	594.448.090.669,00	509.508.087.368,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.558.714.255,00 dan Rp.1.551.780.688,00 yang terdiri dari:

Bagi Hasil Lainnya Provinsi	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bagi Hasil RP3HH	0,00	1.330.032.938,00
Retribusi TERA	558.714.255,00	221.747.750,00
Jumlah	558.714.255,00	1.551.780.688,00

Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp.16.777.000.000,00 merupakan bantuan keuangan yang diterima dari provinsi tahun 2012 diperuntukkan untuk guru swasta.

Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang Sah sebesar Rp.17.468.000,00 dari DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi).

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.1.897.483.528.203,58 dan Rp1.711.126.696.293,00 tidak termasuk belanja pegawai yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr.M.Soewandhie sebesar Rp11.321.570.105,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Belanja Tidak Langsung	1.601.256.346.557,00	1.377.173.082.114,00
Belanja Langsung	296.227.181.646,58	333.953.614.179,00
Jumlah Arus Keluar Kas Belanja Pegawai	1.897.483.528.203,58	1.711.126.696.293,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.1.183.725.875.284,86 dan Rp.1.154.752.171.534,80, tidak termasuk Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr.M.Soewandhie sebesar Rp26.913.755.255,00.

Jumlah Belanja Bunga tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.2.223.619.192,00 dan Rp.2.903.307.374,00 merupakan Belanja Bunga untuk pinjaman Loan IBRD Nomor 3726 No. SLA 764 DP3 1994.

Jumlah Belanja Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.258.999.514.331,19 dan Rp.325.744.017.586,00 yang terdiri dari :

Belanja Hibah	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	0,00	287.325.955.045,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	38.418.062.541,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.598.070.383,70	0,00
Belanja Hibah kepada Masyarakat	233.031.335.862,49	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	23.370.108.085,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah	258.999.514.331,19	325.744.017.586,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.867.500.000,00 dan Rp.1.046.730.000,00 yang terdiri dari:

Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	43.700.000,00
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	38.000.000,00
Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	965.030.000,00
Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	867.500.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Bantuan Sosial	867.500.000,00	1.046.730.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.644.208.000,00 dan Rp.644.213.000,00 terdiri dari :

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	644.208.000,00	644.213.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644.208.000,00	644.213.000,00

Jumlah Belanja Tak Terduga pada Tahun 2012 sebesar Rp.3.054.510.589,00 merupakan pengembalian sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah tahun anggaran 2011 dan pada tahun 2011 sebesar Rp.156.768.500,00 merupakan pengembalian Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru yang mana telah disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 dan tahun 2011 sebesar Rp.1.200.000.000,00 dan Rp.0,00 terkait dengan pembayaran tahap I bagi hasil kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya Bungurasih periode Oktober 2008 sampai dengan 2012.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp 911.543.493.464,00)	(Rp 542.475.145.089,00)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2012 dan Tahun 2011 masing-masing defisit sebesar Rp.911.543.493.464,00 dan Rp.542.475.145.089,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2012 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Arus Masuk Kas	2012 (Rp)	2011 (Rp)
Penjualan atas Tanah		0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin (Perlengkapan/Peralatan kantor tak terpakai)	1.094.508.000,00	636.500.900,00
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi	1.094.508.000,00	636.500.900,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Modal	912.638.001.464,00	543.111.645.989,00
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi	912.638.001.464,00	543.111.645.989,00
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(911.543.493.464,00)	(542.475.145.089,00)

Arus Masuk Kas dari penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp.1.094.508.000,00 merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai, penjualan bekas bongkaran rehab gedung-gedung seperti gedung SDN, SMPN, SMAN, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat serta barang hasil bongkaran reklame .

Arus Keluar Kas Tahun 2012 dan Tahun 2011 sebesar Rp.912.638.001.464 dan Rp.543.111.645.989,00 merupakan Belanja Modal atas aset tetap sebagai berikut :

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Belanja Modal Tanah	136.872.202.550,00	100.486.009.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.923.143.775,00	179.104.771.991,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	268.319.373.162,00	157.938.496.455,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi	211.668.633.231,00	102.454.759.850,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.965.688.300,00	1.602.454.313,00
Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak Berwujud	888.960.446,00	1.525.154.380,00
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi	912.638.001.464,00	543.111.645.989,00

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp 32.731.585.886,00)	(Rp 8.094.916.933,93)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Tahun 2012 dan Tahun 2011 masing-masing defisit sebesar Rp.32.731.585.886,00 dan Rp.8.094.916.933,93. Jumlah

tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu arus masuk kas pembiayaan dikurangi dengan arus keluar kas pembiayaan.

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.150.659.092,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.

Jumlah Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.32.882.244.978,00 merupakan pembayaran Pokok Utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726 –IND No SLA- 764/DP3/1994 sebesar Rp.10.960.748.326,00 dan percepatan pelunasan utang pokok sebesar Rp.21.921.496.652,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi No : BA-543/PB.4.5/2012 tanggal 13 Nopember 2012.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp 4.818.633.037,00	(Rp. 6.170.648.371,61)

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2012 surplus sebesar Rp.4.818.633.037,00 dan tahun 2011 defisit sebesar Rp.6.170.648.371,61. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas non anggaran (Perhitungan Pihak Ketiga-PFK) dikurangi dengan arus keluar kas non anggaran (PFK).

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran Tahun 2012 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.961.287.017,00	82.690.227.345,00
Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	6.072.667,00	11.315.493.815,00
Jumlah Arus Masuk Kas	90.967.359.684,00	94.005.721.160,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	85.448.767.049,00	100.170.296.864,61
Pengeluaran Sisa UP tahun berjalan	699.959.598,00	6.072.667,00
Jumlah Arus Keluar Kas	86.148.726.647,00	100.176.369.531,61
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	4.818.633.037,00	(6.170.648.371,61)

Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2012 dan Tahun 2011 sebesar Rp.90.967.359.684,00 dan Rp.94.005.721.160,00 terdiri atas penerimaan :

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai	68.701.786.588,00	63.401.941.606,00
Potongan Taperum	1.699.395.000,00	1.740.330.000,00
Potongan ASKES	13.752.166.529,00	12.688.395.639,00
Lain-lain PFK	6.807.938.900,00	4.859.560.100,00
Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	6.072.667,00	11.315.493.815,00
Jumlah Arus Masuk Kas PFK	90.967.359.684,00	94.005.721.160,00

Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2012 dan Tahun 2011 sebesar Rp.86.148.726.647,00 dan Rp.100.176.369.531,61 terdiri dari pembayaran untuk :

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai	68.677.447.194,00	63.397.223.683,00
Potongan Taperum	1.699.176.000,00	1.740.162.000,00
Potongan ASKES	13.746.833.504,00	12.687.661.335,00
Lain-lain PFK	1.325.310.351,00	22.345.249.846,61
Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	699.959.598,00	6.072.667,00
Jumlah Arus Masuk Kas PFK	86.148.726.647,00	100.176.369.531,61

	1 Januari 2012	1 Januari 2011
5. Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	Rp 506.259.735.245,66	Rp 536.727.104.651,97

Saldo kas per tanggal 1 Januari 2012 dan 2011 masing masing sebesar Rp.506.259.735.245,66 dan Rp.536.727.104.651,97 terdiri atas :

	1 Januari 2012 (Rp)	1 Januari 2011 (Rp)
Kas di Kas Daerah	506.259.735.245,66	536.727.104.651,97
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	506.259.735.245,66	536.727.104.651,97

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
6. Saldo Akhir Kas	Rp 836.187.758.944,25	Rp 528.429.640.784,55

Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.836.187.758.944,25 dan Rp.528.429.640.784,55 terdiri atas :

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
Kas Daerah	802.394.710.664,45	506.259.735.245,66
Kas di Bendahara Pengeluaran	699.959.598,00	300.738.179,00
Kas di Bendahara Penerimaan	245.871.790,00	125.737.773,28
Kas BLUD dr.M. Soewandhie	32.847.216.891,80	21.743.429.586,61
Jumlah Saldo Akhir Kas	836.187.758.944,25	528.429.640.784,55

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp.699.959.598,00 terdiri dari :

Uang Persediaan		
1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	551.631.037,00
2	Kecamatan Tegalsari	148.328.561,00
Jumlah		699.959.598,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.699.959.598,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2013.

Pada akhir tahun terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp.45.083.735,00 yang merupakan utang belanja kekurangan gaji terusan dan Tunjangan Profesi guru yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun 2012 namun masih terdapat sisa sebesar tersebut di atas yang belum diserahkan terimakan ke guru pada akhir tahun 2012. Utang belanja tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2013.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.245.871.790,00 merupakan pendapatan Tahun 2012 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2013, yang terdapat pada SKPD :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	24.286.900,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	96.000.500,00
3	Dinas Kesehatan	76.656.000,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	48.928.390,00
Jumlah 1		245.871.790,00

5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Tidak ada rekonsiliasi, karena entitas pelaporan menerapkan basis kas atas pendapatan dan belanja

5.5. PENJELASAN LAIN - LAIN

Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp.836.187.758.944,25 terdiri atas SILPA sebesar Rp.805.419.392.938,25, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.30.522.494.216,00 dan pendapatan ditangguhkan sebesar Rp.245.871.790,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur, secara administratif terbagi ke dalam 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 07.21' Lintang selatan dan 112.36' – 112.54' Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan selat Madura di sebelah Utara, selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.

Luas Wilayah Kota Surabaya 33.306,30 km² dengan bentuk permukaan lahan wilayah Kota Surabaya 3 – 6 meter diatas permukaan laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Surabaya merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2012 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada periode Tahun Anggaran 2012 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas.

F. Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012

Pada periode tahun anggaran 2012 terdapat hak dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya yang masih menunggu putusan pengadilan sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
1.	Pembelian suku cadang truck dari UD. Rahadiant oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Rp 149.946.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). 2. 6% pertahun dari Rp 136.314.745,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga seluruh harga pembelian suku cadang truck dibayar lunas.	- Berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Belum dibayar
2.	Perbuatan melanggar hukum tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 624/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 7 Desember 2006 dengan PT. Unicomindo	Rp 3.336.339.500,- + Rp 800.721.480,- = Rp 4.137.060.980,-.	- Belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Proses kasasi
3.	Wanprestasi atas Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 643.1/7825.17/436.5.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Permintaan Penyesuaian harga pembangunan Stadion Surabaya Barat dengan PT. Adhi Karya (Persero)	Rp 29.365.543.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap	- Belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Proses kasasi
4.	Wanprestasi atas kesepakatan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan angkut sampah melalui Surat Perintah Kerja (SPK) antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Sarana Panca Sakti, cs	Rp 290.485.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	- Berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Belum dibayar
5.	Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen. Sungkono Surabaya tanggal 30 Juni 1996 Nomor :	1. kerugian materiil Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah); 2. kerugian atas hilangnya prestasi dan hak pengelolaan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	- Berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Belum dibayar

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
	611.52/3251/402.5.08/1996 dengan PT. Gawih Jaya	3. kerugian immateriil Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 4. uang paksa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap	
6.	Sengketa kepemilikan tanah yang digunakan untuk SDN Gading III terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya antara Pemerintah Kota dengan Ny. Sri Prapti, BA	1. Ganti rugi materiil Rp1.009.974.382,43,- (satu milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh tiga rupiah). 2. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara ini	- Berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Belum dibayar - Proses Kasasi
7.	Ganti Rugi jalan tembus Mayjend. Sungkono menuju gudang peluru Kel. Dukuh Pakis kepada Linda Handayani Nyoto	Rp 3.835.065.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus	- Berkekuatan hukum tetap (inkracht). - Belum dibayar - Proses Peninjauan Kembali

BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Surabaya selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Surabaya, .

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI